



Katalog BPS: 5301004

PARAMETER MUTASI TERNAK 2011



BADAN PUSAT STATISTIK

PARAMETER MUTASI TERNAK 2011



PARAMETER MUTASI TERNAK 2011

ISBN: 978 979 064 565 3

No. Publikasi: 05210.1205

Katalog BPS: 5301004

Ukuran Buku: 18 cm x 24 cm

Jumlah Halaman: vi+120 Halaman

Editor : Dyan Pramono Effendi, SE, ME
Ir. Hasnizar Nasution

Penulis : Ir. Ester Sitorus
Muhammad Adnan, S.Si, MM
Ir. Fitris Jerico
Achmad Dahlan, M.Si
Neni Sugiarti, S.ST
Ludi Yanti, S.Si
Wisnu Hirmawan, S.Si
Fitria Hasanah, S.Si
Gunawan, A.Md

Pengolah Data : Sukaryati
Trijoko Supriyadi
Rianto

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya.

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mengemban tugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisa data statistik yang diperlukan pemerintah dan masyarakat.

Pemenuhan data peternakan secara rutin setiap tahun dilakukan BPS melalui pendekatan perusahaan, RPH dan *keurmaster*. Sedangkan populasi ternak di rumah tangga setiap tahun dilakukan estimasi dengan memanfaatkan parameter yang diperoleh dari hasil Survei Peternakan Nasional tahun 2008 (SPN08). Hasil parameter mutasi ternak tahun 2008 perlu dikoreksi untuk memperoleh gambaran adanya perubahan parameter yang disebabkan oleh berbagai hal seperti adanya program pemerintah atau wabah/bencana alam yang terjadi pada tahun berjalan. Oleh karena itu mulai tahun 2010 dilakukan Survei Estimasi Populasi Ternak.

EPT2011 dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 sebagai kelanjutan dari survei sebelumnya. Tujuan utama dari survei terkait adalah mendapatkan parameter mutasi per jenis ternak di rumah tangga serta mendapatkan estimasi populasi ternak tahun 2012. Survei Estimasi Populasi Ternak 2011 (EPT2011) dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang mencakup semua rumah tangga di dalam blok sensus terpilih. Kerangka sampel yang digunakan adalah kerangka sampel SPN08.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga kegiatan EPT2011 dapat berjalan dengan baik, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dan pengguna data secara umum baik sebagai dasar perencanaan pembangunan peternakan, maupun sebagai bahan evaluasi.

Jakarta, Oktober 2012
Kepala Badan Pusat Statistik

Suryamin

<http://www.bps.go.id>

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel Ulasan	iv
Bab I. Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	2
Tujuan	2
Ruang Lingkup dan Cakupan Data	2
Jadwal Kegiatan	3
Tahap Kegiatan	3
Pengolahan dan Penyajian Data	4
Kendala yang Dihadapi	4
Bab II. Metodologi	5
Kerangka Contoh	5
Pemilihan Kabupaten/Kota	5
Stratifikasi Blok Sensus	6
Rancangan Penarikan Sampel	11
Konsep - Definisi	11
Bab III. Hasil dan Analisis	15
Populasi Ternak	15
Parameter Kematian	21
Parameter Kelahiran	23
Bab IV. Kesimpulan dan Saran	27
Kesimpulan	27
Saran	27

Daftar Tabel Ulasan

Tabel 3.1	Estimasi Populasi Ternak Besar Menurut Pulau Tahun 2011	16
Tabel 3.2	Estimasi Populasi Ternak Kecil Menurut Pulau Tahun 2011	17
Tabel 3.3	Estimasi Populasi Unggas Menurut Pulau Tahun 2011	19
Tabel 3.4	Parameter Kematian Ternak Besar Rata-rata Menurut Pulau Tahun 2011	21
Tabel 3.5	Parameter Kematian Ternak Kecil Rata-rata Menurut Pulau Tahun 2011	22
Tabel 3.6	Parameter Kematian Unggas Rata-rata Menurut Pulau Tahun 2011	23
Tabel 3.7	Parameter Kelahiran Ternak Besar Rata-rata Menurut Pulau Tahun 2011	24
Tabel 3.8	Parameter Kelahiran Ternak Kecil Rata-rata Menurut Pulau Tahun 2011	25
Tabel 3.9	Parameter Kelahiran Unggas Rata-rata Menurut Pulau Tahun 2011	26

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Skema Pembentukan Blok Sensus Konsentrasi	8
Gambar 3.1	Estimasi Populasi Ternak Besar Tahun 2011	16
Gambar 3.2	Estimasi Populasi Ternak Kecil Tahun 2011	18
Gambar 3.3	Estimasi Populasi Unggas Tahun 2011	20

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya melaksanakan pembangunan subsektor peternakan diperlukan adanya data dan informasi peternakan yang akurat, relevan, dan *up to date*. Karena adanya kesadaran tentang arti pentingnya data statistik peternakan, maka Direktorat Jenderal Peternakan telah membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Direktorat Statistik Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) serta dengan Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN) Departemen Pertanian. Kesepakatan tersebut diwujudkan dengan melakukan Survei Rumah tangga Peternakan Nasional (SPN) yang dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun 2005–2008.

Pada tahun 2011 dilaksanakan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) secara sensus di seluruh provinsi dengan satu titik yaitu 1 Juni 2011. Data yang dihasilkan adalah populasi dan parameter mutasi ternak sapi potong, sapi perah, dan kerbau.

SPN menghasilkan parameter populasi yaitu kelahiran, kematian, pemotongan, pembelian, penjualan, penambahan dan pengurangan lain serta populasi awal untuk data tingkat rumah tangga. Parameter hasil SPN akan digunakan dalam penghitungan estimasi populasi ternak di rumah tangga setiap tahun sampai diperoleh parameter yang lebih lengkap atau dari hasil sensus. Sedangkan untuk populasi ternak yang dikuasai oleh perusahaan diperoleh melalui survei perusahaan peternakan yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin setiap tahun.

Dengan memanfaatkan parameter hasil SPN dan survei rutin yang dilakukan BPS, maka diharapkan data peternakan yang disajikan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Pemanfaatan parameter hasil SPN08 dari tahun ke tahun dipandang perlu untuk dikoreksi guna memperoleh gambaran adanya perubahan parameter yang disebabkan oleh berbagai hal seperti adanya program pemerintah atau wabah/bencana alam yang terjadi pada tahun (EPT) yang menghasilkan parameter mutasi setiap jenis ternak sebagai berjalan. Oleh karena itu mulai tahun 2010 dilakukan Survei Estimasi Populasi Ternak (EPT)

yang menghasilkan parameter mutasi setiap jenis ternak sebagai gambaran adanya perubahan parameter mutasi ternak. EPT tahun 2011 digunakan untuk mengoreksi EPT2010.

1.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan Survei Estimasi Populasi Ternak 2011 dilandasi oleh:

- a. Undang-Undang No.16 tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI No.51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; dan
- c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Stuktur Organisasi BPS.

1.3 Tujuan

Tujuan Survei Estimasi Populasi Ternak 2011 adalah :

- a. mendapatkan parameter populasi per jenis ternak di rumah tangga;
- b. mendapatkan estimasi populasi tahun 2012.

1.4 Ruang Lingkup dan Cakupan Data

Survei Estimasi Populasi Ternak 2011 (EPT2011) dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang mencakup semua rumah tangga di dalam blok sensus terpilih. Kerangka sampel yang digunakan adalah kerangka sampel SPN08. Komoditas yang dicakup dalam EPT2011 meliputi 12 jenis ternak yaitu: kerbau, kuda, sapi potong, sapi perah, babi, domba, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dan itik manila. Khusus sapi potong, sapi perah, dan kerbau adalah hasil PSPK2011.

1.5 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Survei Estimasi Populasi Ternak 2011 adalah sebagai berikut:

K E G I A T A N		W A K T U
1.	Penyusunan metodologi dan penarikan B S	Juli 2011
2.	Pencetakan dan pengiriman kuesioner estimasi populasi ternak	September 2011
3.	Pelaksanaan Lapangan	Oktober 2011
4.	Supervisi	Oktober 2011
5.	Pengiriman dokumen ke pusat	Okt - Nov 2011
6.	Pengolahan	Okt - Nov 2011
7.	Tabulasi dan penyusunan publikasi	Desember 2011
8.	Pencetakan publikasi	Desember 2011

1.6 Tahap Kegiatan

1.6.1. Persiapan

Tahap persiapan meliputi penyusunan Metodologi, Daftar Isian (Kuesioner), pencetakan dan pengiriman dokumen serta rekrutmen petugas.

1.6.2 Pelaksanaan Lapangan

Alur pelaksanaan lapangan dalam kegiatan EPT2011 adalah sebagai berikut:

- a. Pencacah (PCS) melakukan pendaftaran seluruh rumah tangga (listing) pada blok sensus yang menjadi wilayah tugasnya dengan menggunakan Daftar EPT2011.

- b. Setelah PCS melakukan listing, pengawas/pemeriksa (PMS) melakukan pemeriksaan hasil listing.
- c. Setelah melakukan pemeriksaan, PMS segera mengirim seluruh hasil pencacahan yang menjadi tanggung jawabnya ke BPS Kabupaten/Kota.
- d. BPS Kabupaten/Kota akan mengirimkan ke BPS Provinsi dan selanjutnya dikirim ke BPS RI untuk dilakukan pengolahan.

1.7 Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data EPT2011 mengikuti prosedur baku tahapan pengolahan data yaitu:

1. *Penerimaan/receiving* yaitu proses menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil pencacahan EPT2011.
2. *Batching* yaitu proses mengelompokkan dokumen menjadi *batch-batch*.
3. *Editing* dan *coding* yaitu proses memeriksa dan memberi kode isian dokumen.
4. *Entry* data yaitu proses pemasukan/perekaman data menggunakan komputer dengan program.
5. Validasi yaitu penggabungan dan pemeriksaan hasil *entry* data.
6. Tabulasi yaitu membuat tabel-tabel yang akan disajikan dalam publikasi.

Data hasil EPT2011 disajikan sampai tingkat provinsi.

1.8. Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan EPT2011, terdapat beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- a. EPT 2011 hanya menghasilkan parameter mutasi pada tingkat provinsi.
- b. Populasi awal (Pt) untuk ternak sapi potong, sapi perah, dan kerbau sudah diperoleh dari kegiatan PSPK2011, sedangkan untuk ternak lainnya belum tersedia.

2.1 Kerangka Contoh

Kerangka sampel yang digunakan dalam Survei Estimasi Populasi Ternak 2011 yaitu daftar blok sensus terpilih SPN08 berikut muatan jumlah ternak hasil listing.

2.2 Pemilihan Kabupaten/Kota

Alokasi untuk kabupaten/kota yang akan dijadikan wilayah survei berkaitan dengan keseimbangan beban anggaran yang ditanggung oleh BPS. Pemilihan kabupaten/kota didasarkan pada jumlah peternak hasil listing SPN08 dan jumlah jenis ternak untuk masing-masing kabupaten/kota.

Tahapan pemilihan kabupaten/kota dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap kabupaten/kota dimasukkan ke dalam salah satu kategori potensi, sedang dan tidak potensi (PST) untuk peternakan.
- b. Penentuan batas setiap kategori untuk peternakan dilakukan dengan:
 - i. Mengurutkan kabupaten/kota berdasarkan jumlah peternak secara berurutan dari nilai terkecil.
 - ii. Mengeluarkan nilai ekstrim (pencilan) jumlah peternak.
 - iii. Range jumlah peternak untuk seluruh kabupaten/kota pada seluruh provinsi.
 - iv. Membagi jumlah peternak ke dalam 3 (tiga) kelompok, dengan *cut of point* (CoP) = $x_j / 3$.
 - 1) Range $T \leq \text{CoP}$ merupakan kelompok kabupaten/kota teratas sampai dengan sepertiga bagian, dikategorikan sebagai kabupaten/kota tidak potensi (T) peternakan.

- 2) Range $\text{CoP} < T \leq 2\text{CoP}$ merupakan kelompok kabupaten/kota yang termasuk dalam dua pertiga bagian, dikategorikan sebagai kabupaten/kota sedang (S) peternakan.
 - 3) Range $T > 2\text{CoP}$ merupakan kelompok kabupaten/kota yang termasuk dalam sepertiga bagian dari bawah, dikategorikan sebagai kabupaten/kota potensi (P) peternakan.
- c. Dari hasil pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan kategori potensi, sedang dan tidak potensi untuk peternakan, selanjutnya dilakukan pemilihan sampel kabupaten/kota sebagai berikut:
- i. identifikasi jumlah jenis ternak pada kabupaten/kota potensi, potensi sedang, dan tidak potensi peternakan;
 - ii. untuk kabupaten/kota tidak potensi peternakan, urutkan berdasarkan jumlah peternak dari yang terbesar hingga terkecil;
 - iii. berdasarkan point (i) dan (ii) dilakukan pemilihan sampel kabupaten/kota dengan mempertimbangkan potensi peternakan dan jumlah jenis ternak yang ada dalam setiap kabupaten/kota.

2.3 Stratifikasi Blok Sensus EPT2011

Stratifikasi ditujukan untuk mengelompokkan unit-unit area (blok sensus) menurut komposisi jumlah relatif usaha subsektor peternakan menurut jenis ternak berdasarkan hasil listing SPN08. Untuk setiap jenis ternak, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis ternak adalah merupakan sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Stratifikasi dilakukan pada level kabupaten/kota.

a) Notasi Dasar

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses stratifikasi blok sensus yang akan dilakukan, berikut ini disajikan notasi-notasi yang digunakan :

i : menyatakan blok sensus ($i = 1, 2, \dots, K$)

h : menyatakan jenis usaha peternakan ($h = 1, 2, 3, \dots, 12$)

$N_{.h}$: banyaknya usaha rumah tangga peternakan h dalam blok sensus i

$A_{.h}$: jumlah blok sensus yang paling sedikit memuat satu usaha rumah tangga peternakan h

$N_{.h}$: jumlah usaha rumah tangga peternakan h

1 : Kerbau

5 : Babi

9 : Ayam Ras Pedaging

2 : Kuda

6 : Domba

10 : Ayam Ras Petelur

3 : Sapi Potong

7 : Kambing

11 : Itik

4 : Sapi Perah

8 : Ayam Buras

12 : Itik Manila

b) Proses Stratifikasi

i). $N_{hi}=0$ untuk semua h , blok sensus tersebut langsung digolongkan sebagai strata non-usaha

ii). Menghitung rata-rata banyaknya usaha rumah tangga peternakan pada blok sensus usaha dengan rumus:

$$B_{.h} = \frac{N_{.h}}{A_{.h}}$$

iii). Menghitung indeks konsentrasi pada setiap blok sensus dan jenis usaha peternakan dengan rumus:

$$I_{hi} = \frac{N_{hi}}{B_{.h}}$$

iv). Membuat peringkat dari I_{ik} di antara seluruh I_{jk} ($j = 1, 2, \dots, 12$) untuk seluruh blok sensus.

$R_{jk} = 1$ untuk nilai I_{jk} terbesar pertama

$R_{jk} = 2$ untuk nilai I_{jk} terbesar kedua

....

dst.

$R_{jk} = 0$ untuk seluruh j dengan $N_{jk} = 0$.

v). Definisikan $R_{1k} = i$ bersesuaian dengan subsektor untuk $R_{jk} = 1$ dalam blok sensus k dan $R_{1k} = 0$ jika $N_{k1} = 0$

vi). Definisikan $R_{2k} = i$ bersesuaian dengan subsektor untuk $R_{jk} = 2$ dalam blok sensus k dan $R_{2k} = 0$ jika $N_{k2} = 0$

vii). Definisikan strata/substrata berdasarkan kombinasi dari R_{1k} dan R_{2k}

Untuk lebih jelasnya, proses pembentukan blok sensus konsentrasi menurut subsektor secara skematis dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Skema Pembentukan Blok Sensus Konsentrasi

BS	Jumlah Usaha ($h=1,2, \dots, 12$)					Indeks Konsentrasi (I_{hi})					R_{1k}	R_{2k}	Strata
	1	...	h	...	12	1	...	h	...	12			
1													
2													
...													
k	N_{k1}	...	N_{kh}	...	N_{k12}	I_{k1}	...	I_{kh}	...	I_{k12}			
...													
K													
$N_{.h}$	$N_{.1}$	...	$N_{.h}$	...	$N_{.12}$								
$A_{.h}$	$A_{.1}$	...	$A_{.h}$	...	$A_{.12}$								
$B_{.h}$	$B_{.1}$	...	$B_{.h}$	...	$B_{.12}$								

Contoh :

- $R_{1k}=1$ dan $R_{2k}=0$, adalah kelompok blok sensus yang hanya mengandung rumah tangga usaha peternakan kerbau
- $R_{1k}=1$ dan $R_{2k}=2$, adalah kelompok blok sensus yang peringkat pertama dari pada indeks konsentrasi terdapat pada usaha peternakan kerbau, sedangkan peringkat keduanya terdapat pada usaha peternakan kuda.

c) Evaluasi

Proses stratifikasi yang telah dilakukan dengan prosedur yang tercantum pada butir (1.b) akan menghasilkan stratifikasi blok sensus awal yang harus dievaluasi sehingga menghasilkan kelompok-kelompok blok sensus yang lebih masuk akal. Prosedur evaluasi terhadap hasil stratifikasi awal adalah sebagai berikut :

- i). Untuk simplifikasi notasi dalam evaluasi terhadap hasil awal stratifikasi maka dilakukan perubahan notasi.

K : blok sensus

j : peringkat pertama indeks konsentrasi jenis ternak ($j=1, 2, \dots, 12$)

j' : peringkat kedua indeks konsentrasi jenis ternak ($j'=0, 1, 2, \dots, 12$). Untuk $j'=0$ berarti blok sensus tersebut hanya memuat subsektor j .

$N_{k(j,j')}^j$: jumlah usaha Rumah Tangga jenis ternak j dalam substrata (j,j')

$\bar{N}_j^j$: rata-rata banyaknya usaha jenis ternak j dalam strata j

- ii). Prosedur evaluasi

Untuk $j'=0$

Bila $N_{k(j,j')}^j < \bar{N}_j^j$, maka $j=13$, artinya blok sensus i digolongkan dalam strata non konsentrasi.

Untuk $j' \neq 0$

- Bila $N_{k(j,j')}^j < \bar{N}_j^j$ dan $N_{k(j,j')}^{j'} > \bar{N}_{j'}^{j'}$, maka $j=j'$
- Bila $N_{k(j,j')}^j > \bar{N}_j^j$ dan $N_{k(j,j')}^{j'} > \bar{N}_{j'}^{j'}$, maka $j=j'$
- Bila $N_{k(j,j')}^j < \bar{N}_j^j$ dan $N_{k(j,j')}^{j'} < \bar{N}_{j'}^{j'}$, maka $j=13$

iii). Berdasarkan hasil evaluasi, selanjutnya setiap satu blok sensus hanya dikategorikan ke dalam salah satu kelas, yaitu :

- a. Blok sensus konsentrasi usaha kerbau
- b. Blok sensus konsentrasi usaha kuda
- c. Blok sensus konsentrasi usaha sapi potong
- d. Blok sensus konsentrasi usaha sapi perah
- e. Blok sensus konsentrasi usaha babi
- f. Blok sensus konsentrasi usaha domba
- g. Blok sensus konsentrasi usaha kambing
- h. Blok sensus konsentrasi usaha ayam buras
- i. Blok sensus konsentrasi usaha ayam ras pedaging
- j. Blok sensus konsentrasi usaha ayam ras petelur
- k. Blok sensus konsentrasi usaha itik
- l. Blok sensus konsentrasi usaha itik manila
- m. Blok sensus non konsentrasi peternakan
- n. Blok sensus non usaha peternakan

2.4 Rancangan Penarikan Sampel

2.4.1 Alokasi Sampel Blok Sensus per Kabupaten/Kota

Alokasi sampel blok sensus per kabupaten/kota dilakukan dengan berbagai pertimbangan, yaitu:

- i. banyaknya kabupaten/kota terpilih lokasi survei dan distribusi BS menurut strata jenis ternak dalam kabupaten/kota;
- ii. sampel dialokasikan sedemikian rupa sehingga representatif dalam provinsi.

2.4.2 Prosedur Penarikan Sampel

Prosedur penarikan sampel dilakukan dalam satu tahap yaitu memilih sejumlah blok sensus secara *systematic sampling*. Pemilihan sampel blok sensus untuk setiap provinsi dilakukan di BPS RI. Pendaftaran rumah tangga dilakukan di setiap blok sensus terpilih. Pertanyaan mengenai parameter peternakan dilakukan langsung pada saat pendaftaran rumah tangga di setiap blok sensus terpilih.

2.5 Konsep - Definisi

2.5.1 Parameter Populasi

Pengertian “parameter” dalam survei ini adalah proporsi setiap komponen mutasi ternak terhadap stok awal ternak yang dipelihara di rumah tangga selama setahun yang lalu. Khusus ayam ras pedaging adalah proporsi jumlah ayam ras pedaging yang dijual, mati, pengurangan lain, dan penambahan lain terhadap DOC yang dibeli.

Estimasi populasi ternak yang dipelihara di rumah tangga dapat dihitung melalui pergerakan mutasi ternak selama setahun. Formula untuk menghitung populasi ternak dengan parameter adalah sebagai berikut:

$$P_{(t+1)} = P_t (1 - S1 - Am - Dt - Rd + By + Br + Ad)$$

$P_{(t+1)}$	=	Populasi ternak tahun ke-(t+1)
P_t	=	Populasi ternak tahun ke-t (populasi ternak stok awal)
Sl	=	Parameter penjualan
Am	=	Parameter pemotongan
Dt	=	Parameter kematian
Rd	=	Parameter pengurangan lain
By	=	Parameter pembelian
Br	=	Parameter kelahiran atau penetasan
Ad	=	Parameter penambahan lain

2.5.2 Koreksi Estimasi Populasi

Tahapan melakukan koreksi terhadap hasil estimasi populasi:

1. Gunakan data series sebagai pembanding dengan tetap memperhatikan sumber data, konsep, metodologi, dan kewajaran data.
2. Menentukan sumber data populasi awal (P_t).

Salah satu data populasi yang dapat dimanfaatkan sebagai populasi awal adalah hasil listing SPN08. Karena populasi awal (P_t) yang digunakan tidak berasal dari hasil sensus, maka populasi awal yang digunakan sebagai dasar estimasi harus diyakini tingkat akurasinya.

Tingkat akurasi data SPN08 dapat dilihat dari besarnya nilai *Standard Error* (SE) dan *Relative Standard Error* (RSE).

3. Angka estimasi populasi ternak yang dihasilkan dengan menggunakan hasil SPN08 sebagai populasi awal (P_t) hanya menggambarkan populasi ternak yang dikuasai rumah tangga sehingga harus dikoreksi dengan populasi ternak yang berada di perusahaan, pemotongan, dan banyaknya ternak yang keluar dan masuk, serta koreksi parameter berdasarkan hasil EPT2011.
4. Angka koreksi ($\hat{Y}$) yang dihasilkan sebaiknya berada dalam selang estimasi yang telah ditentukan dengan kaidah:

$$\text{Est} - 1,96 \text{ SE} \leq \hat{Y} \leq \text{Est} + 1,96 \text{ SE}$$

5. Koreksi terhadap angka estimasi dilakukan pada kegiatan verifikasi dan validasi angka tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian. Hasil koreksi yang telah disepakati akan digunakan sebagai angka final populasi ternak.

2.5.3 Definisi

Rumah tangga pemelihara ternak adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggotanya melakukan pemeliharaan ternak, tanpa melihat jumlah ternak dan tujuan pemeliharaan.

Kematian adalah jumlah ternak yang mati karena sakit atau kecelakaan seperti tertabrak kendaraan, terbenam, dimakan binatang buas, dan dimusnahkan.

Mati karena dipotong/disembelih tidak termasuk dalam kategori mati, tetapi termasuk kategori pemotongan.

Pengurangan lain adalah pengurangan ternak yang disebabkan oleh:

1. Ternak yang diberikan kepada pihak lain sebagai bantuan, hibah atau bagi hasil.
2. Penyerahan kembali ternak yang dibagi hasilkan kepada pemilik.
3. Ternak hilang karena dicuri atau sebab lain.

Kelahiran/Penetasan adalah lahir/menetas hidup, yaitu ternak yang dilahirkan/ditetaskan menunjukkan tanda-tanda kehidupan antara lain: jantung berdenyut, bernafas, dan bergerak. Kelahiran tetap dicatat, walaupun pada saat pencacahan anak maupun induknya sudah tidak ada lagi (karena dijual, dipotong, dll).

Penambahan lain adalah penambahan ternak selain pembelian dan kelahiran/ penetasan, misalnya:

- a. ternak yang diterima dari pihak lain sebagai bantuan, hibah, dan bagi hasil;
- b. penerimaan dari pengembalian ternak bagi hasil;
- c. ternak yang ditemukan.

Stok awal adalah jumlah ternak yang dikuasai oleh rumah tangga pada saat setahun yang lalu (dihitung satu tahun mundur mulai satu hari sebelum pencacahan).

Contoh: Pencacahan dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2011, maka yang dimaksud saat setahun yang lalu adalah keadaan pada tanggal 1 Agustus 2010.

Siklus ayam ras pedaging adalah rentang waktu yang dimulai dari saat DOC (*Day Old Chick*) dibeli, dipelihara/digemukkan, dan sampai akhirnya dijual.

Siklus terakhir yang dimaksud adalah siklus terakhir yang secara keseluruhan telah selesai dilakukan pemeliharaan (mulai dari DOC dibeli kemudian dijual).

<http://www.bps.go.id>

3

HASIL DAN ANALISIS

Pelaksanaan EPT2011 merupakan kelanjutan EPT2010 dengan jumlah blok sensus 2.176 dan pelaksanaannya terdesentralisasi di tingkat kabupaten/kota yang mencakup 12 jenis ternak.

Hasil EPT2011 menyajikan:

1. Parameter mutasi ternak menurut jenis ternak.
2. Estimasi Populasi ternak tahun 2011 dan 2012 menurut jenis ternak, kecuali ternak sapi potong, sapi perah, dan kerbau merupakan hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau 2011 (PSPK).

Publikasi ini menyajikan analisis deskriptif dan estimasi kesalahan sampling untuk parameter populasi EPT2011. Estimasi kesalahan sampling (*sampling error*) disusun bukan untuk melakukan koreksi terhadap hasil estimasi, namun untuk memberi gambaran seberapa jauh presisi data hasil estimasi EPT2011, sehingga pengguna data dapat menginterpretasikan data dengan lebih tepat. Angka estimasi rasio/proporsi terhadap stok awal dengan *standard error (SE)* dan *relative standard error (RSE)* disajikan pada lampiran *SE* dan *RSE*.

3.1 Populasi Ternak

Salah satu data peternakan yang sangat dibutuhkan dalam penentuan kebijakan di sektor peternakan adalah data populasi ternak. Data tersebut harus tersedia secara rutin karena perubahan populasi ternak terjadi sepanjang tahun. Data populasi ternak diperoleh dari berbagai kegiatan sensus dan survei. Data populasi ternak di tingkat rumah tangga diperoleh dari Sensus Pertanian, Survei Peternakan Nasional, Survei Estimasi Populasi Ternak, dan PSPK2011. Sedangkan data populasi ternak yang dipelihara oleh perusahaan diperoleh melalui survei perusahaan peternakan yang dilakukan oleh BPS secara rutin setiap tahun dan PSPK2011.

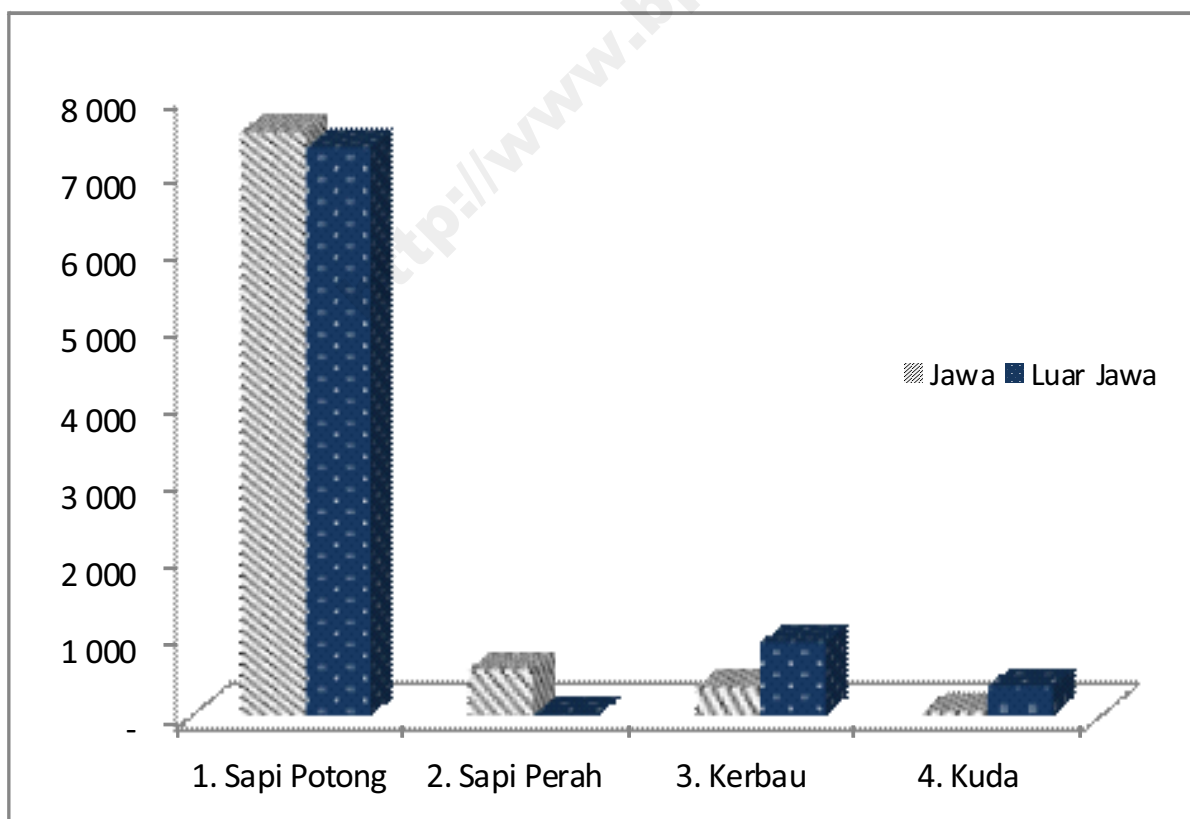
Data populasi ternak sangat dibutuhkan untuk penerapan kebijakan pemerintah dalam Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) pada tahun 2014. Dengan tersedianya data populasi ternak yang akurat dapat mendukung keberhasilan program PSDSK tersebut sekaligus meningkatkan pasokan daging untuk bahan baku industri.

Berdasarkan data hasil PSPK2011 dan Survei Estimasi Populasi Ternak (EPT) tahun 2011, penyebaran ternak besar di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Populasi Ternak Besar Menurut Pulau Tahun 2011

Jenis Ternak	Populasi Berdasarkan Pulau		
	Jawa	Luar Jawa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sapi Potong	7 512 273	7 312 100	14 824 373
2. Sapi Perah	592 520	4 693	597 213
3. Kerbau	363 049	942 029	1 305 078
4. Kuda*	52 144	378 651	430 795

* Populasi kuda hasil estimasi dari parameter mutasi tahun 2011



Gambar 3.1 Populasi Ternak Besar Tahun 2011 (000 ekor)

Hasil PSPK2011 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 di Indonesia populasi ternak besar yang terbanyak adalah sapi potong yaitu 14.824.373 ekor. Dari jumlah tersebut 7.512.273 ekor (50,68%) diantaranya berada di pulau Jawa sedangkan sisanya 7.312.100 ekor (49,32%) berada di luar Pulau Jawa.

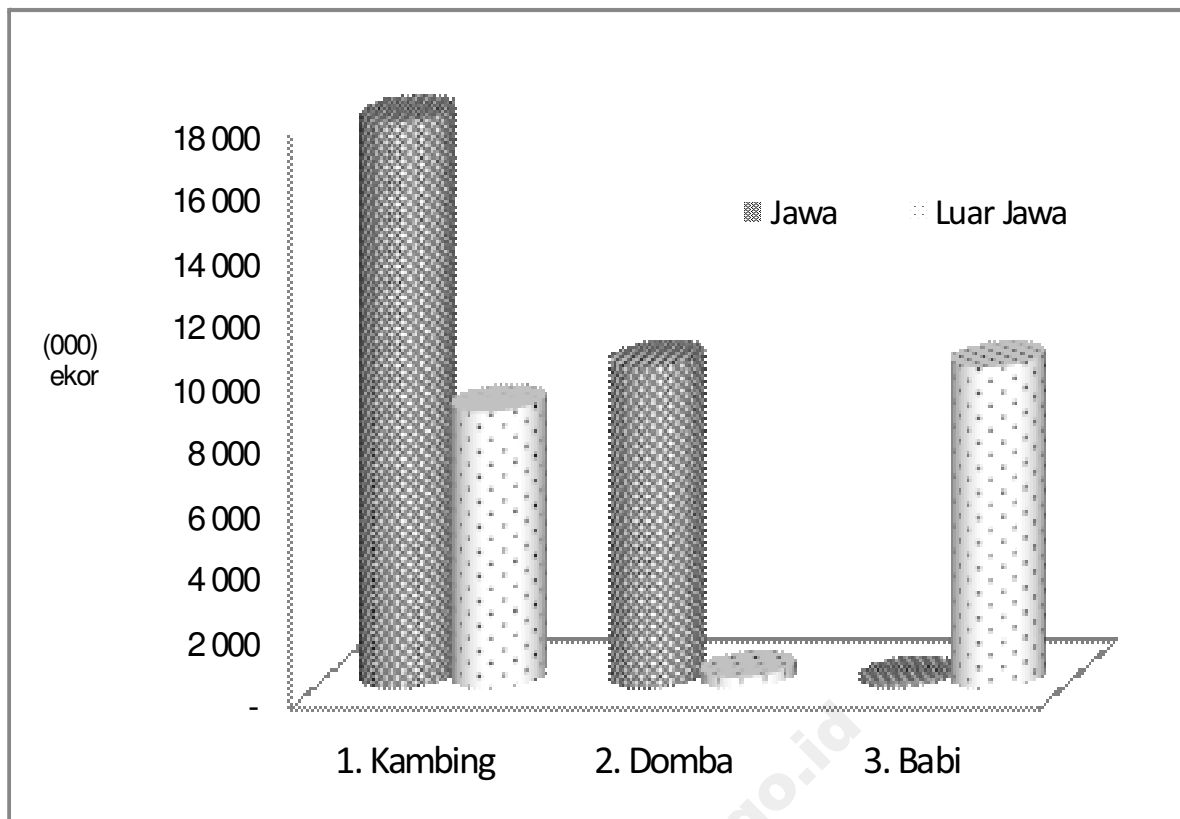
Hal yang sama terlihat pada ternak sapi perah di mana populasi sapi perah di pulau Jawa sangat dominan jika dibandingkan dengan populasi sapi perah di luar Pulau Jawa. Populasi sapi perah di Pulau Jawa mencapai 592.520 ekor (99,21%) sedangkan di luar Pulau Jawa hanya terdapat 4.693 ekor (0,79%).

Populasi kerbau di luar Pulau Jawa lebih besar jika dibandingkan dengan populasi di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa populasi kerbau tercatat sebesar 363.049 ekor (27,82%), sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 942.029 ekor (72,18%). Sama halnya dengan populasi kuda di Pulau Jawa tercatat sebesar 52.144 ekor (12,10%) dan di luar Pulau Jawa sebesar 378.651 ekor (87,90%).

Penyebaran populasi ternak kecil dari hasil Survei Estimasi Populasi Ternak (EPT) tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Estimasi Populasi Ternak Kecil Menurut Pulau Tahun 2011

Jenis Ternak	Populasi Berdasarkan Pulau		
	Jawa	Luar Jawa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kambing	17 793 253	8 686 504	26 479 757
2. Domba	10 106 109	346 378	10 452 487
3. Babi	171 140	10 075 748	10 246 888



Gambar 3. 2 Estimasi Populasi Ternak Kecil Tahun 2011

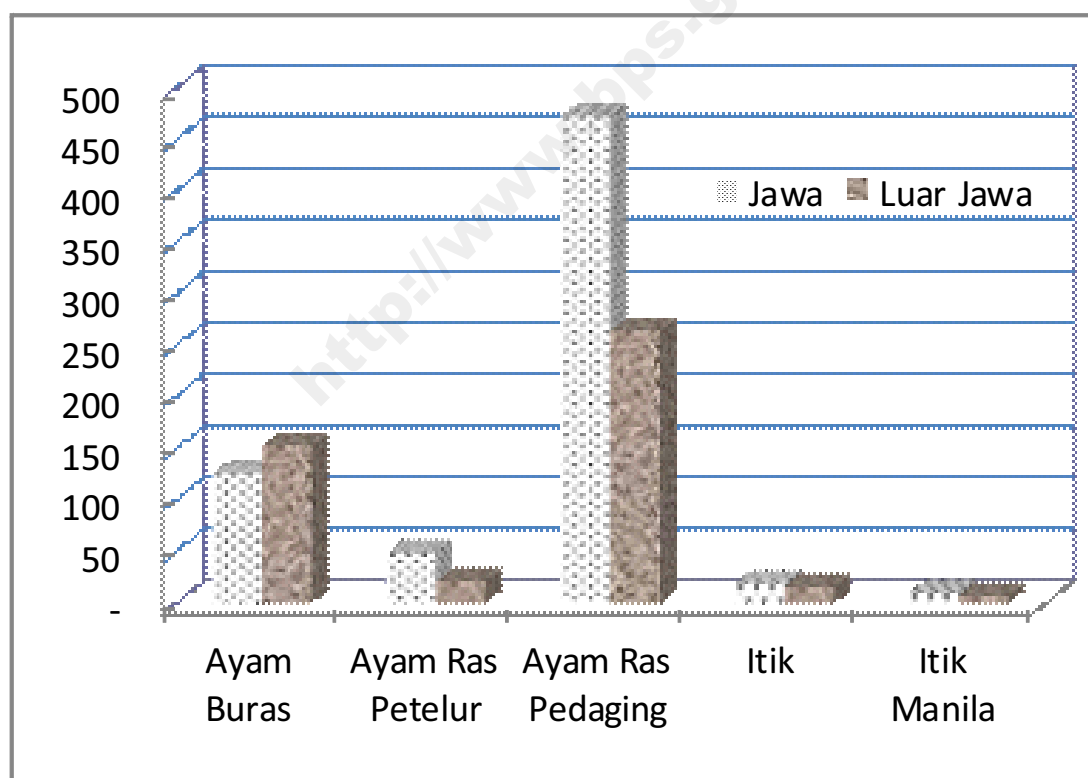
Populasi ternak kecil di Indonesia pada akhir Tahun 2011 lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan luar Pulau Jawa kecuali ternak babi. Populasi kambing di pulau Jawa tercatat sebesar 17.793.253 ekor (67,20%) sedangkan di luar pulau Jawa sebesar 8.686.504 ekor (32,80%).

Populasi domba terkonsentrasi di pulau Jawa yaitu sebesar 10.106.109 ekor (96,69%) sedangkan di luar pulau Jawa hanya sebesar 346.378 (3,31%). Berbeda halnya dengan ternak babi di mana populasi babi di luar pulau Jawa lebih besar jika dibandingkan dengan populasi di pulau Jawa. Di pulau Jawa tercatat populasi babi hanya sebesar 171.140 ekor (1,67%) sedangkan di luar Pulau Jawa mencapai 10.075.748 ekor (98,33%).

Penyebaran populasi unggas dari hasil Survei Estimasi Populasi Ternak (EPT) tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Estimasi Populasi Unggas Menurut Pulau Tahun 2011

Jenis Ternak	Populasi Berdasarkan Pulau		
	Jawa	Luar Jawa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ayam Buras	126 363 369	153 445 703	279 809 072
2. Ayam Ras Petelur	49 282 780	22 212 270	71 495 051
3. Ayam Ras Pedaging	472 803 684	264 823 627	737 627 311
4. Itik	19 929 244	16 471 390	36 400 634
5. Itik Manila	10 375 518	7 745 376	18 120 894



Gambar 3.3 Estimasi Populasi Unggas Tahun 2011
(juta ekor)

Populasi unggas di Indonesia pada tahun 2011 cenderung menyebar secara merata di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Populasi ayam buras di Pulau Jawa adalah sebesar 126.363.369 ekor (45,16%), sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 153.445.703 ekor (54,84%).

Ayam ras petelur lebih banyak dipelihara di Pulau Jawa jika dibandingkan di luar Pulau Jawa. Populasi ayam ras petelur di Pulau Jawa mencapai 49.282.780 ekor (68,93%) sedangkan di luar Pulau Jawa adalah sebesar 22.212.270 ekor (31,07%).

Sama halnya dengan ayam ras petelur, populasi ayam ras pedaging terkonsentrasi di pulau Jawa dengan populasi sebesar 472.803.684 ekor (64,10%) sedangkan di luar pulau Jawa tercatat sebesar 264.823.627 (35,90%).

Populasi itik dan itik manila menyebar merata di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Populasi itik dan itik manila di Pulau Jawa sebesar 19.929.244 ekor (54,75%) dan 10.375.518 ekor (57,26%), sedangkan di luar Pulau Jawa adalah sebesar 16.471.390 ekor (45,25%) dan 7.745.376 ekor (42,74%).

3.2 Parameter Mutasi Ternak

Salah satu tujuan dari Survei EPT 2011 adalah untuk menghasilkan parameter mutasi ternak. Komponen mutasi ternak terdiri dari stok awal, penjualan, pemotongan, kematian, pengurangan lain, pembelian, kelahiran atau penetasan, penambahan lain, dan stok akhir. Khusus ayam ras pedaging, komponen mutasi hanya mencakup pembelian anak ayam (DOC), kematian, penjualan, penambahan lain, dan pengurangan lain. Parameter pada dasarnya merupakan proporsi dari suatu komponen terhadap stok awal.

Jika keberadaan ternak di suatu wilayah hanya diusahakan oleh rumah tangga saja maka parameter mutasi ternak ini dapat digunakan untuk melakukan estimasi populasi ternak di suatu wilayah. Tetapi jika ada ternak yang diusahakan oleh selain rumah tangga seperti perusahaan, pesantren, asrama, dan sebagainya maka estimasi harus dilakukan dengan menggabungkan populasi rumah tangga hasil estimasi dengan populasi dari berbagai unsur tersebut.

3.2.1. Parameter Kematian

Salah satu parameter ternak yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dalam penetapan kebijakan di sektor peternakan adalah parameter kematian. Tingginya parameter kematian menunjukkan bahwa terjadi kematian massal terhadap populasi ternak di suatu wilayah yang disebabkan oleh suatu hal misalnya penyakit atau wabah.

Gambaran parameter kematian ternak besar di Indonesia pada tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4 Parameter Kematian Ternak Besar Rata-Rata Menurut Pulau Tahun 2011

Jenis Ternak	Parameter Kematian Rata-rata Berdasarkan Pulau		
	Jawa	Luar Jawa	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sapi Potong	0,65	2,86	1,63
2. Sapi Perah	5,00	3,90	2,31
3. Kerbau	1,93	2,86	2,62
4. Kuda	2,51	1,56	2,40

Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa persentase kematian ternak sapi potong dan kerbau lebih besar di luar Pulau Jawa. Kematian sapi potong di pulau Jawa sebesar 0,65 persen lebih kecil jika dibandingkan dengan kematian di luar Pulau Jawa sebesar 2,86 persen dengan rata-rata kematian nasional 1,63 persen.

Tingkat kematian sapi perah di pulau Jawa sebesar 5,00 persen sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 3,90 persen. Kematian kerbau di luar Pulau Jawa cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa yaitu 2,86 persen di Pulau Jawa sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 1,93 persen.

Kematian kuda di pulau Jawa cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan di luar Pulau Jawa. Kematian di pulau Jawa mencapai 2,51 persen sedangkan di luar Pulau Jawa hanya sebesar 1,56 persen.

Tabel 3.5 Parameter Kematian Ternak Kecil Rata-Rata Menurut Pulau Tahun 2011

Jenis Ternak	Parameter Kematian Rata-rata Berdasarkan Pulau		
	Jawa	Luar Jawa	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kambing	4,52	8,13	8,20
2. Domba	2,50	2,44	3,12
3. Babi	14,55	18,00	16,90

Secara nasional, kematian ternak kecil tertinggi terjadi pada babi yaitu sebesar 16,90 persen. Parameter kematian kambing dan domba masing-masing sebesar 8,20 persen dan 3,12 persen.

Kematian kambing di Pulau Jawa sebesar 4,52 persen lebih kecil jika dibandingkan dengan di luar Pulau Jawa yang mencapai 8,13 persen. Berbeda halnya dengan ternak domba, kematian domba di luar Pulau Jawa lebih kecil jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Kematian domba di luar Pulau Jawa sebesar 2,44 persen sedangkan di Pulau Jawa sebesar 2,50 persen.

Sedangkan parameter kematian babi lebih besar di luar Pulau Jawa jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Kematian babi di luar Pulau Jawa sebesar 18,00 persen sedangkan di Pulau Jawa sebesar 14,55 persen.

Tabel 3.6 Parameter Kematian Unggas Rata-Rata Menurut Pulau Tahun 2011

Jenis Ternak	Parameter Kematian Rata-rata Berdasarkan Pulau		
	Jawa	Luar Jawa	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ayam Buras	29,91	26,60	24,59
2. Ayam Ras Petelur	2,35	2,30	2,95
3. Ayam Ras Pedaging	5,01	3,91	4,44
4. Itik	10,98	8,49	5,59
5. Itik Manila	14,96	14,90	17,77

Persentase kematian unggas tertinggi terjadi pada ayam buras yaitu sebesar 24,59 persen dan terendah adalah ayam ras petelur dengan persentase sebesar 2,95 persen.

Kematian unggas di Pulau Jawa cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan kematian unggas di luar Pulau Jawa. Tercatat kematian ayam buras di pulau Jawa sebesar 29,91 persen sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 26,60 persen. Demikian pula halnya dengan ayam ras petelur di mana kematian ternak di pulau Jawa adalah sebesar 2,35 persen sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 2,30 persen. Kematian ayam ras pedaging, itik, dan itik manila di Pulau Jawa adalah berturut-turut sebesar 5,01 persen, 10,98 persen, dan 14,96 persen sedangkan di luar Pulau Jawa berturut-turut sebesar 3,91 persen, 8,41 persen, dan 14,90 persen.

3.2.2. Parameter Kelahiran

Parameter kelahiran menunjukkan banyaknya jumlah kelahiran ternak di suatu wilayah terhadap populasi ternak di awal tahun. Tingginya parameter kelahiran merupakan indikasi keberhasilan program inseminasi buatan dan program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelahiran.

Gambaran parameter kelahiran ternak besar di Indonesia pada tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Parameter Kelahiran Ternak Besar Rata-Rata Menurut Pulau Tahun 2011

Jenis Ternak	Parameter Kelahiran Rata-rata Berdasarkan Pulau		
	Jawa	Luar Jawa	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sapi Potong	13,75	22,30	20,83
2. Sapi Perah	18,47	15,26	20,89
3. Kerbau	16,55	15,69	18,02
4. Kuda	12,37	10,70	16,50

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa kelahiran ternak besar di Pulau Jawa cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan kelahiran di luar Pulau Jawa kecuali sapi potong. Tingkat kelahiran sapi potong di Pulau Jawa mencapai 13,75 persen dan di luar Pulau Jawa menunjukkan angka kelahiran sebesar 22,30 persen. Angka persentase kelahiran rata-rata secara nasional adalah sebesar 20,83 persen.

Parameter kelahiran sapi perah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa tidak berbeda jauh di mana tercatat angka kelahiran sapi perah di Pulau Jawa adalah sebesar 18,47 persen sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 15,26 persen.

Demikian pula halnya dengan ternak kerbau dan kuda yang menunjukkan kecenderungan persentase kelahiran yang lebih besar di Pulau Jawa jika dibandingkan dengan kelahiran di luar Pulau Jawa. Persentase kelahiran kerbau di Pulau Jawa adalah sebesar 16,55 persen dan di luar Pulau Jawa adalah sebesar 15,69 persen.

Angka persentase kelahiran kuda lebih kecil jika dibandingkan dengan ternak besar lainnya. Parameter kelahiran kuda secara nasional menunjukkan angka 16,50 persen lebih kecil jika dibandingkan dengan kelahiran sapi potong (20,83%), sapi perah (20,89%), dan kerbau (18,02%). Jika dilihat per pulau menunjukkan bahwa persentase kelahiran kuda di Pulau Jawa adalah sebesar 12,37 persen sedangkan di luar Pulau Jawa adalah sebesar 10,70 persen.

Tabel 3.8 Parameter Kelahiran Ternak Kecil Rata-Rata Menurut Pulau Tahun 2011

Jenis Ternak	Parameter Kelahiran Rata-rata Berdasarkan Pulau		
	Jawa	Luar Jawa	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kambing	41,85	39,95	48,30
2. Domba	30,09	22,50	24,77
3. Babi	115,13	95,02	95,12

Seperti pada ternak besar persentase angka kelahiran ternak kecil di Pulau Jawa cenderung lebih besar daripada di luar Pulau Jawa. Persentase kelahiran kambing di Pulau Jawa mencapai 41,85 persen sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 39,95 persen dan secara rata-rata persentase kelahiran kambing di Indonesia adalah sebesar 48,30 persen.

Persentase kelahiran domba lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase kelahiran kambing. Parameter kelahiran domba di Pulau Jawa hanya tercatat sebesar 30,09 persen sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 22,50 persen.

Sama halnya dengan ternak babi di mana parameter kelahiran babi mengindikasikan jumlah kelahiran yang cukup besar baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa persentase kelahiran babi mencapai 115,13 persen sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 95,02 persen dan secara nasional menunjukkan angka persentase kelahiran sebesar 95,12 persen.

Tabel 3.9 Parameter Penetasan Unggas Rata-Rata Menurut Pulau Tahun 2011

Jenis Ternak	Parameter Penetasan Rata-rata Berdasarkan Pulau		
	Jawa	Luar Jawa	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ayam Buras	126,75	107,74	152,40
2. Itik	21,51	32,56	31,00
3. Itik Manila	72,16	60,47	96,80

Tabel 3.9 menunjukkan angka penetasan ayam buras lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis unggas lainnya. Di Pulau Jawa persentase penetasan ayam buras mencapai 126,75 persen sedangkan di luar Pulau Jawa mencapai 107,74 persen sedangkan secara rata-rata nasional menunjukkan angka persentase penetasan sebesar 152,40 persen

Angka persentase penetasan itik dan itik manila cenderung kecil jika dibandingkan dengan ayam buras. Parameter penetasan itik di Pulau Jawa hanya mencapai 21,51 persen sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 32,56 persen.

Penetasan itik manila lebih besar jika dibandingkan dengan itik di mana persentase penetasan itik manila di Pulau Jawa mencapai 72,16 persen sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar 60,47 persen.

4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan EPT2011 secara umum telah terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil EPT2011 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Parameter mutasi hanya menggambarkan parameter ternak yang diusahakan di rumah-tangga.
2. Jika di suatu wilayah tidak terdapat unit perusahaan peternakan yang berbadan hukum selain rumah-tangga, maka parameter mutasi ternak hasil EPT2011 dapat menggambarkan parameter mutasi ternak di wilayah tersebut.
3. Berdasarkan hasil pelaksanaan lapangan EPT2011, parameter mutasi ternak tahun 2010 terdapat perubahan yang signifikan, sehingga parameter 2010 dikoreksi dengan parameter mutasi hasil EPT2011.

4.2 Saran

1. Perubahan parameter mutasi menunjukkan bahwa adanya perubahan yang terjadi di rumah tangga sehingga survei dengan pendekatan rumah tangga perlu dilakukan setiap tahun.
2. Pelaksanaan EPT2011 hanya untuk rumah-tangga peternakan, sehingga untuk mendapatkan data wilayah, yang juga mencakup perusahaan peternakan dan rumah-tangga khusus, disarankan untuk dilakukan proses pengolahan untuk menggabungkan antara hasil EPT2011 dengan hasil Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/*Keurmaster* yang rutin dilakukan oleh BPS serta sumber lainnya.
3. Dalam penetapan estimasi populasi wilayah dilakukan secara bersama mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi selanjutnya ditingkat Pusat.
4. Pembahasan angka dilakukan 2 tahap, angka sementara pada awal tahun dan angka tetap pada pertengahan tahun. Penetapan angka tetap ditentukan oleh Pusat.

<http://www.bps.go.id>

TABEL

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Tabel 1.a. Persentase Mutasi Sapi Potong Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi (PSPK2011)

Provinsi	Penjualan	Pemotongan	Kematian	Pengurangan Lain	Pembelian	Kelahiran	Penambahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	5,75	1,23	2,33	0,71	3,56	20,41	1,92
2. Sumatera Utara	16,06	1,00	1,30	0,41	15,12	27,95	2,27
3. Sumatera Barat	8,36	0,53	1,44	0,97	6,46	21,64	4,39
4. Riau	10,19	1,26	3,04	1,07	8,86	26,54	4,32
5. Jambi	7,90	1,06	2,39	0,99	7,24	23,80	4,74
6. Sumatera Selatan	6,46	0,99	1,30	1,11	5,87	22,15	3,54
7. Bengkulu	7,46	4,79	3,03	1,17	9,10	25,78	3,48
8. Lampung	21,78	6,35	0,79	0,98	23,81	21,79	4,35
9. Bangka Belitung	14,88	7,78	5,69	1,23	21,14	16,38	17,94
10. Kepulauan Riau	7,48	1,69	4,60	0,81	3,57	21,80	3,35
11. DKI Jakarta	36,83	0,67	0,12	-	23,16	1,41	1,72
12. Jawa Barat	29,21	3,28	0,57	1,69	27,16	12,81	5,59
13. Jawa Tengah	18,24	0,79	0,61	0,92	18,29	21,20	4,51
14. DI Yogyakarta	18,34	1,34	1,54	1,35	12,27	21,71	3,64
15. Jawa Timur	15,72	0,64	0,76	2,17	12,24	19,35	5,77
16. Banten	226,54	3,81	0,29	0,21	232,58	6,03	1,36
17. Bali	15,46	0,11	1,10	1,63	9,90	19,42	5,50
18. Nusa Tenggara Barat	10,43	0,96	2,94	1,18	6,22	23,44	3,67
19. Nusa Tenggara Timur	5,96	0,91	4,17	1,04	2,07	19,50	1,22
20. Kalimantan Barat	11,12	1,56	1,29	1,60	10,62	16,54	5,27
21. Kalimantan Tengah	6,27	1,43	3,34	1,48	7,20	17,78	4,65
22. Kalimantan Selatan	9,89	0,73	3,42	0,87	5,11	22,37	3,52
23. Kalimantan Timur	5,93	2,38	2,83	0,76	5,66	19,30	3,13
24. Sulawesi Utara	6,91	0,53	1,15	0,63	6,92	18,01	1,74
25. Sulawesi Tengah	5,46	1,05	2,16	0,86	3,15	21,75	2,02
26. Sulawesi Selatan	7,98	1,32	3,49	0,82	3,95	23,21	1,94
27. Sulawesi Tenggara	8,95	0,99	5,56	1,44	3,54	26,82	3,21
28. Gorontalo	5,32	1,71	1,43	0,90	4,32	20,08	2,81
29. Sulawesi Barat	6,32	0,74	4,46	1,33	3,47	27,50	4,41
30. Maluku	9,56	1,24	5,50	0,83	2,70	26,51	1,12
31. Maluku Utara	5,39	1,12	3,46	1,15	2,62	20,80	1,87
32. Papua Barat	8,41	0,57	2,55	0,91	2,85	29,43	3,39
33. Papua	9,03	1,19	2,32	0,72	3,43	21,43	1,31
Indonesia	14,52	1,23	1,63	1,39	11,93	20,83	4,21

Tabel 1.b. Persentase Mutasi Sapi Perah Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi (PSPK2011)

Provinsi	Penjualan	Pemotongan	Kematian	Pengurangan Lain	Pembelian	Kelahiran	Penambahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	-	-	4,00	-	-	8,00	8,00
2. Sumatera Utara	9,55	0,66	1,59	2,65	5,70	17,90	0,13
3. Sumatera Barat	6,16	3,45	10,10	1,23	3,94	30,79	3,94
4. Riau	-	3,19	7,45	-	30,85	21,28	41,49
5. Jambi	-	-	-	-	-	14,71	2,94
6. Sumatera Selatan	-	-	-	0,83	0,83	16,53	10,74
7. Bengkulu	16,15	6,15	8,08	5,38	2,31	22,31	6,15
8. Lampung	3,13	0,00	7,50	1,25	0,63	21,25	14,38
9. Bangka Belitung	5,56	13,89	3,70	-	-	12,96	20,37
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	10,70	2,26	1,48	0,09	9,22	27,57	0,23
12. Jawa Barat	14,57	1,22	2,16	1,75	13,19	22,06	6,08
13. Jawa Tengah	28,28	1,24	2,33	1,96	28,38	17,95	6,22
14. DI Yogyakarta	17,16	0,03	21,98	2,74	15,98	15,82	5,64
15. Jawa Timur	14,58	0,25	2,05	1,23	9,76	21,86	6,22
16. Banten	-	-	-	-	-	5,56	-
17. Bali	-	-	-	-	-	49,46	-
18. Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	5,88	-
19. Nusa Tenggara Timur	10,81	8,11	10,81	-	-	16,22	-
20. Kalimantan Barat	5,92	-	1,78	-	10,65	15,98	14,79
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	1,05	-	1,05	-	9,47	8,42	-
23. Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	10,34	-
24. Sulawesi Utara	-	-	31,58	-	-	47,37	-
25. Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	60,00	-
26. Sulawesi Selatan	5,78	0,28	4,46	0,56	5,29	22,56	0,77
27. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
28. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	13,33	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-	-	-	-
31. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
33. Papua	-	-	-	-	-	10,00	-
Indonesia	17,99	0,74	2,31	1,54	15,28	20,89	6,14

Tabel 1.c. Persentase Mutasi Kerbau Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi (PSPK2011)

Provinsi	Penju- alan	Pemo- tongan	Kema- tian	Pengurang- an Lain	Pem- belian	Kela- hiran	Penam- bahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	4,34	1,05	3,70	0,53	2,02	17,26	0,87
2. Sumatera Utara	5,58	0,50	1,19	0,47	3,41	18,50	1,59
3. Sumatera Barat	5,01	0,21	1,43	0,78	2,86	16,66	2,29
4. Riau	6,59	0,47	2,41	0,85	2,46	21,28	0,81
5. Jambi	4,78	1,39	4,40	0,64	2,50	16,95	0,86
6. Sumatera Selatan	5,35	1,44	2,00	0,74	2,53	17,18	1,37
7. Bengkulu	6,34	1,00	4,33	0,85	1,77	20,42	0,80
8. Lampung	5,73	0,39	1,59	0,87	1,97	22,90	2,65
9. Bangka Belitung	6,19	0,44	3,10	-	0,88	7,08	-
10. Kepulauan Riau	-	8,33	-	25,00	-	8,33	-
11. DKI Jakarta	12,50	6,25	4,69	-	8,85	9,38	2,08
12. Jawa Barat	8,49	0,80	0,86	0,60	7,70	15,48	3,07
13. Jawa Tengah	12,20	1,65	1,49	0,58	9,99	20,40	3,20
14. DI Yogyakarta	14,61	-	1,88	0,63	5,20	17,29	1,70
15. Jawa Timur	8,34	0,36	1,20	0,94	6,35	17,55	2,62
16. Banten	4,30	0,73	1,48	0,53	1,32	19,20	2,02
17. Bali	8,52	0,05	0,59	0,30	5,02	9,90	1,92
18. Nusa Tenggara Barat	8,40	1,04	3,94	0,88	2,14	22,70	0,77
19. Nusa Tenggara Timur	3,94	1,15	5,08	2,13	1,58	17,12	2,28
20. Kalimantan Barat	6,43	0,24	1,62	0,64	1,25	14,21	0,58
21. Kalimantan Tengah	5,57	2,93	3,06	0,59	2,30	28,90	0,93
22. Kalimantan Selatan	7,35	0,96	6,58	0,40	2,22	18,81	0,44
23. Kalimantan Timur	4,31	1,02	2,99	0,53	2,10	9,92	0,46
24. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	3,58	0,46	1,51	0,62	0,46	12,76	0,53
26. Sulawesi Selatan	4,83	1,20	2,14	0,43	1,87	12,98	0,78
27. Sulawesi Tenggara	4,43	0,92	3,86	0,92	1,45	16,77	1,05
28. Gorontalo	-	-	7,69	-	-	7,69	-
29. Sulawesi Barat	2,01	1,07	1,88	0,46	1,42	15,96	1,09
30. Maluku	2,97	0,91	1,76	1,40	0,76	27,43	0,26
31. Maluku Utara	6,52	0,27	7,58	0,40	14,10	15,16	-
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
33. Papua	13,16	3,15	2,69	0,09	5,93	26,69	1,30
Indonesia	5,98	0,91	2,62	0,82	3,22	18,02	1,72

Tabel 1.d. Persentase Mutasi Kambing Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penju- alan	Pemo- tongan	Kema- tian	Pengurang- an Lain	Pem- belian	Kela- hiran	Penam- bahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	12,50	1,90	6,60	1,60	2,80	22,70	0,90
2. Sumatera Utara	19,30	5,26	9,40	2,90	10,00	38,10	4,50
3. Sumatera Barat	25,39	1,00	12,60	2,80	3,30	42,00	8,00
4. Riau	12,60	4,50	12,10	1,90	4,00	34,80	2,90
5. Jambi	14,90	3,40	8,01	3,30	3,60	33,40	0,80
6. Sumatera Selatan	14,10	6,00	7,60	3,60	5,80	31,80	1,80
7. Bengkulu	9,60	2,10	9,70	3,40	2,40	25,30	1,60
8. Lampung	22,00	9,50	9,00	0,80	4,80	49,80	4,60
9. Bangka Belitung	28,60	4,77	7,75	-	14,30	46,74	-
10. Kepulauan Riau	14,60	0,90	5,18	0,40	4,50	38,40	1,20
11. DKI Jakarta	35,37	6,59	3,04	0,22	7,41	38,58	0,37
12. Jawa Barat	31,11	3,53	5,14	1,40	7,82	45,52	3,90
13. Jawa Tengah	32,26	1,80	4,42	1,50	12,00	45,30	3,30
14. DI Yogyakarta	25,10	1,10	5,10	1,20	5,70	39,20	6,60
15. Jawa Timur	27,73	3,09	4,29	0,70	7,60	44,40	3,00
16. Banten	17,00	2,40	5,10	3,20	2,30	38,10	4,30
17. Bali	33,40	1,80	3,76	1,99	4,50	51,95	4,00
18. Nusa Tenggara Barat	30,00	4,20	8,26	1,10	6,50	61,80	1,90
19. Nusa Tenggara Timur	9,90	4,70	18,51	4,82	4,32	39,49	2,70
20. Kalimantan Barat	12,30	6,10	10,00	0,60	9,60	30,30	-
21. Kalimantan Tengah	55,40	2,99	7,80	-	53,10	18,10	2,20
22. Kalimantan Selatan	27,21	4,00	10,70	2,50	13,27	38,19	1,00
23. Kalimantan Timur	15,50	3,75	4,02	0,80	2,39	33,94	0,24
24. Sulawesi Utara	33,90	4,41	9,80	2,79	1,37	54,08	-
25. Sulawesi Tengah	14,60	2,00	7,90	3,00	4,80	34,50	2,40
26. Sulawesi Selatan	26,86	2,30	8,00	2,40	4,40	45,10	0,29
27. Sulawesi Tenggara	20,70	3,30	7,37	1,30	1,30	51,60	4,50
28. Gorontalo	20,23	1,70	5,58	0,70	2,61	24,80	1,40
29. Sulawesi Barat	56,80	1,90	5,31	6,40	6,50	74,30	0,62
30. Maluku	22,07	5,11	10,26	1,64	-	49,50	-
31. Maluku Utara	19,79	3,16	6,20	5,55	0,90	42,59	0,40
32. Papua Barat	34,00	4,80	6,42	1,50	23,00	30,50	0,10
33. Papua	21,49	2,93	1,68	0,40	1,50	34,75	1,70
Indonesia	26,40	3,90	8,20	2,40	7,60	48,30	1,03

Tabel 1.e. Persentase Mutasi Domba Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penju- alan	Pemo- tongan	Kema- tian	Pengurang- an Lain	Pem- belian	Kela- hiran	Penam- bahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	15,40	-	1,60	1,60	-	21,70	3,10
2. Sumatera Utara	34,65	1,60	6,14	-	12,40	34,50	-
3. Sumatera Barat	26,44	-	0,86	-	-	36,60	-
4. Riau	44,40	1,30	3,47	0,67	-	80,60	-
5. Jambi	10,20	9,50	12,30	-	6,10	28,70	-
6. Sumatera Selatan	24,67	-	3,28	2,99	16,18	22,45	-
7. Bengkulu	12,00	5,90	-	-	-	22,87	-
8. Lampung	33,21	1,10	1,70	1,40	9,78	23,76	1,20
9. Bangka Belitung	57,49	-	12,56	-	44,92	29,95	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	25,13	-	-	-	-	50,11	-
12. Jawa Barat	34,06	2,28	2,96	2,37	34,15	30,60	1,01
13. Jawa Tengah	36,03	3,37	2,94	2,07	42,45	24,19	1,68
14. DI Yogyakarta	41,00	3,30	3,66	0,90	42,52	33,08	1,10
15. Jawa Timur	29,90	1,60	3,00	0,62	27,34	23,83	1,07
16. Banten	18,08	0,95	2,43	1,80	2,04	18,73	1,62
17. Bali	8,30	13,30	3,09	-	0,50	74,00	0,00
18. Nusa Tenggara Barat	22,15	0,70	3,09	-	18,58	22,30	0,81
19. Nusa Tenggara Timur	18,10	-	1,71	1,58	-	37,50	-
20. Kalimantan Barat	49,16	-	-	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	18,03	6,63	3,40	-	-	21,43	-
22. Kalimantan Selatan	34,71	-	-	-	26,14	20,50	-
23. Kalimantan Timur	26,03	-	-	-	19,09	17,36	-
24. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	73,96	3,90	3,29	-	31,03	24,63	-
26. Sulawesi Selatan	6,90	-	1,38	-	-	18,62	-
27. Sulawesi Tenggara	22,22	-	5,56	-	-	22,22	-
28. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	24,73	-	2,42	-	-	25,00	-
31. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
33. Papua	-	-	-	-	-	22,73	-
Indonesia	31,04	3,30	3,12	1,70	30,98	24,77	1,09

Tabel 1.f. Persentase Mutasi Babi Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penju- alan	Pemo- tongan	Kema- tian	Pengurang- an Lain	Pem- belian	Kela- hiran	Penam- bahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	33,33	11,11	11,11	-	22,22	100,00	-
2. Sumatera Utara	92,70	7,50	14,20	10,70	24,00	106,60	9,40
3. Sumatera Barat	11,70	17,53	14,23	-	-	55,51	-
4. Riau	21,80	17,10	4,13	0,60	2,90	33,50	-
5. Jambi	78,03	2,45	26,48	-	11,21	123,83	-
6. Sumatera Selatan	32,20	48,00	22,56	0,80	7,48	112,40	2,60
7. Bengkulu	216,18	65,12	31,44	-	129,01	184,09	-
8. Lampung	143,20	31,30	24,80	0,80	30,53	184,60	1,20
9. Bangka Belitung	88,90	2,30	13,00	2,00	6,10	122,70	-
10. Kepulauan Riau	95,33	5,54	7,90	-	6,40	145,66	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12. Jawa Barat	30,00	16,00	28,57	-	-	150,00	-
13. Jawa Tengah	201,00	0,20	9,30	-	36,91	163,10	-
14. DI Yogyakarta	136,86	16,15	33,72	-	36,91	191,78	-
15. Jawa Timur	106,91	8,15	12,00	26,00	44,91	99,52	2,30
16. Banten	90,44	8,85	3,70	-	71,21	86,40	0,40
17. Bali	150,80	6,60	26,10	3,70	70,20	158,80	5,70
18. Nusa Tenggara Barat	20,00	3,90	5,77	0,90	7,60	37,70	2,20
19. Nusa Tenggara Timur	13,70	7,30	20,60	5,10	6,50	84,02	2,60
20. Kalimantan Barat	9,70	11,60	8,70	1,80	3,00	35,30	1,20
21. Kalimantan Tengah	20,10	16,40	7,90	3,40	11,50	32,90	3,50
22. Kalimantan Selatan	52,40	36,80	29,80	5,70	-	124,90	-
23. Kalimantan Timur	21,10	11,00	5,80	5,20	4,70	39,10	1,20
24. Sulawesi Utara	67,57	34,85	13,15	48,00	57,32	75,05	1,07
25. Sulawesi Tengah	63,70	19,17	25,80	11,00	23,50	122,50	1,99
26. Sulawesi Selatan	68,04	16,63	15,67	10,00	51,36	64,90	3,20
27. Sulawesi Tenggara	52,30	13,60	19,30	1,80	45,90	70,30	3,60
28. Gorontalo	70,81	33,30	47,47	-	5,56	156,83	-
29. Sulawesi Barat	26,90	12,70	23,08	2,50	24,70	46,20	4,50
30. Maluku	12,80	4,60	5,70	14,80	0,30	47,20	-
31. Maluku Utara	25,79	17,05	10,43	18,00	1,30	108,60	2,20
32. Papua Barat	31,70	18,00	29,26	18,00	24,20	96,58	0,02
33. Papua	43,90	19,40	21,49	10,00	9,67	95,77	1,10
Indonesia	58,89	10,10	16,90	4,30	18,80	95,12	3,50

Tabel 1.g. Persentase Mutasi Kuda Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penju- alan	Pemo- tongan	Kema- tian	Pengurang- an Lain	Pem- belian	Kela- hiran	Penam- bahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	0,86	-	-	-	-	11,76	-
2. Sumatera Utara	14,31	-	4,14	-	7,82	14,76	-
3. Sumatera Barat	8,50	-	-	-	-	16,49	-
4. Riau	-	-	-	-	-	-	-
5. Jambi	16,54	-	3,38	-	-	19,92	-
6. Sumatera Selatan	15,49	6,78	5,81	-	25,31	15,96	-
7. Bengkulu	50,00	-	-	-	50,00	-	-
8. Lampung	20,97	0,66	0,39	11,94	27,58	10,90	-
9. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12. Jawa Barat	13,42	1,67	6,65	-	10,96	15,56	2,46
13. Jawa Tengah	13,20	3,09	-	2,37	4,60	22,67	0,58
14. DI Yogyakarta	31,80	-	-	-	17,81	16,28	-
15. Jawa Timur	3,40	-	8,40	2,06	3,30	9,14	1,57
16. Banten	32,19	-	-	-	-	10,56	10,59
17. Bali	21,32	-	-	-	53,81	8,88	-
18. Nusa Tenggara Barat	4,93	2,20	1,78	0,39	4,40	18,68	0,35
19. Nusa Tenggara Timur	22,22	1,70	2,29	2,41	8,07	22,14	2,30
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	28,63	3,57	2,23	0,89	12,93	17,03	0,45
23. Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
24. Sulawesi Utara	11,97	4,07	1,00	-	6,85	16,95	1,00
25. Sulawesi Tengah	16,61	3,45	2,38	-	17,65	15,09	-
26. Sulawesi Selatan	5,10	1,30	0,70	-	1,80	11,10	3,10
27. Sulawesi Tenggara	13,69	2,08	2,08	-	-	13,87	-
28. Gorontalo	3,21	-	-	-	5,05	9,92	-
29. Sulawesi Barat	5,66	-	2,13	-	3,20	5,64	-
30. Maluku	5,50	-	1,21	-	1,85	1,00	0,61
31. Maluku Utara	12,50	12,50	12,50	-	-	50,00	-
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
33. Papua	0,64	-	-	-	0,96	11,29	-
Indonesia	5,70	2,40	2,40	2,60	2,60	16,50	1,58

Tabel 1.h. Persentase Mutasi Ayam Buras Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penju- alan	Pemo- tongan	Kema- tian	Pengurang- an Lain	Pem- belian	Pene- tasan	Penam- bahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	83,90	14,20	20,88	1,50	2,40	118,08	1,20
2. Sumatera Utara	31,70	15,40	38,10	5,30	5,30	92,50	1,70
3. Sumatera Barat	36,90	14,90	44,40	3,30	13,40	91,70	1,30
4. Riau	10,90	22,40	35,20	4,50	2,30	78,30	1,10
5. Jambi	17,70	26,20	43,45	5,20	1,70	111,20	0,90
6. Sumatera Selatan	28,57	24,58	30,00	12,13	11,80	94,54	1,61
7. Bengkulu	20,10	13,30	23,53	1,80	2,00	72,20	0,40
8. Lampung	27,20	25,29	22,73	7,65	4,27	97,70	1,00
9. Bangka Belitung	43,64	29,70	19,99	8,62	6,80	100,52	3,20
10. Kepulauan Riau	27,40	22,70	35,20	4,90	3,80	105,40	0,20
11. DKI Jakarta	33,43	22,53	20,29	5,36	1,36	80,79	0,08
12. Jawa Barat	36,80	22,40	34,80	6,10	5,10	99,40	2,00
13. Jawa Tengah	89,07	25,50	26,59	7,50	7,00	152,90	1,20
14. DI Yogyakarta	148,47	14,20	24,98	4,20	13,20	193,40	2,10
15. Jawa Timur	28,10	17,30	28,60	2,70	6,40	83,10	2,80
16. Banten	36,80	38,91	44,17	17,50	3,30	150,90	2,80
17. Bali	127,69	48,31	10,43	10,52	21,05	174,50	3,70
18. Nusa Tenggara Barat	98,49	31,40	23,17	8,10	8,00	168,80	1,83
19. Nusa Tenggara Timur	17,40	22,30	44,17	10,90	2,40	99,50	2,40
20. Kalimantan Barat	23,61	25,98	22,67	7,30	2,70	102,90	1,00
21. Kalimantan Tengah	37,76	22,62	21,24	0,00	7,16	78,50	0,00
22. Kalimantan Selatan	54,60	23,60	41,70	3,67	7,40	122,62	0,90
23. Kalimantan Timur	83,69	14,00	24,48	1,90	2,07	139,75	0,30
24. Sulawesi Utara	40,80	38,90	18,99	9,40	1,40	120,69	2,20
25. Sulawesi Tengah	18,20	31,49	27,47	5,20	2,80	87,80	0,90
26. Sulawesi Selatan	95,85	22,90	23,63	6,60	7,10	149,28	2,39
27. Sulawesi Tenggara	59,99	22,10	31,62	4,00	2,40	123,20	0,80
28. Gorontalo	41,34	39,76	27,47	6,20	1,30	139,70	0,60
29. Sulawesi Barat	72,42	31,51	20,26	10,30	3,30	156,41	1,00
30. Maluku	46,85	22,10	24,30	6,40	3,49	110,50	0,40
31. Maluku Utara	23,90	12,00	18,20	6,90	3,82	64,00	0,70
32. Papua Barat	22,20	17,40	17,93	14,50	6,00	80,00	2,20
33. Papua	11,50	10,40	6,86	3,56	3,26	28,80	0,54
Indonesia	104,51	20,00	24,59	5,00	22,00	152,40	0,76

Tabel 1.i Persentase Mutasi Ayam Ras Petelur Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penju- alan	Pemo- tongan	Kema- tian	Pengurang- an Lain	Pem- belian	Pene- tasan	Penam- bahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	11,73	11,81	4,09	0,08	38,95	-	0,11
2. Sumatera Utara	7,57	0,49	2,08	0,32	18,67	-	0,08
3. Sumatera Barat	19,71	0,68	3,52	0,02	34,51	-	-
4. Riau	0,92	-	0,17	-	-	-	-
5. Jambi	-	-	0,36	-	2,31	-	-
6. Sumatera Selatan	18,69	-	2,74	0,14	25,90	-	1,88
7. Bengkulu	30,29	7,22	3,86	-	54,98	-	-
8. Lampung	9,41	1,10	2,79	1,55	15,41	-	-
9. Bangka Belitung	48,65	-	3,05	-	55,15	-	5,56
10. Kepulauan Riau	3,78	-	2,04	-	9,35	-	-
11. DKI Jakarta	-	5,21	-	3,95	5,30	-	-
12. Jawa Barat	13,41	5,99	1,86	0,78	31,61	-	0,25
13. Jawa Tengah	33,29	0,26	3,67	0,44	35,04	-	0,10
14. DI Yogyakarta	27,15	-	-	0,03	41,52	-	-
15. Jawa Timur	19,93	0,23	2,84	0,14	28,10	-	1,27
16. Banten	15,87	-	5,71	2,66	10,73	-	-
17. Bali	21,47	0,82	3,10	0,09	26,44	-	0,01
18. Nusa Tenggara Barat	-	-	2,26	0,46	21,09	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	20,15	-	2,25	1,81	24,25	-	-
20. Kalimantan Barat	3,94	-	3,51	-	16,33	-	-
21. Kalimantan Tengah	2,59	-	2,87	-	7,40	-	-
22. Kalimantan Selatan	13,50	-	1,77	0,19	25,58	-	0,05
23. Kalimantan Timur	21,42	2,74	1,09	-	46,82	-	-
24. Sulawesi Utara	16,46	-	2,63	-	34,42	-	0,05
25. Sulawesi Tengah	17,23	-	3,45	0,17	23,12	-	1,95
26. Sulawesi Selatan	45,24	2,66	1,67	0,13	48,94	-	0,01
27. Sulawesi Tenggara	14,76	2,20	2,74	-	47,55	-	-
28. Gorontalo	14,49	-	2,24	-	55,10	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-	-	-	-
31. Maluku Utara	-	9,65	5,58	7,61	11,66	-	0,70
32. Papua Barat	-	-	0,09	-	6,02	-	0,47
33. Papua	24,05	-	2,16	-	42,19	-	-
Indonesia	23,52	3,40	2,95	0,32	30,45	-	0,05

Tabel 1.j. Persentase Mutasi Ayam Ras Pedaging Terhadap Pembelian DOC Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan	Kematian	Pengurang-an Lain	Penam-bahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. NAD	77,11	5,87	0,54	-
2. Sumatera Utara	93,77	3,57	0,10	-
3. Sumatera Barat	88,20	4,70	0,20	-
4. Riau	84,84	4,14	1,03	-
5. Jambi	96,29	1,80	0,44	-
6. Sumatera Selatan	98,66	4,59	0,02	0,12
7. Bengkulu	94,89	4,21	0,23	0,13
8. Lampung	88,41	1,90	0,30	-
9. Bangka Belitung	88,40	4,38	0,32	-
10. Kepulauan Riau	90,74	0,70	0,01	-
11. DKI Jakarta	75,45	9,82	0,73	-
12. Jawa Barat	94,97	3,87	0,28	0,80
13. Jawa Tengah	91,32	5,07	0,20	0,08
14. DI Yogyakarta	94,99	3,10	0,20	-
15. Jawa Timur	95,62	3,70	0,30	0,20
16. Banten	94,51	4,49	0,54	-
17. Bali	92,64	6,10	0,11	-
18. Nusa Tenggara Barat	80,78	2,23	0,07	-
19. Nusa Tenggara Timur	78,05	5,18	0,26	-
20. Kalimantan Barat	87,39	3,79	0,42	-
21. Kalimantan Tengah	92,95	4,95	0,35	0,03
22. Kalimantan Selatan	81,85	4,96	0,54	-
23. Kalimantan Timur	94,97	4,08	0,46	-
24. Sulawesi Utara	91,43	1,61	0,02	-
25. Sulawesi Tengah	82,10	7,40	3,42	-
26. Sulawesi Selatan	97,62	3,58	0,04	0,25
27. Sulawesi Tenggara	84,87	2,41	0,09	-
28. Gorontalo	94,45	5,14	0,17	-
29. Sulawesi Barat	84,62	3,70	0,28	-
30. Maluku	-	-	-	-
31. Maluku Utara	89,38	8,24	0,20	-
32. Papua Barat	95,33	3,90	0,40	-
33. Papua	97,45	2,49	0,70	0,36
Indonesia	89,39	4,44	0,41	0,10

Tabel 1.k. Persentase Mutasi Itik Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penju- alan	Pemo- tongan	Kema- tian	Pengurang- an Lain	Pem- belian	Kela- hiran	Penam- bahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	14,90	6,76	6,97	2,10	13,50	19,60	0,60
2. Sumatera Utara	20,82	3,60	4,61	1,00	28,20	13,70	0,56
3. Sumatera Barat	17,70	0,80	14,20	4,90	24,10	29,07	0,60
4. Riau	14,00	18,60	25,60	6,10	8,30	72,20	3,00
5. Jambi	6,20	10,20	26,90	1,19	4,60	42,30	2,20
6. Sumatera Selatan	18,20	4,80	12,90	2,60	23,90	31,27	0,60
7. Bengkulu	22,20	11,30	2,79	2,90	4,60	34,30	0,70
8. Lampung	26,97	5,60	14,10	2,00	20,60	29,95	4,40
9. Bangka Belitung	4,10	3,40	16,60	0,50	16,60	34,80	1,00
10. Kepulauan Riau	29,50	2,90	8,10	-	33,10	23,33	-
11. DKI Jakarta	9,70	12,76	4,40	4,33	57,76	4,23	0,13
12. Jawa Barat	44,20	3,00	8,10	1,70	54,50	25,90	0,40
13. Jawa Tengah	44,50	2,90	6,70	1,90	38,80	30,40	3,60
14. DI Yogyakarta	41,23	7,77	27,70	1,20	57,91	40,10	1,80
15. Jawa Timur	49,80	5,47	6,00	1,00	65,50	10,50	2,80
16. Banten	25,00	6,10	12,98	3,80	38,30	17,90	2,10
17. Bali	89,38	3,70	1,36	0,81	81,53	17,93	1,20
18. Nusa Tenggara Barat	14,90	7,50	14,82	1,50	36,20	28,66	0,50
19. Nusa Tenggara Timur	31,60	4,59	3,96	-	23,10	25,41	-
20. Kalimantan Barat	20,40	7,50	2,65	4,80	10,40	51,20	1,60
21. Kalimantan Tengah	36,80	6,70	3,00	-	57,40	6,80	-
22. Kalimantan Selatan	45,74	6,95	3,55	1,60	46,63	23,80	0,60
23. Kalimantan Timur	38,40	8,86	2,22	-	21,96	39,35	0,07
24. Sulawesi Utara	54,60	5,44	8,36	0,05	3,61	75,82	0,11
25. Sulawesi Tengah	13,93	7,90	5,59	2,70	14,97	36,70	1,40
26. Sulawesi Selatan	46,30	10,90	7,18	7,30	51,40	36,70	0,41
27. Sulawesi Tenggara	29,93	7,04	2,52	0,50	24,30	24,61	2,93
28. Gorontalo	20,10	3,30	4,43	-	17,11	10,08	-
29. Sulawesi Barat	7,69	9,70	13,44	4,45	18,20	46,00	-
30. Maluku	19,33	7,40	3,72	0,51	25,56	15,59	-
31. Maluku Utara	10,80	5,41	0,90	0,60	0,10	38,06	0,30
32. Papua Barat	7,80	11,00	15,13	4,56	10,30	39,97	-
33. Papua	18,69	3,60	3,65	-	9,42	31,83	0,04
Indonesia	48,70	7,80	5,59	3,00	55,70	31,00	2,60

Tabel 1.1 Persentase Mutasi Itik Manila Terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penju- alan	Pemo- tongan	Kema- tian	Pengurang- an Lain	Pem- belian	Pene- tasan	Penam- bahan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. NAD	37,66	7,26	7,60	3,00	24,70	47,85	1,10
2. Sumatera Utara	39,30	3,26	9,24	0,42	1,60	70,71	4,00
3. Sumatera Barat	14,10	2,50	19,90	0,50	12,70	41,06	3,40
4. Riau	39,30	6,55	15,80	2,10	4,40	64,46	0,78
5. Jambi	10,30	10,93	12,66	2,73	3,72	66,18	0,40
6. Sumatera Selatan	29,90	9,92	22,48	6,65	12,80	85,80	0,64
7. Bengkulu	10,30	8,10	11,27	-	9,00	47,10	-
8. Lampung	18,60	10,52	17,85	-	3,00	80,37	-
9. Bangka Belitung	10,40	8,50	12,75	-	4,50	49,73	-
10. Kepulauan Riau	35,50	1,39	4,61	-	17,26	34,81	-
11. DKI Jakarta	48,03	4,23	11,21	1,06	11,21	69,97	-
12. Jawa Barat	79,90	8,32	18,66	2,20	24,70	96,20	0,80
13. Jawa Tengah	45,20	9,40	18,89	6,90	14,00	74,28	1,40
14. DI Yogyakarta	46,70	13,60	17,57	-	20,70	90,40	-
15. Jawa Timur	19,70	7,89	5,50	0,70	24,70	23,20	0,60
16. Banten	26,70	12,20	17,94	-	3,00	78,90	3,10
17. Bali	59,10	16,40	9,35	2,53	13,50	92,30	0,92
18. Nusa Tenggara Barat	59,71	13,64	20,64	4,90	6,80	106,40	1,70
19. Nusa Tenggara Timur	20,17	9,88	15,58	-	24,90	41,29	-
20. Kalimantan Barat	55,80	10,02	19,29	-	3,50	87,10	-
21. Kalimantan Tengah	11,80	6,70	4,80	1,10	20,94	15,00	0,41
22. Kalimantan Selatan	127,52	18,80	15,09	4,84	95,52	95,50	4,82
23. Kalimantan Timur	38,60	8,08	11,90	0,70	10,95	46,14	1,65
24. Sulawesi Utara	34,30	4,83	8,55	9,10	15,90	47,76	1,44
25. Sulawesi Tengah	11,72	3,80	7,40	1,20	13,60	17,40	0,80
26. Sulawesi Selatan	34,70	7,65	19,67	-	4,20	71,47	-
27. Sulawesi Tenggara	10,70	20,00	38,00	4,03	4,00	93,30	0,94
28. Gorontalo	34,93	6,49	13,97	-	13,60	45,20	-
29. Sulawesi Barat	25,30	6,60	17,40	4,60	46,90	21,10	3,38
30. Maluku	59,65	7,17	16,15	0,88	37,15	53,76	0,94
31. Maluku Utara	61,94	8,20	15,58	-	58,05	37,23	-
32. Papua Barat	18,70	9,08	21,00	8,10	89,53	91,45	-
33. Papua	72,02	22,32	13,67	3,89	44,63	82,23	0,44
Indonesia	78,94	7,18	17,77	4,85	22,70	96,80	1,24

Tabel 2. Estimasi Populasi Ternak Menurut Provinsi dan Jenis Ternak, Tahun 2011 dan 2012

Provinsi	Sapi Potong			Sapi Perah		
	P ₀	PSPK2011 2011	Estimasi 2012	P ₀	PSPK2011 2011	Estimasi 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	398 387	462 840	536 263	-	31	35
2. Sumatera Utara	509 483	541 698	685 543	3 323	894	977
3. Sumatera Barat	286 219	327 013	396 328	87	484	570
4. Riau	150 806	159 855	198 464	-	172	315
5. Jambi	179 158	119 888	147 971	-	81	95
6. Sumatera Selatan	425 618	246 295	299 737	64	154	196
7. Bengkulu	120 814	98 948	120 625	834	247	235
8. Lampung	712 478	742 776	891 605	372	201	250
9. Bangka Belitung	13 903	7 733	9 733	-	119	131
10. Kepulauan Riau	9 485	17 338	19 788	-	-	-
11. DKI Jakarta	102	1 691	1 499	2 242	2 728	3 342
12. Jawa Barat	321 332	422 989	468 744	107 308	139 970	170 237
13. Jawa Tengah	2 240 001	1 937 551	2 391 754	151 999	149 931	178 035
14. DI Yogyakarta	410 273	375 844	432 429	7 121	3 522	3 365
15. Jawa Timur	3 659 650	4 727 298	5 580 787	270 586	296 350	354 827
16. Banten	15 528	46 900	51 179	8	19	20
17. Bali	682 241	637 473	742 815	-	139	208
18. Nusa Tenggara Barat	626 661	685 810	808 032	-	18	19
19. Nusa Tenggara Timur	617 372	778 633	861 921	-	32	28
20. Kalimantan Barat	204 915	153 320	179 172	-	227	304
21. Kalimantan Tengah	69 027	54 647	64 004	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	191 471	138 691	161 007	33	110	127
23. Kalimantan Timur	84 473	90 748	105 449	-	32	35
24. Sulawesi Utara	116 530	105 225	123 569	-	22	25
25. Sulawesi Tengah	232 215	230 682	270 793	-	8	13
26. Sulawesi Selatan	805 568	983 985	1 136 434	2 346	1 690	1 987
27. Sulawesi Tenggara	289 727	213 736	249 286	-	-	-
28. Gorontalo	261 868	183 868	216 691	17	8	8
29. Sulawesi Barat	101 201	72 822	89 226	-	13	11
30. Maluku	78 923	73 976	83 749	-	-	-
31. Maluku Utara	56 524	60 840	69 461	-	-	-
32. Papua Barat	32 454	41 464	51 098	-	-	-
33. Papua	77 068	81 796	92 353	7	11	12
Indonesia	13 981 477	14 824 373	17 537 507	546 348	597 213	715 406

Tabel 2. Lanjutan

Provinsi	Kerbau			Kambing		
	P ₀	PSPK2011 2011	Estimasi 2012	P ₀	Estimasi Populasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	148 984	131 494	145 333	456 848	474 208	492 228
2. Sumatera Utara	97 210	114 289	132 291	686 952	795 078	920 223
3. Sumatera Barat	103 700	100 310	114 738	157 779	175 939	196 190
4. Riau	48 355	37 716	43 084	210 605	232 929	257 619
5. Jambi	81 915	46 538	50 772	341 032	368 962	399 180
6. Sumatera Selatan	88 534	29 143	32 509	716 190	774 202	836 912
7. Bengkulu	33 993	19 971	22 062	191 537	200 156	209 163
8. Lampung	48 171	33 124	39 398	1 800 381	2 122 650	2 502 604
9. Bangka Belitung	1 030	222	218	14 771	17 714	21 243
10. Kepulauan Riau	-	14	11	19 764	24 313	29 910
11. DKI Jakarta	19	192	186	43 751	44 250	44 754
12. Jawa Barat	176 652	130 157	150 335	1 962 256	2 277 394	2 643 144
13. Jawa Tengah	129 662	75 674	89 039	7 368 042	8 887 332	10 719 900
14. DI Yogyakarta	-	1 208	1 294	681 096	810 504	964 500
15. Jawa Timur	61 039	32 675	37 801	3 889 764	4 636 210	5 525 899
16. Banten	187 019	123 143	142 224	972 276	1 137 563	1 330 949
17. Bali	9 071	2 181	2 342	53 171	63 540	75 930
18. Nusa Tenggara Barat	152 126	105 391	117 367	345 826	437 954	554 625
19. Nusa Tenggara Timur	158 856	150 038	163 062	760 078	825 292	896 102
20. Kalimantan Barat	2 914	3 166	3 391	139 303	154 487	171 326
21. Kalimantan Tengah	18 445	6 491	7 787	66 298	71 078	76 202
22. Kalimantan Selatan	48 983	23 843	25 320	141 771	153 184	165 515
23. Kalimantan Timur	8 145	8 034	8 325	84 573	95 145	107 038
24. Sulawesi Utara	-	-	-	51 872	54 232	56 699
25. Sulawesi Tengah	5 055	3 271	3 518	216 184	246 883	281 940
26. Sulawesi Selatan	137 663	96 505	103 290	559 250	616 461	679 525
27. Sulawesi Tenggara	7 023	2 492	2 720	96 090	119 853	149 492
28. Gorontalo	3	13	13	67 489	67 894	68 302
29. Sulawesi Barat	18 013	8 112	9 170	116 393	129 208	143 434
30. Maluku	33 488	17 568	21 330	159 563	176 190	194 549
31. Maluku Utara	128	863	988	224 274	244 885	267 390
32. Papua Barat	-	1	1	6 374	6 812	7 281
33. Papua	2 703	1 239	1 423	33 429	37 257	41 522
Indonesia	1 808 900	1 305 078	1 471 342	22 634 982	26 479 758	31 031 291

Tabel 2. Lanjutan

Provinsi	Domba			Babi		
	P ₀	Estimasi Populasi		P ₀	Estimasi Populasi	
		2011	2012		2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	54 340	57 709	61 287	-	-	-
2. Sumatera Utara	66 561	69 563	72 701	1 099 103	1 262 869	1 451 037
3. Sumatera Barat	1 388	1 517	1 659	8 291	9 290	10 409
4. Riau	3 753	4 908	6 418	15 975	14 820	13 748
5. Jambi	16 602	17 067	17 545	8 296	10 625	13 609
6. Sumatera Selatan	38 157	41 091	44 251	53 668	63 822	75 897
7. Bengkulu	4 672	4 904	5 148	1 223	1 228	1 232
8. Lampung	34 668	33 742	32 841	52 610	61 148	71 073
9. Bangka Belitung	143	150	157	157 891	193 574	237 321
10. Kepulauan Riau	-	-	-	6 063	8 688	12 449
11. DKI Jakarta	121	151	189	-	-	-
12. Jawa Barat	5 207 602	6 462 113	8 018 836	2 129	3 735	6 552
13. Jawa Tengah	1 646 209	2 039 818	2 527 538	137 427	123 011	110 107
14. DI Yogyakarta	91 208	116 601	149 062	11 960	16 979	24 103
15. Jawa Timur	863 059	1 010 815	1 183 867	18 900	17 704	16 583
16. Banten	480 794	476 611	472 465	6 265	9 711	15 054
17. Bali	-	-	-	1 276 533	1 882 886	2 777 257
18. Nusa Tenggara Barat	9 352	10 825	12 530	13 551	15 845	18 528
19. Nusa Tenggara Timur	69 972	81 245	94 333	1 779 068	2 604 912	3 814 112
20. Kalimantan Barat	-	-	-	605 675	652 312	702 540
21. Kalimantan Tengah	2 843	2 655	2 479	352 271	352 624	352 976
22. Kalimantan Selatan	3 970	4 444	4 974	7 273	7 287	7 302
23. Kalimantan Timur	786	867	958	89 640	91 343	93 078
24. Sulawesi Utara	-	-	-	424 916	296 889	207 436
25. Sulawesi Tengah	4 345	3 237	2 412	168 767	216 561	277 891
26. Sulawesi Selatan	913	1 007	1 111	714 788	779 976	851 110
27. Sulawesi Tenggara	373	352	333	59 430	78 923	104 810
28. Gorontalo	-	-	-	4 662	5 166	5 725
29. Sulawesi Barat	-	-	-	288 736	318 245	350 770
30. Maluku	11 285	11 042	10 805	147 645	161 819	177 354
31. Maluku Utara	-	-	-	88 305	124 353	175 116
32. Papua Barat	-	-	-	15 208	18 833	23 323
33. Papua	42	51	63	753 227	841 709	940 585
Indonesia	8 613 159	10 452 487	12 723 961	8 369 496	10 246 888	12 939 089

Tabel 2. Lanjutan

Provinsi	Kuda			Ayam Buras		
	P ₀	Estimasi Populasi		P ₀	Estimasi Populasi	
		2011	2012		2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	700	776	861	4 050 869	4 099 479	4 148 673
2. Sumatera Utara	1 171	1 220	1 270	6 486 318	7 070 087	7 706 394
3. Sumatera Barat	2 061	2 225	2 403	3 384 913	3 618 472	3 868 147
4. Riau	-	-	-	3 229 479	3 510 444	3 815 852
5. Jambi	86	86	86	4 721 655	5 725 007	6 941 571
6. Sumatera Selatan	1 064	1 204	1 363	8 755 917	9 865 292	11 115 224
7. Bengkulu	25	25	25	1 011 770	1 172 338	1 358 388
8. Lampung	962	1 005	1 051	19 327 718	23 212 589	27 878 320
9. Bangka Belitung	-	-	-	4 736 807	5 142 751	5 583 485
10. Kepulauan Riau	-	-	-	406 676	484 758	577 831
11. DKI Jakarta	138	138	138	80 544	81 043	81 546
12. Jawa Barat	16 448	17 639	18 916	29 438 370	31 322 426	33 327 061
13. Jawa Tengah	20 210	22 067	24 095	31 933 776	35 906 338	40 373 086
14. DI Yogyakarta	959	981	1 004	2 746 999	3 209 868	3 750 731
15. Jawa Timur	11 237	11 254	11 271	30 521 062	35 282 348	40 786 394
16. Banten	72	64	57	17 188 887	20 561 347	24 595 483
17. Bali	588	831	1 174	4 420 886	4 522 566	4 626 585
18. Nusa Tenggara Barat	74 935	85 523	97 607	3 327 451	3 908 757	4 591 616
19. Nusa Tenggara Timur	92 085	95 667	99 389	9 835 072	10 772 354	11 798 960
20. Kalimantan Barat	-	-	-	7 160 956	9 097 279	11 557 183
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	7 916 579	8 236 409	8 569 160
22. Kalimantan Selatan	686	653	621	10 983 230	11 790 497	12 657 099
23. Kalimantan Timur	23	23	23	4 131 947	4 877 763	5 758 200
24. Sulawesi Utara	9 189	9 902	10 670	2 520 087	2 928 341	3 402 732
25. Sulawesi Tengah	2 915	3 215	3 546	1 900 255	2 073 938	2 263 496
26. Sulawesi Selatan	129 739	141 286	153 860	15 921 160	17 479 842	19 191 118
27. Sulawesi Tenggara	4 720	4 532	4 352	5 391 181	5 859 675	6 368 880
28. Gorontalo	7 895	8 823	9 861	1 227 275	1 556 553	1 974 176
29. Sulawesi Barat	8 709	8 588	8 469	1 099 368	1 387 622	1 751 457
30. Maluku	10 796	10 445	10 105	1 727 519	1 982 155	2 274 325
31. Maluku Utara	56	63	70	1 585 192	1 704 398	1 832 569
32. Papua Barat	-	-	-	154 569	179 563	208 598
33. Papua	2 293	2 560	2 857	1 183 460	1 186 774	1 190 097
Indonesia	399 761	430 795	465 144	248 507 947	279 809 072	315 924 438

Tabel 2. Lanjutan

Provinsi	Ayam Ras Petelur			Ayam Ras Pedaging		
	P ₀	Estimasi Populasi		P ₀	Estimasi Populasi	
		2011	2011		2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	156 224	173 955	193 699	3 311 181	3 856 864	4 492 475
2. Sumatera Utara	1 910 386	2 068 758	2 240 257	29 164 848	29 911 469	30 677 202
3. Sumatera Barat	3 852 926	4 260 566	4 711 334	10 917 345	11 670 642	12 475 916
4. Riau	55 815	55 207	54 605	24 367 223	26 801 509	29 478 979
5. Jambi	212 397	216 539	220 761	9 543 722	9 684 014	9 826 369
6. Sumatera Selatan	1 654 019	1 756 733	1 865 826	12 239 422	11 853 880	11 480 483
7. Bengkulu	56 667	64 379	73 141	2 626 864	2 647 879	2 669 062
8. Lampung	2 017 415	2 028 713	2 040 073	35 060 098	38 352 241	41 953 516
9. Bangka Belitung	186 102	202 869	221 148	5 069 554	5 419 353	5 793 288
10. Kepulauan Riau	69 369	71 817	74 352	1 256 874	1 364 336	1 480 987
11. DKI Jakarta	-	-	-	2 639	3 008	3 430
12. Jawa Barat	8 731 732	9 589 188	10 530 846	212 232 042	215 797 540	219 422 939
13. Jawa Tengah	13 413 353	13 075 336	12 745 838	124 571 516	128 919 062	133 418 337
14. DI Yogyakarta	1 039 221	1 188 246	1 358 640	18 078 672	18 387 817	18 702 248
15. Jawa Timur	22 821 854	24 243 656	25 754 036	72 289 296	72 708 574	73 130 283
16. Banten	1 371 667	1 186 355	1 026 078	36 818 319	36 987 683	37 157 826
17. Bali	1 503 570	1 518 154	1 532 880	10 459 665	10 579 951	10 701 620
18. Nusa Tenggara Barat	4 406	5 215	6 173	484 311	566 257	662 067
19. Nusa Tenggara Timur	81 971	82 004	82 036	1 954 442	2 277 120	2 653 073
20. Kalimantan Barat	185 724	202 216	220 173	5 872 533	6 365 825	6 900 555
21. Kalimantan Tengah	45 408	46 289	47 187	5 853 788	5 957 985	6 064 037
22. Kalimantan Selatan	843 726	929 533	1 024 066	24 466 839	27 561 894	31 048 474
23. Kalimantan Timur	1 149 157	1 397 030	1 698 369	32 936 312	33 097 700	33 259 879
24. Sulawesi Utara	693 963	800 695	923 842	314 995	336 855	360 233
25. Sulawesi Tengah	387 175	403 514	420 542	1 382 963	1 480 877	1 585 723
26. Sulawesi Selatan	5 226 757	5 187 556	5 148 649	32 870 928	32 545 506	32 223 306
27. Sulawesi Tenggara	362 206	463 080	592 048	704 013	792 930	893 077
28. Gorontalo	135 663	187 716	259 743	1 185 101	1 187 945	1 190 796
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-	-	-
31. Maluku Utara	11 189	10 016	8 967	4 283	4 376	4 472
32. Papua Barat	39 283	41 797	44 472	357 844	359 168	360 497
33. Papua	32 695	37 920	43 980	147 462	147 049	146 637
Indonesia	68 252 037	71 495 051	75 163 763	716 545 092	737 627 311	760 217 789

Tabel 2. Lanjutan

Provinsi	Itik			Itik Manila		
	P ₀	Estimasi Populasi		P ₀	Estimasi Populasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	1 780 851	1 833 742	1 888 204	446 825	527 834	623 530
2. Sumatera Utara	829 901	933 058	1 049 037	495 525	614 897	763 025
3. Sumatera Barat	1 041 612	1 210 041	1 405 704	108 245	130 068	156 289
4. Riau	172 276	205 353	244 781	117 005	123 896	131 194
5. Jambi	245 451	256 767	268 604	262 139	350 427	468 451
6. Sumatera Selatan	1 525 262	1 788 675	2 097 579	1 091 705	1 422 383	1 853 222
7. Bengkulu	58 598	58 838	59 079	69 457	87 815	111 024
8. Lampung	559 606	594 750	632 100	1 702 105	2 321 671	3 166 759
9. Bangka Belitung	168 340	215 138	274 947	22 404	27 463	33 664
10. Kepulauan Riau	9 043	10 484	12 154	4 772	5 276	5 834
11. DKI Jakarta	90 656	118 696	155 409	34 977	40 801	47 594
12. Jawa Barat	4 964 281	6 145 780	7 608 476	1 230 665	1 385 975	1 560 885
13. Jawa Tengah	6 120 582	7 148 840	8 349 845	5 303 507	5 796 203	6 334 670
14. DI Yogyakarta	223 002	271 861	331 426	246 234	328 057	437 070
15. Jawa Timur	3 997 956	4 658 818	5 428 921	1 288 486	1 478 022	1 695 439
16. Banten	1 435 653	1 585 248	1 750 430	1 050 609	1 346 461	1 725 624
17. Bali	485 968	512 259	539 972	32 003	38 192	45 579
18. Nusa Tenggara Barat	131 771	166 875	211 330	221 929	257 459	298 679
19. Nusa Tenggara Timur	203 482	220 493	238 926	43 871	52 891	63 765
20. Kalimantan Barat	379 624	485 349	620 519	155 459	163 994	172 997
21. Kalimantan Tengah	336 086	395 573	465 589	58 439	65 423	73 241
22. Kalimantan Selatan	3 392 136	3 839 559	4 345 997	188 141	243 812	315 956
23. Kalimantan Timur	112 068	125 404	140 327	98 212	97 682	97 154
24. Sulawesi Utara	64 719	71 896	79 870	32 622	35 336	38 276
25. Sulawesi Tengah	112 478	138 292	170 030	66 844	71 978	77 506
26. Sulawesi Selatan	2 167 558	2 532 358	2 958 554	519 434	590 337	670 918
27. Sulawesi Tenggara	285 230	319 030	356 835	173 703	218 015	273 630
28. Gorontalo	7 643	7 594	7 545	8 459	8 747	9 046
29. Sulawesi Barat	99 969	128 880	166 153	46 313	54 408	63 919
30. Maluku	206 610	227 663	250 862	20 652	22 304	24 088
31. Maluku Utara	34 814	42 038	50 761	24 650	27 007	29 589
32. Papua Barat	15 443	17 262	19 296	34 366	77 014	172 589
33. Papua	116 186	134 020	154 592	94 496	109 048	125 841
Indonesia	31 374 855	36 400 634	42 333 853	15 294 252	18 120 894	21 667 048

TABEL-TABEL:

- **STANDARD ERROR (SE)**
- **RELATIVE STANDARD ERROR (RSE)**
- **ESTIMASI PARAMETER (EST)**

Serta Selang Kepercayaan 95% dari Estimasi Rasio/Proporsi Parameter terhadap Stok Awal menurut Provinsi dan Jenis Ternak

Pengantar

Penyajian estimasi kesalahan sampling (*sampling error*) disusun bukan untuk melakukan koreksi terhadap hasil estimasi, melainkan untuk memberi gambaran seberapa jauh tingkat akurasi data hasil estimasi EPT2011, sehingga pengguna data dapat melakukan interpretasi data dengan lebih tepat. Penyajian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengguna data maupun untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan survei di masa mendatang.

Pendugaan parameter populasi yang dilakukan melalui sampel survei, perlu memperhatikan keakuratan nilai dugaan yang dihasilkan. Secara statistik, keakuratan dinyatakan sebagai selisih antara nilai parameter (*true value*) dengan nilai penduganya yang diperoleh dari data sampel. Semakin kecil nilai selisih antara penduga dengan nilai parameternya, maka data hasil survei tersebut semakin akurat, dan akan disimpulkan sebaliknya jika nilai selisihnya semakin besar.

Hasil dugaan (estimasi) yang dihitung mengandung dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *sampling error* dan *non sampling error*. Kedua kesalahan tersebut secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pendugaan hasil suatu survei. Sumber *non sampling error* diantaranya meliputi non respon, kesalahan interpretasi kuesioner oleh petugas, kesalahan persepsi dari responden, cakupan, dan pengolahan data. Kesalahan ini tidak dapat dihitung/diperkirakan sebelumnya, tetapi dapat diperkecil dengan meningkatkan mutu/kemampuan petugas, baik dalam pengumpulan data maupun pengolahannya.

Kesalahan sampling (*sampling error*) disebabkan oleh penggunaan teknik sampling, yaitu kesalahan yang ditimbulkan berkenaan dengan penarikan kesimpulan tentang populasi, berdasarkan pengamatan terhadap sebagian unit populasi yang terpilih sebagai sampel. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena karakteristik antar unit berbeda dan hanya sebagian dari unit populasi yang

terpilih sebagai sampel. Kesalahan sampling tersebut dapat diperkirakan dengan menghitung standard error dari teknik sampling yang digunakan, yang besarnya tergantung dari banyaknya sampel rumah tangga/usaha rumah tangga.

Kesalahan sampling adalah suatu ukuran keragaman dari semua kelompok sampel yang mungkin terpilih. Walaupun derajat variabilitasnya tidak diketahui secara pasti, tetapi nilainya dapat diperkirakan dari hasil survei. Kesalahan sampling diukur dalam bentuk estimasi standard error (SE) atau Relative Standard Error (RSE) dari suatu statistik tertentu (total, rata-rata, persentase), yang nilainya diperoleh dari akar pangkat dua dari ragam (*variance*). Selang kepercayaan (*convidence interval*) suatu karakteristik dapat dibangun dari nilai estimasi dan standard errornya dengan suatu besaran peluang tertentu. Apabila dalam proses pengambilan sampel diulang berkali-kali dan nilai estimasi serta standard errornya dihitung untuk setiap sampel, maka kira-kira dengan tingkat kepercayaan 95 persen, selang kepercayaan dengan 1,96 standard error di bawah dan di atas nilai estimasi akan mencakup nilai populasi sebenarnya. Selang kepercayaan tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$\text{Est} - 1,96 \text{ SE} \leq \text{nilai populasi} \leq \text{Est} + 1,96 \text{ SE}$$

-----ooo0ooo-----

Tabel A.1. Sampling Error Mutasi Kambing terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan			Pemotongan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	12,50	3,60	29,19	1,90	0,70	38,67
2. Sumatera Utara	19,30	2,70	14,13	5,26	0,22	4,18
3. Sumatera Barat	25,39	2,51	9,89	1,00	0,30	35,14
4. Riau	12,60	2,20	17,20	4,50	1,60	36,40
5. Jambi	14,90	3,70	24,91	3,40	1,00	30,37
6. Sumatera Selatan	14,10	2,30	16,42	6,00	1,60	26,16
7. Bengkulu	9,60	1,40	14,38	2,10	0,80	36,66
8. Lampung	22,00	2,10	9,38	9,50	4,70	49,83
9. Bangka Belitung	28,60	0,00	0,00	4,77	2,89	60,59
10. Kepulauan Riau	14,60	3,10	21,17	0,90	0,40	40,07
11. DKI Jakarta	35,37	6,00	16,96	6,59	3,95	59,94
12. Jawa Barat	31,11	0,43	1,38	3,53	0,07	1,98
13. Jawa Tengah	32,26	0,21	0,65	1,80	0,30	16,91
14. DI Yogyakarta	25,10	2,60	10,54	1,10	0,30	24,99
15. Jawa Timur	27,73	5,12	18,46	3,09	0,82	26,54
16. Banten	17,00	2,00	11,87	2,40	0,90	38,38
17. Bali	33,40	5,10	15,37	1,80	0,67	37,22
18. Nusa Tenggara Barat	30,00	6,30	21,05	4,20	1,00	23,48
19. Nusa Tenggara Timur	9,90	2,20	22,66	4,70	1,40	30,52
20. Kalimantan Barat	12,30	2,00	16,32	6,10	3,20	52,66
21. Kalimantan Tengah	55,40	24,60	44,39	2,99	0,75	25,08
22. Kalimantan Selatan	27,21	3,60	13,23	4,00	1,10	27,88
23. Kalimantan Timur	15,50	5,00	32,43	3,75	1,61	42,93
24. Sulawesi Utara	33,90	6,95	20,50	4,41	1,99	45,12
25. Sulawesi Tengah	14,60	4,60	31,23	2,00	1,00	50,67
26. Sulawesi Selatan	26,86	1,28	4,77	2,30	0,60	27,09
27. Sulawesi Tenggara	20,70	4,10	20,03	3,30	1,00	29,68
28. Gorontalo	20,23	2,89	14,29	1,70	0,80	47,03
29. Sulawesi Barat	56,80	21,40	37,72	1,90	2,20	111,66
30. Maluku	22,07	2,67	12,10	5,11	0,70	13,70
31. Maluku Utara	19,79	1,83	9,25	3,16	0,63	19,94
32. Papua Barat	34,00	27,80	81,90	4,80	2,50	51,67
33. Papua	21,49	4,02	18,71	2,93	0,46	15,70
Indonesia	26,40	2,10	8,12	3,90	0,90	23,81

Tabel A.1. Lanjutan

Provinsi	Kematian			Pengurangan Lain		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	6,60	2,40	35,97	1,60	0,70	43,79
2. Sumatera Utara	9,40	2,50	26,57	2,90	1,60	54,80
3. Sumatera Barat	12,60	3,20	24,95	2,80	2,00	72,43
4. Riau	12,10	2,60	21,33	1,90	0,80	44,30
5. Jambi	8,01	1,44	17,98	3,30	1,70	50,36
6. Sumatera Selatan	7,60	1,80	23,29	3,60	1,50	42,62
7. Bengkulu	9,70	3,30	33,74	3,40	1,70	49,40
8. Lampung	9,00	3,90	43,40	0,80	0,50	61,04
9. Bangka Belitung	7,75	2,12	27,35	-	-	-
10. Kepulauan Riau	5,18	1,38	26,64	0,40	0,20	50,54
11. DKI Jakarta	3,04	1,49	49,01	0,22	0,11	50,00
12. Jawa Barat	5,14	0,10	1,95	1,40	0,44	31,43
13. Jawa Tengah	4,42	0,04	0,90	1,50	0,50	31,64
14. DI Yogyakarta	5,10	1,50	29,60	1,20	0,70	54,04
15. Jawa Timur	4,29	0,77	17,95	0,70	0,20	29,33
16. Banten	5,10	1,20	23,54	3,20	0,90	27,03
17. Bali	3,76	1,65	43,88	1,99	0,60	30,15
18. Nusa Tenggara Barat	8,26	0,34	4,12	1,10	0,40	35,70
19. Nusa Tenggara Timur	18,51	0,64	3,46	4,82	0,19	3,94
20. Kalimantan Barat	10,00	3,50	34,76	0,60	0,25	41,67
21. Kalimantan Tengah	7,80	6,20	79,14	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	10,70	3,00	27,94	2,50	0,29	11,60
23. Kalimantan Timur	4,02	0,47	11,69	0,80	0,14	17,50
24. Sulawesi Utara	9,80	2,62	26,73	2,79	0,72	25,81
25. Sulawesi Tengah	7,90	1,48	18,73	3,00	2,20	74,45
26. Sulawesi Selatan	8,00	1,50	19,33	2,40	1,20	51,41
27. Sulawesi Tenggara	7,37	1,54	20,90	1,30	0,60	43,77
28. Gorontalo	5,58	1,78	31,90	0,70	0,50	69,01
29. Sulawesi Barat	5,31	2,07	38,98	6,40	2,30	36,73
30. Maluku	10,26	1,95	19,01	1,64	0,69	42,07
31. Maluku Utara	6,20	0,94	15,16	5,55	3,32	59,82
32. Papua Barat	6,42	1,51	23,52	1,50	3,10	212,98
33. Papua	1,68	2,11	125,60	0,40	1,00	274,04
Indonesia	8,20	1,10	13,65	2,40	0,60	24,79

Tabel A.1. Lanjutan

Provinsi	Pembelian			Kelahiran		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. NAD	2,80	1,70	60,01	22,70	3,70	16,51
2. Sumatera Utara	10,00	3,60	35,67	38,10	4,50	11,77
3. Sumatera Barat	3,30	1,20	36,73	42,00	6,00	14,25
4. Riau	4,00	1,90	49,14	34,80	5,20	15,07
5. Jambi	3,60	1,40	38,33	33,40	4,10	12,42
6. Sumatera Selatan	5,80	1,70	28,84	31,80	4,70	14,79
7. Bengkulu	2,40	0,90	36,89	25,30	4,00	15,97
8. Lampung	4,80	1,30	26,41	49,80	9,00	18,03
9. Bangka Belitung	14,30	0,00	0,00	46,74	8,17	17,48
10. Kepulauan Riau	4,50	3,40	75,79	38,40	9,50	24,74
11. DKI Jakarta	7,41	3,58	48,31	38,58	8,42	21,82
12. Jawa Barat	7,82	1,32	16,88	45,52	2,53	5,56
13. Jawa Tengah	12,00	1,80	15,03	45,30	2,50	5,60
14. DI Yogyakarta	5,70	1,30	23,04	39,20	5,30	13,40
15. Jawa Timur	7,60	0,90	12,23	44,40	3,60	8,00
16. Banten	2,30	0,90	38,03	38,10	5,80	15,33
17. Bali	4,50	3,20	70,01	51,95	5,67	10,91
18. Nusa Tenggara Barat	6,50	1,70	26,12	61,80	7,80	12,66
19. Nusa Tenggara Timur	4,32	0,16	3,70	39,49	1,15	2,91
20. Kalimantan Barat	9,60	3,40	35,67	30,30	10,50	34,77
21. Kalimantan Tengah	53,10	52,20	98,30	18,10	3,00	16,70
22. Kalimantan Selatan	13,27	4,39	33,08	38,19	3,20	8,38
23. Kalimantan Timur	2,39	0,29	12,13	33,94	3,44	10,14
24. Sulawesi Utara	1,37	0,41	29,93	54,08	11,21	20,73
25. Sulawesi Tengah	4,80	2,30	48,71	34,50	9,80	28,38
26. Sulawesi Selatan	4,40	1,80	40,00	45,10	5,80	12,85
27. Sulawesi Tenggara	1,30	0,70	52,32	51,60	10,10	19,58
28. Gorontalo	2,61	0,96	36,78	24,80	11,10	44,58
29. Sulawesi Barat	6,50	3,62	55,69	74,30	17,70	23,75
30. Maluku	-	-	-	49,50	8,60	17,28
31. Maluku Utara	0,90	0,38	42,22	42,59	3,35	7,87
32. Papua Barat	23,00	31,50	137,12	30,50	25,80	84,48
33. Papua	1,50	2,60	171,44	34,75	8,18	23,54
Indonesia	7,60	0,60	7,90	48,30	4,80	10,01

Tabel A.1. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain		
	Est	SE	RSE (%)
(1)	(20)	(21)	(22)
1. NAD	0,90	0,50	50,90
2. Sumatera Utara	4,50	2,00	44,72
3. Sumatera Barat	8,00	2,70	33,93
4. Riau	2,90	1,20	42,18
5. Jambi	0,80	0,40	54,03
6. Sumatera Selatan	1,80	0,80	45,74
7. Bengkulu	1,60	1,20	75,40
8. Lampung	4,60	2,70	59,52
9. Bangka Belitung	-	-	-
10. Kepulauan Riau	1,20	0,70	60,63
11. DKI Jakarta	0,37	0,23	62,16
12. Jawa Barat	3,90	0,90	23,99
13. Jawa Tengah	3,30	0,60	19,53
14. DI Yogyakarta	6,60	5,10	76,66
15. Jawa Timur	3,00	0,50	17,31
16. Banten	4,30	2,00	46,41
17. Bali	4,00	2,20	56,12
18. Nusa Tenggara Barat	1,90	1,00	49,95
19. Nusa Tenggara Timur	2,70	1,30	48,60
20. Kalimantan Barat	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	2,20	2,20	98,24
22. Kalimantan Selatan	1,00	1,40	138,56
23. Kalimantan Timur	0,24	0,14	58,33
24. Sulawesi Utara	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	2,40	1,40	56,39
26. Sulawesi Selatan	0,29	0,13	44,83
27. Sulawesi Tenggara	4,50	1,90	42,65
28. Gorontalo	1,40	0,70	45,75
29. Sulawesi Barat	0,62	0,50	80,65
30. Maluku	-	-	-
31. Maluku Utara	0,40	0,20	62,21
32. Papua Barat	0,10	0,10	100,00
33. Papua	1,70	3,40	202,17
Indonesia	1,03	0,09	8,74

Tabel A.2. Sampling Error Mutasi Domba terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan			Pemotongan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	15,40	8,50	54,86	-	-	-
2. Sumatera Utara	34,65	7,40	21,63	1,60	0,60	35,55
3. Sumatera Barat	26,44	6,74	25,43	-	-	-
4. Riau	44,40	0,00	0,00	1,30	0,78	57,78
5. Jambi	10,20	3,60	34,97	9,50	4,10	42,80
6. Sumatera Selatan	24,67	6,00	24,41	-	-	-
7. Bengkulu	12,00	3,60	29,89	5,90	4,70	80,21
8. Lampung	33,21	3,07	9,24	1,10	0,70	66,86
9. Bangka Belitung	57,49	0,00	0,00	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	25,13	12,55	49,94	-	-	-
12. Jawa Barat	34,06	1,75	5,06	2,28	0,04	1,00
13. Jawa Tengah	36,03	1,19	3,30	3,37	0,84	24,93
14. DI Yogyakarta	41,00	13,10	31,88	3,30	2,00	60,98
15. Jawa Timur	29,90	3,20	10,57	1,60	0,08	5,00
16. Banten	18,08	1,49	8,24	0,95	0,12	12,63
17. Bali	8,30	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00
18. Nusa Tenggara Barat	22,15	6,27	28,31	0,70	11,80	1 708,91
19. Nusa Tenggara Timur	18,10	1,50	8,29	-	-	-
20. Kalimantan Barat	49,16	57,48	116,92	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	18,03	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00
22. Kalimantan Selatan	34,71	48,63	140,10	-	-	-
23. Kalimantan Timur	26,03	0,00	0,00	-	-	-
24. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	73,96	2,12	3,22	3,90	0,12	4,20
26. Sulawesi Selatan	6,90	6,16	89,28	-	-	-
27. Sulawesi Tenggara	22,22	0,00	0,00	-	-	-
28. Gorontalo	-	-	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	24,73	2,93	11,85	-	-	-
31. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-
33. Papua	-	-	-	-	-	-
Indonesia	31,04	1,20	3,86	3,30	0,60	18,68

Tabel A.2. Lanjutan

Provinsi	Kematian			Pengurangan Lain		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	1,60	1,60	102,02	1,60	1,60	103,24
2. Sumatera Utara	6,14	1,13	18,65	-	-	-
3. Sumatera Barat	0,86	0,78	102,63	-	-	-
4. Riau	3,47	1,59	46,90	0,67	0,73	104,29
5. Jambi	12,30	4,90	40,01	-	-	-
6. Sumatera Selatan	3,28	1,60	49,38	2,99	1,49	49,50
7. Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8. Lampung	1,70	1,30	74,08	1,40	0,54	38,57
9. Bangka Belitung	12,56	0,00	0,00	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12. Jawa Barat	2,96	0,02	0,68	2,37	0,03	1,27
13. Jawa Tengah	2,94	0,25	8,50	2,07	0,13	6,28
14. DI Yogyakarta	3,66	1,45	39,62	0,90	0,80	91,92
15. Jawa Timur	3,00	0,60	20,81	0,62	0,04	6,45
16. Banten	2,43	0,25	10,29	1,80	1,10	61,12
17. Bali	3,09	1,68	54,72	-	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	3,09	1,68	54,72	-	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	1,71	0,92	53,80	1,58	0,66	41,51
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	3,40	0,00	0,00	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23. Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	3,29	0,12	4,20	-	-	-
26. Sulawesi Selatan	1,38	0,00	0,00	-	-	-
27. Sulawesi Tenggara	5,56	0,00	0,00	-	-	-
28. Gorontalo	-	-	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	2,42	0,63	26,03	-	-	-
31. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-
33. Papua	-	-	-	-	-	-
Indonesia	3,12	0,39	12,50	1,70	0,60	34,60

Tabel A.2. Lanjutan

Provinsi	Pembelian			Kelahiran		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. NAD	-	-	-	21,70	17,70	81,78
2. Sumatera Utara	12,40	15,00	121,71	34,50	20,80	60,26
3. Sumatera Barat	-	-	-	36,60	13,00	35,43
4. Riau	-	-	-	80,60	0,00	0,00
5. Jambi	6,10	3,30	53,79	28,70	10,30	35,81
6. Sumatera Selatan	16,18	5,88	36,07	22,45	3,14	14,01
7. Bengkulu	-	-	-	22,87	18,69	81,26
8. Lampung	9,78	3,81	38,96	23,76	6,88	28,96
9. Bangka Belitung	44,92	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	50,11	25,19	49,68
12. Jawa Barat	34,15	4,36	12,55	30,60	3,00	9,90
13. Jawa Tengah	42,45	2,21	5,21	24,19	1,51	6,24
14. DI Yogyakarta	42,52	7,91	18,60	33,08	6,52	19,71
15. Jawa Timur	27,34	5,37	19,63	23,83	4,43	18,59
16. Banten	2,04	0,62	30,39	18,73	2,43	12,97
17. Bali	0,50	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
18. Nusa Tenggara Barat	18,58	7,88	42,09	22,30	17,20	76,93
19. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	37,50	0,00	0,00
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	21,43	0,00	0,00
22. Kalimantan Selatan	26,14	34,84	133,28	20,50	0,00	0,00
23. Kalimantan Timur	19,09	0,00	0,00	17,36	0,00	0,00
24. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	31,03	1,10	4,09	24,63	0,68	2,72
26. Sulawesi Selatan	-	-	-	18,62	0,00	0,00
27. Sulawesi Tenggara	-	-	-	22,22	0,00	0,00
28. Gorontalo	-	-	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	25,00	0,00	0,00
31. Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-
33. Papua	-	-	-	22,73	0,00	0,00
Indonesia	30,98	2,53	8,16	24,77	1,55	6,26

Tabel A.2. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain		
	Est	SE	RSE (%)
(1)	(20)	(21)	(22)
1. NAD	3,10	3,10	100,00
2. Sumatera Utara	-	-	-
3. Sumatera Barat	-	-	-
4. Riau	-	-	-
5. Jambi	-	-	-
6. Sumatera Selatan	-	-	-
7. Bengkulu	-	-	-
8. Lampung	1,20	1,10	91,90
9. Bangka Belitung	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-
12. Jawa Barat	1,01	0,24	23,53
13. Jawa Tengah	1,68	0,21	12,50
14. DI Yogyakarta	1,10	0,85	77,27
15. Jawa Timur	1,07	0,37	34,58
16. Banten	1,62	0,19	12,00
17. Bali	-	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	0,81	0,75	91,46
19. Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20. Kalimantan Barat	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	-	-	-
23. Kalimantan Timur	-	-	-
24. Sulawesi Utara	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	-	-	-
26. Sulawesi Selatan	-	-	-
27. Sulawesi Tenggara	-	-	-
28. Gorontalo	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-
30. Maluku	-	-	-
31. Maluku Utara	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-
33. Papua	-	-	-
Indonesia	1,09	0,14	12,84

Tabel A.3. Sampling Error Mutasi Babi terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan			Pemotongan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	33,33	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00
2. Sumatera Utara	92,70	15,80	17,07	7,50	3,40	45,64
3. Sumatera Barat	11,70	7,17	61,28	17,53	3,71	21,16
4. Riau	21,80	5,50	25,19	17,10	4,60	26,89
5. Jambi	78,03	0,17	0,22	2,45	0,06	2,45
6. Sumatera Selatan	32,20	17,80	55,35	48,00	25,90	53,95
7. Bengkulu	216,18	19,65	9,09	65,12	4,21	6,46
8. Lampung	143,20	55,80	38,98	31,30	10,00	32,06
9. Bangka Belitung	88,90	21,90	24,59	2,30	5,60	248,64
10. Kepulauan Riau	95,33	35,18	36,90	5,54	2,47	44,58
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12. Jawa Barat	30,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
13. Jawa Tengah	201,00	61,20	30,43	0,20	0,40	240,73
14. DI Yogyakarta	136,86	0,57	0,42	16,15	1,71	10,59
15. Jawa Timur	106,91	11,72	10,96	8,15	2,74	33,62
16. Banten	90,44	2,06	2,28	8,85	2,52	28,47
17. Bali	150,80	15,80	10,46	6,60	1,20	18,33
18. Nusa Tenggara Barat	20,00	19,50	97,44	3,90	3,90	102,01
19. Nusa Tenggara Timur	13,70	2,20	15,94	7,30	1,10	15,02
20. Kalimantan Barat	9,70	2,10	21,80	11,60	1,70	14,98
21. Kalimantan Tengah	20,10	2,40	12,19	16,40	2,40	14,43
22. Kalimantan Selatan	52,40	13,40	25,56	36,80	11,80	32,15
23. Kalimantan Timur	21,10	6,70	31,71	11,00	4,90	44,21
24. Sulawesi Utara	67,57	6,31	9,34	34,85	0,90	2,58
25. Sulawesi Tengah	63,70	29,00	45,43	19,17	0,51	2,66
26. Sulawesi Selatan	68,04	10,82	15,90	16,63	1,25	7,52
27. Sulawesi Tenggara	52,30	13,30	25,33	13,60	7,30	53,16
28. Gorontalo	70,81	9,94	14,04	33,30	0,00	0,00
29. Sulawesi Barat	26,90	5,20	19,39	12,70	2,20	17,63
30. Maluku	12,80	5,10	39,74	4,60	1,20	25,24
31. Maluku Utara	25,79	2,76	10,70	17,05	2,53	14,83
32. Papua Barat	31,70	9,50	30,07	18,00	3,50	19,40
33. Papua	43,90	9,00	20,45	19,40	9,70	49,84
Indonesia	58,89	2,49	4,23	10,10	0,80	7,93

Tabel A.3. Lanjutan

Provinsi	Kematian			Pengurangan Lain		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	11,11	0,00	0,00	-	-	-
2. Sumatera Utara	14,20	3,50	24,57	10,70	4,50	42,14
3. Sumatera Barat	14,23	7,80	54,81	-	-	-
4. Riau	4,13	1,17	28,33	0,60	1,40	237,74
5. Jambi	26,48	0,04	0,15	-	-	-
6. Sumatera Selatan	22,56	9,15	40,56	0,80	0,50	55,29
7. Bengkulu	31,44	9,16	29,13	-	-	-
8. Lampung	24,80	12,00	48,50	0,80	0,70	80,14
9. Bangka Belitung	13,00	4,70	36,45	2,00	1,10	52,53
10. Kepulauan Riau	7,90	1,20	15,63	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12. Jawa Barat	28,57	0,00	0,00	-	-	-
13. Jawa Tengah	9,30	4,32	46,45	-	-	-
14. DI Yogyakarta	33,72	2,77	8,21	-	-	-
15. Jawa Timur	12,00	8,30	68,71	26,00	0,59	25,88
16. Banten	3,70	1,50	39,57	-	-	-
17. Bali	26,10	6,40	24,38	3,70	1,30	33,92
18. Nusa Tenggara Barat	5,77	1,22	21,14	0,90	1,10	127,26
19. Nusa Tenggara Timur	20,60	3,40	16,59	5,10	1,20	24,57
20. Kalimantan Barat	8,70	4,10	47,42	1,80	0,90	51,92
21. Kalimantan Tengah	7,90	1,60	20,55	3,40	1,50	43,54
22. Kalimantan Selatan	29,80	14,90	49,91	5,70	6,70	118,69
23. Kalimantan Timur	5,80	2,40	40,70	5,20	4,10	79,15
24. Sulawesi Utara	13,15	3,69	28,06	48,00	0,37	48,05
25. Sulawesi Tengah	25,80	11,50	44,58	11,00	0,27	10,55
26. Sulawesi Selatan	15,67	1,26	8,04	10,00	1,04	9,98
27. Sulawesi Tenggara	19,30	10,10	52,22	1,80	0,70	38,26
28. Gorontalo	47,47	45,45	95,74	-	-	-
29. Sulawesi Barat	23,08	3,10	13,43	2,50	1,20	48,19
30. Maluku	5,70	2,40	41,62	14,80	12,60	85,04
31. Maluku Utara	10,43	1,61	15,44	18,00	1,98	17,54
32. Papua Barat	29,26	6,35	21,70	18,00	14,10	78,26
33. Papua	21,49	1,96	9,12	10,00	0,92	10,09
Indonesia	16,90	1,80	10,47	4,30	0,60	14,76

Tabel A.3. Lanjutan

Provinsi	Pembelian			Kelahiran		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. NAD	22,22	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2. Sumatera Utara	24,00	4,80	19,86	106,60	21,30	20,01
3. Sumatera Barat	-	-	-	55,51	19,54	35,20
4. Riau	2,90	0,84	28,97	33,50	12,00	35,72
5. Jambi	11,21	0,05	0,45	123,83	0,19	0,15
6. Sumatera Selatan	7,48	16,66	222,73	112,40	20,10	17,86
7. Bengkulu	129,01	12,12	9,39	184,09	26,69	14,50
8. Lampung	30,53	13,34	43,69	184,60	74,60	40,40
9. Bangka Belitung	6,10	35,80	592,08	122,70	39,50	32,21
10. Kepulauan Riau	6,40	8,00	124,38	145,66	51,68	35,48
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12. Jawa Barat	-	-	-	150,00	0,00	0,00
13. Jawa Tengah	36,91	12,66	34,30	163,10	44,70	27,38
14. DI Yogyakarta	36,91	12,66	34,30	191,78	25,84	13,47
15. Jawa Timur	44,91	0,40	0,89	99,52	12,72	12,78
16. Banten	71,21	0,0	0,00	86,40	17,05	19,73
17. Bali	70,20	7,80	11,16	158,80	32,50	20,45
18. Nusa Tenggara Barat	7,60	6,50	85,70	37,70	26,80	71,17
19. Nusa Tenggara Timur	6,50	1,40	22,12	84,02	7,82	9,31
20. Kalimantan Barat	3,00	1,50	49,29	35,30	10,30	29,10
21. Kalimantan Tengah	11,50	6,30	55,03	32,90	9,90	29,94
22. Kalimantan Selatan	-	-	-	124,90	37,80	30,24
23. Kalimantan Timur	4,70	7,70	164,63	39,10	12,70	32,41
24. Sulawesi Utara	57,32	16,39	28,59	75,05	9,41	12,54
25. Sulawesi Tengah	23,50	8,50	36,09	122,50	64,10	52,35
26. Sulawesi Selatan	51,36	9,21	17,93	64,90	5,05	7,78
27. Sulawesi Tenggara	45,90	11,50	24,98	70,30	31,00	44,08
28. Gorontalo	5,56	1,11	19,96	156,83	170,79	108,90
29. Sulawesi Barat	24,70	5,70	23,07	46,20	10,90	23,63
30. Maluku	0,30	0,30	80,53	47,20	22,30	47,25
31. Maluku Utara	1,30	0,50	35,63	108,60	16,04	14,77
32. Papua Barat	24,20	9,30	38,32	96,58	16,21	16,78
33. Papua	9,67	1,13	11,69	95,77	8,85	9,24
Indonesia	18,80	2,10	10,97	95,12	4,70	4,94

Tabel A.3. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain		
	Est	SE	RSE (%)
(1)	(20)	(21)	(22)
1. NAD	-	-	-
2. Sumatera Utara	9,40	4,00	42,54
3. Sumatera Barat	-	-	-
4. Riau	-	-	-
5. Jambi	-	-	-
6. Sumatera Selatan	2,60	1,40	54,98
7. Bengkulu	-	-	-
8. Lampung	1,20	1,00	83,60
9. Bangka Belitung	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-
12. Jawa Barat	-	-	-
13. Jawa Tengah	-	-	-
14. DI Yogyakarta	-	-	-
15. Jawa Timur	2,30	1,40	62,40
16. Banten	0,40	0,00	0,00
17. Bali	5,70	1,50	25,39
18. Nusa Tenggara Barat	2,20	1,50	70,51
19. Nusa Tenggara Timur	2,60	0,60	23,05
20. Kalimantan Barat	1,20	0,60	46,57
21. Kalimantan Tengah	3,50	1,10	31,73
22. Kalimantan Selatan	-	-	-
23. Kalimantan Timur	1,20	0,90	71,49
24. Sulawesi Utara	1,07	0,60	56,07
25. Sulawesi Tengah	1,99	0,62	31,16
26. Sulawesi Selatan	3,20	2,20	69,65
27. Sulawesi Tenggara	3,60	1,80	48,90
28. Gorontalo	-	-	-
29. Sulawesi Barat	4,50	3,10	68,20
30. Maluku	-	-	-
31. Maluku Utara	2,20	1,30	59,89
32. Papua Barat	0,02	0,02	100,00
33. Papua	1,10	0,40	39,31
Indonesia	3,50	0,50	13,48

Tabel A.4. Sampling Error Mutasi Kuda terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan			Pemotongan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	0,86	1,08	125,58	-	-	-
2. Sumatera Utara	14,31	3,39	22,44	-	-	-
3. Sumatera Barat	8,50	11,70	138,42	-	-	-
4. Riau	-	-	-	-	-	-
5. Jambi	16,54	7,92	47,88	-	-	-
6. Sumatera Selatan	15,49	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00
7. Bengkulu	50,00	0,00	0,00	-	-	-
8. Lampung	20,97	1,04	4,01	0,66	0,00	0,00
9. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12. Jawa Barat	13,42	4,44	33,08	1,67	0,58	34,73
13. Jawa Tengah	13,20	6,70	51,12	3,09	1,34	40,24
14. DI Yogyakarta	31,80	0,00	0,00	-	-	-
15. Jawa Timur	3,40	2,20	64,30	-	-	-
16. Banten	32,19	12,34	38,16	-	-	-
17. Bali	21,32	0,00	0,00	-	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	4,93	0,97	19,68	2,20	1,50	68,90
19. Nusa Tenggara Timur	22,22	1,80	8,10	1,70	1,50	85,29
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	28,63	3,57	70,83	3,57	0,00	0,00
23. Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24. Sulawesi Utara	11,97	4,74	39,83	4,07	3,61	87,20
25. Sulawesi Tengah	16,61	6,31	38,17	3,45	2,23	63,17
26. Sulawesi Selatan	5,10	1,40	28,07	1,30	0,90	63,56
27. Sulawesi Tenggara	13,69	7,95	58,07	2,08	2,07	99,52
28. Gorontalo	3,21	2,75	99,28	-	-	-
29. Sulawesi Barat	5,66	1,29	22,79	-	-	-
30. Maluku	5,50	3,90	70,65	-	-	-
31. Maluku Utara	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-
33. Papua	0,64	0,00	0,00	-	-	-
Indonesia	5,70	1,00	17,66	2,40	0,90	39,10

Tabel A.4. Lanjutan

Provinsi	Kematian			Pengurangan Lain		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	-	-	-	-	-	-
2. Sumatera Utara	4,14	0,00	0,00	-	-	-
3. Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4. Riau	-	-	-	-	-	-
5. Jambi	3,38	3,17	93,79	-	-	-
6. Sumatera Selatan	5,81	0,00	0,00	-	-	-
7. Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8. Lampung	0,39	0,00	0,00	11,94	6,07	50,84
9. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12. Jawa Barat	6,65	2,30	34,59	-	-	-
13. Jawa Tengah	-	-	-	2,37	1,30	63,73
14. DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15. Jawa Timur	8,40	0,64	7,62	2,06	0,34	16,50
16. Banten	-	-	-	-	-	-
17. Bali	-	-	-	-	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	1,78	0,19	10,67	0,39	0,27	69,23
19. Nusa Tenggara Timur	2,29	0,47	20,52	2,41	0,29	12,03
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	2,23	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00
23. Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24. Sulawesi Utara	1,00	0,99	97,06	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	2,38	1,73	71,19	-	-	-
26. Sulawesi Selatan	0,70	0,50	61,78	-	-	-
27. Sulawesi Tenggara	2,08	2,07	99,52	-	-	-
28. Gorontalo	-	-	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	2,13	1,09	51,17	-	-	-
30. Maluku	1,21	0,53	43,80	-	-	-
31. Maluku Utara	12,50	0,00	0,00	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-
33. Papua	-	-	-	-	-	-
Indonesia	2,40	0,70	27,87	2,60	1,40	52,44

Tabel A.4. Lanjutan

Provinsi	Pembelian			Kelahiran		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. NAD	-	-	-	11,76	0,22	1,87
2. Sumatera Utara	7,82	4,40	56,27	14,76	4,11	26,92
3. Sumatera Barat	-	-	-	16,49	6,15	37,30
4. Riau	-	-	-	-	-	-
5. Jambi	-	-	-	19,92	4,75	23,85
6. Sumatera Selatan	25,31	17,60	69,54	15,96	4,32	20,15
7. Bengkulu	50,00	0,00	0,00	-	-	-
8. Lampung	27,58	6,95	20,23	10,90	1,56	14,04
9. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12. Jawa Barat	10,96	3,60	32,85	15,56	7,69	51,65
13. Jawa Tengah	4,60	3,90	84,59	22,67	2,85	12,57
14. DI Yogyakarta	17,81	0,00	0,00	16,28	0,00	0,00
15. Jawa Timur	3,30	2,70	84,32	9,14	3,76	43,62
16. Banten	-	-	-	10,56	4,68	42,51
17. Bali	53,81	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00
18. Nusa Tenggara Barat	4,40	2,00	45,21	18,68	2,28	12,21
19. Nusa Tenggara Timur	8,07	1,73	21,44	22,14	2,24	10,12
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	12,93	0,00	0,00	17,03	3,57	70,83
23. Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24. Sulawesi Utara	6,85	4,18	67,75	16,95	4,12	24,31
25. Sulawesi Tengah	17,65	6,99	41,26	15,09	3,73	24,75
26. Sulawesi Selatan	1,80	0,90	48,66	11,10	2,90	26,31
27. Sulawesi Tenggara	-	-	-	13,87	7,77	56,02
28. Gorontalo	5,05	2,25	44,55	9,92	4,42	44,56
29. Sulawesi Barat	3,20	8,80	272,52	5,64	1,87	33,16
30. Maluku	1,85	0,77	41,62	1,00	13,70	1 407,14
31. Maluku Utara	-	-	-	50,00	0,00	0,00
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-
33. Papua	0,96	0,00	0,00	11,29	6,56	87,47
Indonesia	2,60	0,70	28,76	16,50	3,10	18,87

Tabel A.4. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain		
	Est	SE	RSE (%)
(1)	(20)	(21)	(22)
1. NAD	-	-	-
2. Sumatera Utara	-	-	-
3. Sumatera Barat	-	-	-
4. Riau	-	-	-
5. Jambi	-	-	-
6. Sumatera Selatan	-	-	-
7. Bengkulu	-	-	-
8. Lampung	-	-	-
9. Bangka Belitung	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-
12. Jawa Barat	2,46	1,03	41,87
13. Jawa Tengah	0,58	0,66	101,54
14. DI Yogyakarta	-	-	-
15. Jawa Timur	1,57	0,15	9,55
16. Banten	10,59	8,21	81,37
17. Bali	-	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	0,35	0,07	20,00
19. Nusa Tenggara Timur	2,30	2,80	119,99
20. Kalimantan Barat	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	0,45	0,00	0,00
23. Kalimantan Timur	-	-	-
24. Sulawesi Utara	1,00	0,99	97,06
25. Sulawesi Tengah	-	-	-
26. Sulawesi Selatan	3,10	1,80	57,43
27. Sulawesi Tenggara	-	-	-
28. Gorontalo	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-
30. Maluku	0,61	0,37	60,66
31. Maluku Utara	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-
33. Papua	-	-	-
Indonesia	1,58	0,35	22,01

Tabel A.5. Sampling Error Mutasi Ayam Buras terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan			Pemotongan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	83,90	9,24	11,01	14,20	2,50	17,74
2. Sumatera Utara	31,70	7,70	24,26	15,40	2,10	13,85
3. Sumatera Barat	36,90	4,70	12,86	14,90	2,70	18,31
4. Riau	10,90	2,40	21,75	22,40	4,20	18,98
5. Jambi	17,70	4,70	26,87	26,20	2,90	11,16
6. Sumatera Selatan	28,57	1,21	4,24	24,58	0,64	2,60
7. Bengkulu	20,10	4,40	21,69	13,30	2,90	21,41
8. Lampung	27,20	5,70	21,13	25,29	1,70	6,87
9. Bangka Belitung	43,64	6,70	15,35	29,70	6,10	20,56
10. Kepulauan Riau	27,40	3,70	13,32	22,70	5,50	24,06
11. DKI Jakarta	33,43	8,37	25,04	22,53	4,61	20,46
12. Jawa Barat	36,80	7,40	20,22	22,40	1,70	7,78
13. Jawa Tengah	89,07	12,61	14,13	25,50	1,40	5,58
14. DI Yogyakarta	148,47	11,44	7,72	14,20	2,30	16,41
15. Jawa Timur	28,10	3,50	12,33	17,30	2,90	16,78
16. Banten	36,80	7,40	20,22	38,91	1,19	3,06
17. Bali	127,69	30,93	18,88	48,31	1,41	2,92
18. Nusa Tenggara Barat	98,49	11,64	11,82	31,40	5,50	17,38
19. Nusa Tenggara Timur	17,40	3,20	18,68	22,30	3,20	14,57
20. Kalimantan Barat	23,61	0,76	3,22	25,98	0,66	2,54
21. Kalimantan Tengah	37,76	1,84	4,87	22,62	0,95	4,20
22. Kalimantan Selatan	54,60	12,30	22,63	23,60	4,10	17,52
23. Kalimantan Timur	83,69	5,76	6,88	14,00	2,50	18,16
24. Sulawesi Utara	40,80	17,20	42,23	38,90	15,60	40,21
25. Sulawesi Tengah	18,20	2,70	14,73	31,49	1,53	4,86
26. Sulawesi Selatan	95,85	16,70	17,42	22,90	2,80	12,14
27. Sulawesi Tenggara	59,99	9,26	18,05	22,10	1,90	8,71
28. Gorontalo	41,34	2,85	6,89	39,76	2,15	5,41
29. Sulawesi Barat	72,42	23,02	31,79	31,51	1,81	5,74
30. Maluku	46,85	7,00	14,94	22,10	6,90	31,02
31. Maluku Utara	23,90	6,80	28,30	12,00	3,00	24,60
32. Papua Barat	22,20	5,40	24,46	17,40	3,00	17,54
33. Papua	11,50	3,00	26,22	10,40	3,10	30,20
Indonesia	104,51	3,31	3,17	20,00	3,80	18,93

Tabel A.5. Lanjutan

Provinsi	Kematian			Pengurangan Lain		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	20,88	0,46	2,20	1,50	0,50	30,98
2. Sumatera Utara	38,10	5,30	13,92	5,30	1,40	26,76
3. Sumatera Barat	44,40	8,30	18,73	3,30	1,00	30,51
4. Riau	35,20	5,20	14,87	4,50	2,30	51,23
5. Jambi	43,45	3,62	8,33	5,20	1,80	34,68
6. Sumatera Selatan	30,00	4,90	16,41	12,13	2,32	19,11
7. Bengkulu	23,53	3,78	15,84	1,80	2,00	112,56
8. Lampung	22,73	2,17	9,76	7,65	0,47	6,14
9. Bangka Belitung	19,99	2,90	14,51	8,62	1,24	14,39
10. Kepulauan Riau	35,20	5,20	14,87	4,90	2,30	47,36
11. DKI Jakarta	20,29	3,37	16,61	5,36	1,71	31,90
12. Jawa Barat	34,80	4,60	13,34	6,10	1,50	23,98
13. Jawa Tengah	26,59	1,71	6,44	7,50	1,20	15,71
14. DI Yogyakarta	24,98	3,82	15,28	4,20	1,50	36,57
15. Jawa Timur	28,60	4,70	16,61	2,70	0,60	20,31
16. Banten	44,17	3,29	7,44	17,50	4,90	27,82
17. Bali	10,43	4,41	32,94	10,52	0,33	3,14
18. Nusa Tenggara Barat	23,17	3,49	15,06	8,10	2,00	25,04
19. Nusa Tenggara Timur	44,17	3,29	7,44	10,90	3,50	32,25
20. Kalimantan Barat	22,67	2,53	11,12	7,30	2,30	31,62
21. Kalimantan Tengah	21,24	1,42	6,69	0,00	1,10	0,00
22. Kalimantan Selatan	41,70	7,00	16,76	3,67	0,12	3,27
23. Kalimantan Timur	24,48	1,97	8,04	1,90	0,80	42,06
24. Sulawesi Utara	18,99	6,10	32,12	9,40	5,70	60,31
25. Sulawesi Tengah	27,47	6,61	24,06	5,20	1,40	26,49
26. Sulawesi Selatan	23,63	4,15	17,56	6,60	1,00	15,11
27. Sulawesi Tenggara	31,62	7,91	29,91	4,00	0,70	18,49
28. Gorontalo	27,47	6,61	24,06	6,20	2,10	33,63
29. Sulawesi Barat	20,26	5,88	29,02	10,30	2,90	28,35
30. Maluku	24,30	4,40	18,14	6,40	2,00	30,99
31. Maluku Utara	18,20	6,20	33,96	6,90	2,40	34,87
32. Papua Barat	17,93	4,07	22,65	14,50	3,20	21,79
33. Papua	6,86	2,15	26,41	3,56	0,33	9,27
Indonesia	24,59	0,93	3,78	5,00	0,90	17,37

Tabel A.5. Lanjutan

Provinsi	Pembelian			Penetasan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. NAD	2,40	0,60	25,28	118,08	5,19	4,39
2. Sumatera Utara	5,30	1,60	30,68	92,50	14,50	15,73
3. Sumatera Barat	13,40	9,00	67,00	91,70	10,90	11,88
4. Riau	2,30	0,70	31,17	78,30	9,90	12,68
5. Jambi	1,70	0,40	26,66	111,20	18,60	16,70
6. Sumatera Selatan	11,80	0,86	7,29	94,54	2,72	2,88
7. Bengkulu	2,00	2,10	108,69	72,20	18,60	25,76
8. Lampung	4,27	0,49	11,72	97,70	26,30	26,96
9. Bangka Belitung	6,80	0,89	13,09	100,52	12,58	12,51
10. Kepulauan Riau	3,80	1,40	36,62	105,40	24,80	23,49
11. DKI Jakarta	1,36	0,35	25,74	80,79	44,54	39,96
12. Jawa Barat	5,10	0,80	14,95	99,40	14,20	14,28
13. Jawa Tengah	7,00	0,60	9,21	152,90	9,00	5,90
14. DI Yogyakarta	13,20	5,10	38,56	193,40	26,10	13,52
15. Jawa Timur	6,40	1,60	24,86	83,10	13,20	15,90
16. Banten	3,30	0,90	26,78	150,90	25,80	17,10
17. Bali	21,05	1,80	8,55	174,50	4,90	2,81
18. Nusa Tenggara Barat	8,00	2,20	27,65	168,80	24,80	14,72
19. Nusa Tenggara Timur	2,40	0,50	20,38	99,50	19,20	19,33
20. Kalimantan Barat	2,70	1,00	38,26	102,90	15,40	14,96
21. Kalimantan Tengah	7,16	2,17	30,31	78,50	3,69	4,70
22. Kalimantan Selatan	7,40	2,30	31,54	122,62	2,64	2,15
23. Kalimantan Timur	2,07	0,45	21,74	139,75	8,12	5,81
24. Sulawesi Utara	1,40	2,00	138,99	120,69	34,35	28,46
25. Sulawesi Tengah	2,80	1,10	37,82	87,80	22,40	25,46
26. Sulawesi Selatan	7,10	3,10	43,17	149,28	29,94	20,06
27. Sulawesi Tenggara	2,40	0,50	20,71	123,20	17,70	14,33
28. Gorontalo	1,30	0,80	60,53	139,70	46,30	33,16
29. Sulawesi Barat	3,30	1,50	44,40	156,41	10,02	6,41
30. Maluku	3,49	0,38	10,89	110,50	10,33	9,35
31. Maluku Utara	3,82	0,29	7,59	64,00	12,80	19,98
32. Papua Barat	6,00	1,60	25,94	80,00	31,70	39,62
33. Papua	3,26	1,49	37,72	28,80	27,20	94,63
Indonesia	22,00	2,29	10,40	152,40	4,73	3,10

Tabel A.5. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain		
	Est	SE	RSE (%)
(1)	(20)	(21)	(22)
1. NAD	1,20	0,70	58,34
2. Sumatera Utara	1,70	0,50	30,55
3. Sumatera Barat	1,30	0,50	37,08
4. Riau	1,10	0,50	41,34
5. Jambi	0,90	0,40	39,99
6. Sumatera Selatan	1,61	0,05	3,11
7. Bengkulu	0,40	0,50	126,34
8. Lampung	1,00	0,08	8,00
9. Bangka Belitung	3,20	3,00	94,52
10. Kepulauan Riau	0,20	0,10	53,17
11. DKI Jakarta	0,08	0,16	106,67
12. Jawa Barat	2,00	0,30	16,05
13. Jawa Tengah	1,20	0,30	24,09
14. DI Yogyakarta	2,10	0,60	30,58
15. Jawa Timur	2,80	0,03	1,07
16. Banten	2,80	1,10	39,34
17. Bali	3,70	1,10	30,87
18. Nusa Tenggara Barat	1,83	0,53	28,96
19. Nusa Tenggara Timur	2,40	1,00	43,78
20. Kalimantan Barat	1,00	0,40	38,04
21. Kalimantan Tengah	0,00	0,40	0,00
22. Kalimantan Selatan	0,90	0,20	28,62
23. Kalimantan Timur	0,30	0,20	73,61
24. Sulawesi Utara	2,20	2,90	132,66
25. Sulawesi Tengah	0,90	0,30	36,44
26. Sulawesi Selatan	2,39	0,07	2,93
27. Sulawesi Tenggara	0,80	0,30	31,83
28. Gorontalo	0,60	0,30	51,50
29. Sulawesi Barat	1,00	0,60	55,96
30. Maluku	0,40	0,70	205,28
31. Maluku Utara	0,70	0,40	47,82
32. Papua Barat	2,20	1,20	54,05
33. Papua	0,54	0,06	11,11
Indonesia	0,76	0,08	10,53

Tabel A.6. Sampling Error Mutasi Ayam Ras Petelur terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan			Pemotongan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	11,73	0,58	4,52	11,81	0,18	1,39
2. Sumatera Utara	7,57	4,18	55,22	0,49	3,60	735,00
3. Sumatera Barat	19,71	3,28	16,64	0,68	0,36	53,00
4. Riau	0,92	0,00	0,00	-	-	-
5. Jambi	-	-	-	-	-	-
6. Sumatera Selatan	18,69	6,98	37,13	-	-	-
7. Bengkulu	30,29	8,46	40,23	7,22	0,01	0,20
8. Lampung	9,41	16,55	175,88	1,10	1,94	176,36
9. Bangka Belitung	48,65	0,04	0,08	-	-	-
10. Kepulauan Riau	3,78	0,43	11,38	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	5,21	1,99	38,20
12. Jawa Barat	13,41	20,29	151,30	5,99	8,19	136,73
13. Jawa Tengah	33,29	8,79	26,40	0,26	0,13	50,00
14. DI Yogyakarta	27,15	5,15	19,21	-	-	-
15. Jawa Timur	19,93	2,29	11,49	0,23	0,03	13,04
16. Banten	15,87	7,97	50,25	-	-	-
17. Bali	21,47	3,12	14,53	0,82	0,51	62,20
18. Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	20,15	2,48	12,31	-	-	-
20. Kalimantan Barat	3,94	0,00	0,00	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	2,59	0,00	0,00	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	13,50	5,70	38,75	-	-	-
23. Kalimantan Timur	21,42	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00
24. Sulawesi Utara	16,46	3,50	78,65	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	17,23	7,97	45,31	-	-	-
26. Sulawesi Selatan	45,24	21,12	46,68	2,66	6,97	262,03
27. Sulawesi Tenggara	14,76	9,91	67,14	2,20	4,73	215,00
28. Gorontalo	14,49	3,22	22,18	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-	-	-
31. Maluku Utara	-	-	-	9,65	0,00	0,00
32. Papua Barat	-	-	-	-	-	-
33. Papua	24,05	0,74	3,08	-	-	-
Indonesia	23,52	2,69	11,43	3,40	0,69	20,29

Tabel A.6. Lanjutan

Provinsi	Kematian			Pengurangan Lain		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	4,09	0,27	16,98	0,08	0,12	133,33
2. Sumatera Utara	2,08	0,17	8,17	0,32	0,35	109,38
3. Sumatera Barat	3,52	0,99	28,13	0,02	0,01	50,00
4. Riau	0,17	0,00	0,00	-	-	-
5. Jambi	0,36	0,37	102,78	-	-	-
6. Sumatera Selatan	2,74	1,19	43,91	0,14	0,18	120,00
7. Bengkulu	3,86	0,29	10,82	-	-	-
8. Lampung	2,79	1,17	41,94	1,55	2,21	142,58
9. Bangka Belitung	3,05	0,00	0,00	-	-	-
10. Kepulauan Riau	2,04	0,19	9,31	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	3,95	1,38	34,94
12. Jawa Barat	1,86	0,45	24,19	0,78	1,13	144,87
13. Jawa Tengah	3,67	0,50	13,62	0,44	0,22	50,00
14. DI Yogyakarta	-	-	-	0,03	0,02	100,00
15. Jawa Timur	2,84	0,37	13,03	0,14	0,02	14,29
16. Banten	5,71	3,77	66,61	2,66	0,00	0,00
17. Bali	3,10	0,64	20,65	0,09	0,05	55,56
18. Nusa Tenggara Barat	2,26	0,52	23,01	0,46	0,60	130,43
19. Nusa Tenggara Timur	2,25	13,67	607,56	1,81	1,63	90,06
20. Kalimantan Barat	3,51	0,00	0,00	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	2,87	0,00	0,00	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	1,77	0,70	52,24	0,19	0,20	95,24
23. Kalimantan Timur	1,09	0,00	0,00	-	-	-
24. Sulawesi Utara	2,63	2,28	86,69	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	3,45	1,64	47,26	0,17	0,17	94,44
26. Sulawesi Selatan	1,67	1,03	61,68	0,13	0,11	84,62
27. Sulawesi Tenggara	2,74	0,19	6,96	-	-	-
28. Gorontalo	2,24	0,63	28,13	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-	-	-
31. Maluku Utara	5,58	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00
32. Papua Barat	0,09	0,05	55,56	-	-	-
33. Papua	2,16	0,57	26,39	-	-	-
Indonesia	2,95	0,25	8,47	0,32	0,19	59,36

Tabel A.6. Lanjutan

Provinsi	Pembelian			Penetasan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. NAD	38,95	2,42	4,91	-	-	-
2. Sumatera Utara	18,67	2,43	13,42	-	-	-
3. Sumatera Barat	34,51	6,42	18,60	-	-	-
4. Riau	-	-	-	-	-	-
5. Jambi	2,31	2,59	112,12	-	-	-
6. Sumatera Selatan	25,90	13,68	52,53	-	-	-
7. Bengkulu	54,98	2,64	34,69	-	-	-
8. Lampung	15,41	5,94	38,55	-	-	-
9. Bangka Belitung	55,15	0,04	0,07	-	-	-
10. Kepulauan Riau	9,35	0,94	10,05	-	-	-
11. DKI Jakarta	5,30	2,83	53,40	-	-	-
12. Jawa Barat	31,61	13,28	42,00	-	-	-
13. Jawa Tengah	35,04	14,20	40,53	-	-	-
14. DI Yogyakarta	41,52	7,32	20,33	-	-	-
15. Jawa Timur	28,10	5,20	18,51	-	-	-
16. Banten	10,73	6,08	54,98	-	-	-
17. Bali	26,44	9,11	34,46	-	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	21,09	15,99	75,82	-	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	24,25	3,16	13,03	-	-	-
20. Kalimantan Barat	16,33	0,00	0,00	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	7,40	0,00	0,00	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	25,58	8,90	31,35	-	-	-
23. Kalimantan Timur	46,82	56,00	119,61	-	-	-
24. Sulawesi Utara	34,42	20,03	58,07	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	23,12	1,92	8,17	-	-	-
26. Sulawesi Selatan	48,94	20,53	41,95	-	-	-
27. Sulawesi Tenggara	47,55	23,09	48,98	-	-	-
28. Gorontalo	55,10	40,50	73,50	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-	-	-
31. Maluku Utara	11,66	0,00	0,00	-	-	-
32. Papua Barat	6,02	3,22	53,49	-	-	-
33. Papua	42,19	2,55	6,04	-	-	-
Indonesia	30,45	3,35	11,00	-	-	-

Tabel A.6. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain		
	Est	SE	RSE (%)
(1)	(20)	(21)	(22)
1. NAD	0,11	0,16	133,33
2. Sumatera Utara	0,08	0,83	127,69
3. Sumatera Barat	-	-	-
4. Riau	-	-	-
5. Jambi	-	-	-
6. Sumatera Selatan	1,88	1,91	100,53
7. Bengkulu	-	-	-
8. Lampung	-	-	-
9. Bangka Belitung	5,56	0,00	0,00
10. Kepulauan Riau	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-
12. Jawa Barat	0,25	0,16	64,00
13. Jawa Tengah	0,10	0,08	80,00
14. DI Yogyakarta	-	-	-
15. Jawa Timur	1,27	0,29	23,83
16. Banten	-	-	-
17. Bali	0,01	0,01	100,00
18. Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20. Kalimantan Barat	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	0,05	0,06	100,00
23. Kalimantan Timur	-	-	-
24. Sulawesi Utara	0,05	0,06	120,00
25. Sulawesi Tengah	1,95	1,41	77,90
26. Sulawesi Selatan	0,01	0,01	100,00
27. Sulawesi Tenggara	-	-	-
28. Gorontalo	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-
30. Maluku	-	-	-
31. Maluku Utara	0,70	0,00	0,00
32. Papua Barat	0,47	0,32	68,09
33. Papua	-	-	-
Indonesia	0,05	0,02	40,00

Tabel A.7. Sampling Error Mutasi Ayam Ras Pedaging terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan			Kematian		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	77,11	5,95	7,72	5,87	1,31	22,32
2. Sumatera Utara	93,77	1,98	2,13	3,57	0,64	18,08
3. Sumatera Barat	88,20	69,20	78,45	4,70	3,40	73,28
4. Riau	84,84	6,45	7,60	4,14	0,97	23,43
5. Jambi	96,29	1,43	1,49	1,80	1,00	54,67
6. Sumatera Selatan	98,66	0,00	0,00	4,59	54,60	189,54
7. Bengkulu	94,89	0,40	0,42	4,21	1,58	37,53
8. Lampung	88,41	2,05	2,32	1,90	0,00	0,12
9. Bangka Belitung	88,40	3,22	3,64	4,38	1,10	25,11
10. Kepulauan Riau	90,74	6,89	7,59	0,70	0,00	0,00
11. DKI Jakarta	75,45	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00
12. Jawa Barat	94,97	0,15	0,16	3,87	0,49	12,66
13. Jawa Tengah	91,32	1,95	2,14	5,07	0,32	6,31
14. DI Yogyakarta	94,99	0,91	0,96	3,10	0,00	0,00
15. Jawa Timur	95,62	0,67	0,70	3,70	1,10	30,02
16. Banten	94,51	0,46	0,49	4,49	1,16	25,84
17. Bali	92,64	0,89	0,96	6,10	1,60	26,90
18. Nusa Tenggara Barat	80,78	1,34	1,66	2,23	0,48	22,22
19. Nusa Tenggara Timur	78,05	9,48	11,85	5,18	0,80	16,63
20. Kalimantan Barat	87,39	1,48	2,00	3,79	0,39	10,48
21. Kalimantan Tengah	92,95	0,99	1,06	4,95	0,33	6,78
22. Kalimantan Selatan	81,85	8,92	10,90	4,96	0,71	14,34
23. Kalimantan Timur	94,97	0,29	0,00	4,08	0,40	9,80
24. Sulawesi Utara	91,43	1,03	1,11	1,61	1,22	75,78
25. Sulawesi Tengah	82,10	0,00	0,00	7,40	2,63	35,54
26. Sulawesi Selatan	97,62	0,78	1,00	3,58	0,86	24,02
27. Sulawesi Tenggara	84,87	3,44	4,00	2,41	0,54	22,41
28. Gorontalo	94,45	0,78	0,83	5,14	0,75	14,59
29. Sulawesi Barat	84,62	13,99	15,93	3,70	8,95	123,45
30. Maluku	-	-	-	-	-	-
31. Maluku Utara	89,38	2,86	3,20	8,24	0,11	1,33
32. Papua Barat	95,33	1,36	1,00	3,90	1,61	41,28
33. Papua	97,45	0,54	1,00	2,49	0,06	2,41
Indonesia	89,39	2,04	2,28	4,44	0,19	4,28

Tabel A.7. Lanjutan

Provinsi	Pengurangan Lain			Penambahan Lain		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	0,54	0,17	31,48	-	-	-
2. Sumatera Utara	0,10	0,00	0,00	-	-	-
3. Sumatera Barat	0,20	0,06	30,00	-	-	-
4. Riau	1,03	0,44	42,72	-	-	-
5. Jambi	0,44	0,19	47,50	-	-	-
6. Sumatera Selatan	0,02	0,02	100,00	0,12	0,14	116,67
7. Bengkulu	0,23	0,13	56,52	0,13	0,07	53,85
8. Lampung	0,30	0,10	33,33	-	-	-
9. Bangka Belitung	0,32	0,19	59,38	-	-	-
10. Kepulauan Riau	0,01	0,01	100,00	-	-	-
11. DKI Jakarta	0,73	0,00	0,00	-	-	-
12. Jawa Barat	0,28	0,02	7,14	0,80	0,20	32,86
13. Jawa Tengah	0,20	0,10	37,68	0,08	0,03	37,50
14. DI Yogyakarta	0,20	0,00	0,00	-	-	-
15. Jawa Timur	0,30	0,60	189,12	0,20	0,11	55,00
16. Banten	0,54	0,15	27,78	-	-	-
17. Bali	0,11	0,05	45,45	-	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	0,07	0,07	100,00	-	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	0,26	0,12	57,14	-	-	-
20. Kalimantan Barat	0,42	0,19	44,19	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	0,35	0,14	40,00	0,03	0,03	100,00
22. Kalimantan Selatan	0,54	0,16	29,63	-	-	-
23. Kalimantan Timur	0,46	0,16	34,78	-	-	-
24. Sulawesi Utara	0,02	0,00	0,00	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	3,42	1,78	52,05	-	-	-
26. Sulawesi Selatan	0,04	0,03	75,00	0,25	0,25	200,00
27. Sulawesi Tenggara	0,09	0,11	122,22	-	-	-
28. Gorontalo	0,17	0,05	29,41	-	-	-
29. Sulawesi Barat	0,28	1,08	122,73	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-	-	-
31. Maluku Utara	0,20	0,32	160,00	-	-	-
32. Papua Barat	0,40	0,00	0,00	-	-	-
33. Papua	0,70	0,04	5,71	0,36	0,19	52,78
Indonesia	0,41	0,07	17,07	0,10	0,10	88,38

Tabel A.8. Sampling Error Mutasi Itik terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan			Pemotongan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	14,90	3,50	23,33	6,76	0,23	3,40
2. Sumatera Utara	20,82	2,38	11,43	3,60	2,10	59,46
3. Sumatera Barat	17,70	8,80	49,86	0,80	0,50	55,24
4. Riau	14,00	7,00	50,04	18,60	8,00	43,17
5. Jambi	6,20	2,70	44,11	10,20	2,30	22,40
6. Sumatera Selatan	18,20	4,80	26,49	4,80	1,20	25,24
7. Bengkulu	22,20	5,20	23,38	11,30	2,70	23,86
8. Lampung	26,97	4,64	17,21	5,60	2,70	47,27
9. Bangka Belitung	4,10	15,20	371,51	3,40	2,10	61,18
10. Kepulauan Riau	29,50	12,50	42,46	2,90	3,00	105,55
11. DKI Jakarta	9,70	3,96	28,53	12,76	10,85	85,03
12. Jawa Barat	44,20	19,20	43,37	3,00	0,90	31,67
13. Jawa Tengah	44,50	13,50	30,31	2,90	0,70	24,81
14. DI Yogyakarta	41,23	23,39	56,73	7,77	6,88	88,55
15. Jawa Timur	49,80	14,80	29,73	5,47	0,94	17,18
16. Banten	25,00	3,20	12,64	6,10	1,60	26,46
17. Bali	89,38	39,25	25,66	3,70	2,60	68,34
18. Nusa Tenggara Barat	14,90	11,00	73,69	7,50	4,90	66,05
19. Nusa Tenggara Timur	31,60	7,98	25,30	4,59	1,49	32,46
20. Kalimantan Barat	20,40	8,00	39,03	7,50	1,51	20,13
21. Kalimantan Tengah	36,80	6,79	18,44	6,70	1,42	21,23
22. Kalimantan Selatan	45,74	5,63	11,59	6,95	0,36	5,18
23. Kalimantan Timur	38,40	8,83	22,98	8,86	1,56	17,61
24. Sulawesi Utara	54,60	4,96	27,82	5,44	3,01	55,84
25. Sulawesi Tengah	13,93	2,84	20,39	7,90	7,50	94,90
26. Sulawesi Selatan	46,30	22,10	47,73	10,90	4,50	40,97
27. Sulawesi Tenggara	29,93	4,77	19,64	7,04	0,68	9,66
28. Gorontalo	20,10	34,60	172,60	3,30	5,90	178,34
29. Sulawesi Barat	7,69	1,42	18,47	9,70	3,90	40,41
30. Maluku	19,33	3,93	20,33	7,40	0,20	2,85
31. Maluku Utara	10,80	2,30	21,17	5,41	1,06	21,12
32. Papua Barat	7,80	6,20	80,19	11,00	6,10	55,21
33. Papua	18,69	5,03	26,91	3,60	0,00	0,00
Indonesia	48,70	5,30	10,83	7,80	2,00	26,25

Tabel A.8. Lanjutan

Provinsi	Kematian			Pengurangan Lain		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	6,97	0,49	7,02	2,10	1,00	49,94
2. Sumatera Utara	4,61	1,06	22,89	1,00	0,70	69,72
3. Sumatera Barat	14,20	5,00	35,48	4,90	3,80	77,54
4. Riau	25,60	5,40	20,99	6,10	2,40	39,10
5. Jambi	26,90	10,20	37,88	1,19	0,58	48,33
6. Sumatera Selatan	12,90	3,00	23,21	2,60	0,80	30,39
7. Bengkulu	2,79	0,81	28,83	2,90	3,10	106,30
8. Lampung	14,10	5,40	38,08	2,00	2,20	109,17
9. Bangka Belitung	16,60	7,50	44,80	0,50	3,70	696,18
10. Kepulauan Riau	8,10	15,80	196,28	-	-	-
11. DKI Jakarta	4,40	2,06	58,86	4,33	1,98	54,25
12. Jawa Barat	8,10	2,30	28,63	1,70	0,60	37,00
13. Jawa Tengah	6,70	1,40	20,80	1,90	0,60	30,91
14. DI Yogyakarta	27,70	18,30	66,04	1,20	0,70	57,55
15. Jawa Timur	6,00	1,80	29,81	1,00	0,50	50,92
16. Banten	12,98	1,30	13,80	3,80	1,80	47,57
17. Bali	1,36	0,88	37,77	0,81	0,72	52,17
18. Nusa Tenggara Barat	14,82	2,39	16,13	1,50	1,60	108,86
19. Nusa Tenggara Timur	3,96	2,12	53,54	-	-	-
20. Kalimantan Barat	2,65	0,73	27,55	4,80	2,90	60,36
21. Kalimantan Tengah	3,00	2,77	90,92	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	3,55	0,98	25,99	1,60	0,70	40,50
23. Kalimantan Timur	2,22	0,56	25,23	-	-	-
24. Sulawesi Utara	8,36	2,98	36,97	0,05	0,06	100,00
25. Sulawesi Tengah	5,59	2,68	48,11	2,70	3,40	126,59
26. Sulawesi Selatan	7,18	3,01	41,92	7,30	3,50	48,07
27. Sulawesi Tenggara	2,52	0,81	39,90	0,50	0,70	126,62
28. Gorontalo	4,43	2,93	63,70	-	-	-
29. Sulawesi Barat	13,44	2,64	19,64	4,45	0,97	21,80
30. Maluku	3,72	1,30	36,11	0,51	0,21	41,18
31. Maluku Utara	0,90	2,20	232,40	0,60	0,90	152,79
32. Papua Barat	15,13	1,86	12,29	4,56	0,77	16,89
33. Papua	3,65	1,01	34,01	-	-	-
Indonesia	5,59	0,53	9,45	,00	0,50	15,12

Tabel A.8. Lanjutan

Provinsi	Pembelian			Penetasan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. NAD	13,50	9,50	69,94	19,60	8,60	43,64
2. Sumatera Utara	28,20	28,40	100,73	13,70	7,90	57,66
3. Sumatera Barat	24,10	13,50	55,94	29,07	1,58	5,44
4. Riau	8,30	3,20	38,69	72,20	14,70	20,31
5. Jambi	4,60	2,30	50,73	42,30	15,70	37,07
6. Sumatera Selatan	23,90	15,50	64,67	31,27	1,82	5,82
7. Bengkulu	4,60	4,50	96,94	34,30	25,90	75,50
8. Lampung	20,60	10,10	49,28	29,95	6,54	21,87
9. Bangka Belitung	16,60	4,90	29,42	34,80	22,10	63,45
10. Kepulauan Riau	33,10	16,40	49,37	23,33	5,71	26,69
11. DKI Jakarta	57,76	48,69	84,30	4,23	1,30	36,52
12. Jawa Barat	54,50	20,80	38,09	25,90	10,00	38,74
13. Jawa Tengah	38,80	10,00	25,84	30,40	6,80	22,51
14. DI Yogyakarta	57,91	30,22	52,18	40,10	28,60	71,31
15. Jawa Timur	65,50	20,50	31,26	10,50	4,80	46,07
16. Banten	38,30	12,40	32,37	17,90	7,10	39,94
17. Bali	81,53	72,38	34,34	17,93	1,95	10,88
18. Nusa Tenggara Barat	36,20	62,70	173,30	28,66	12,03	41,97
19. Nusa Tenggara Timur	23,10	8,61	37,30	25,41	4,04	15,90
20. Kalimantan Barat	10,40	20,00	192,38	51,20	16,00	31,23
21. Kalimantan Tengah	57,40	23,04	40,13	6,80	7,87	115,87
22. Kalimantan Selatan	46,63	10,86	14,86	23,80	10,80	45,42
23. Kalimantan Timur	21,96	6,04	27,50	39,35	7,67	19,49
24. Sulawesi Utara	3,61	0,74	20,50	75,82	5,82	25,60
25. Sulawesi Tengah	14,97	3,29	21,98	36,70	13,70	37,39
26. Sulawesi Selatan	51,40	31,50	61,23	36,70	13,70	37,39
27. Sulawesi Tenggara	24,30	17,50	72,09	24,61	2,20	40,37
28. Gorontalo	17,11	7,42	39,49	10,08	4,51	44,92
29. Sulawesi Barat	18,20	18,01	98,96	46,00	25,20	54,77
30. Maluku	25,56	6,78	26,53	15,59	7,99	51,05
31. Maluku Utara	0,10	0,20	140,27	38,06	2,01	9,41
32. Papua Barat	10,30	14,60	141,48	39,97	4,41	11,03
33. Papua	9,42	2,62	27,81	31,83	7,41	23,28
Indonesia	55,70	10,50	18,81	31,00	3,40	11,02

Tabel A.8. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain		
	Est	SE	RSE (%)
(1)	(20)	(21)	(22)
1. NAD	0,60	0,30	54,76
2. Sumatera Utara	0,56	0,04	7,14
3. Sumatera Barat	0,60	0,70	120,49
4. Riau	3,00	1,00	34,70
5. Jambi	2,20	2,10	95,00
6. Sumatera Selatan	0,60	0,30	43,36
7. Bengkulu	0,70	0,30	46,75
8. Lampung	4,40	2,00	46,57
9. Bangka Belitung	1,00	5,40	540,76
10. Kepulauan Riau	-	-	-
11. DKI Jakarta	0,13	0,09	69,23
12. Jawa Barat	0,40	0,20	52,27
13. Jawa Tengah	3,60	2,10	57,88
14. DI Yogyakarta	1,80	1,20	63,17
15. Jawa Timur	2,80	3,40	119,09
16. Banten	2,10	2,40	116,63
17. Bali	1,20	0,70	62,39
18. Nusa Tenggara Barat	0,50	1,40	280,81
19. Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20. Kalimantan Barat	1,60	0,90	59,17
21. Kalimantan Tengah	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	0,60	0,40	58,03
23. Kalimantan Timur	0,07	0,07	100,00
24. Sulawesi Utara	0,11	0,12	109,09
25. Sulawesi Tengah	1,40	0,44	31,43
26. Sulawesi Selatan	0,41	0,21	51,22
27. Sulawesi Tenggara	2,93	0,61	20,82
28. Gorontalo	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-
30. Maluku	-	-	-
31. Maluku Utara	0,30	0,40	126,19
32. Papua Barat	-	-	-
33. Papua	0,04	0,03	100,00
Indonesia	2,60	0,70	26,90

Tabel A.9. Sampling Error Mutasi Itik Manila terhadap Stok Awal Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan			Pemotongan		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. NAD	37,66	10,93	29,01	7,26	1,25	17,22
2. Sumatera Utara	39,30	5,70	14,57	3,26	2,01	56,94
3. Sumatera Barat	14,10	9,70	68,68	2,50	3,90	156,79
4. Riau	39,30	5,70	14,57	6,55	1,55	23,66
5. Jambi	10,30	1,53	14,85	10,93	1,55	14,18
6. Sumatera Selatan	29,90	10,90	36,55	9,92	1,77	17,84
7. Bengkulu	10,30	1,53	14,85	8,10	4,99	61,80
8. Lampung	18,60	55,17	29,71	10,52	1,40	12,42
9. Bangka Belitung	10,40	9,26	88,55	8,50	2,36	27,67
10. Kepulauan Riau	35,50	1,65	4,56	1,39	0,26	22,03
11. DKI Jakarta	48,03	11,79	27,43	4,23	2,14	36,15
12. Jawa Barat	79,90	25,80	32,29	8,32	1,26	15,02
13. Jawa Tengah	45,20	6,10	13,47	9,40	0,73	7,77
14. DI Yogyakarta	46,70	13,01	27,87	13,60	1,64	12,07
15. Jawa Timur	19,70	14,50	73,41	7,89	1,40	17,79
16. Banten	26,70	6,11	22,91	12,20	2,63	21,50
17. Bali	59,10	12,30	20,89	16,40	10,60	64,40
18. Nusa Tenggara Barat	59,71	6,85	11,47	13,64	3,74	27,42
19. Nusa Tenggara Timur	20,17	18,05	89,49	9,88	2,26	22,87
20. Kalimantan Barat	55,80	9,28	16,54	10,02	2,68	26,72
21. Kalimantan Tengah	11,80	3,50	29,96	6,70	2,20	33,11
22. Kalimantan Selatan	127,52	13,68	10,71	18,80	7,40	39,58
23. Kalimantan Timur	38,60	20,60	53,48	8,08	1,08	13,37
24. Sulawesi Utara	34,30	9,23	27,00	4,83	14,43	298,76
25. Sulawesi Tengah	11,72	2,20	18,77	3,80	6,10	161,29
26. Sulawesi Selatan	34,70	14,43	41,50	7,65	1,10	14,38
27. Sulawesi Tenggara	10,70	1,81	16,88	20,00	3,09	15,42
28. Gorontalo	34,93	6,35	18,01	6,49	2,07	32,14
29. Sulawesi Barat	25,30	19,60	77,23	6,60	5,20	78,86
30. Maluku	59,65	25,21	41,44	7,17	2,21	31,21
31. Maluku Utara	61,94	13,65	16,51	8,20	1,73	19,31
32. Papua Barat	18,70	13,00	69,56	9,08	2,82	33,85
33. Papua	72,02	7,90	10,91	22,32	3,29	14,74
Indonesia	78,94	2,37	3,00	7,18	0,31	4,32

Tabel A.9. Lanjutan

Provinsi	Kematian			Pengurangan Lain		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	7,60	0,84	11,07	3,00	2,20	71,73
2. Sumatera Utara	9,24	2,69	26,87	0,42	0,25	55,56
3. Sumatera Barat	19,90	4,60	22,99	0,50	0,30	61,33
4. Riau	15,80	2,35	14,87	2,10	1,30	61,93
5. Jambi	12,66	1,23	9,54	2,73	0,41	15,02
6. Sumatera Selatan	22,48	5,07	21,56	6,65	2,91	43,69
7. Bengkulu	11,27	4,34	27,33	-	-	-
8. Lampung	17,85	2,61	13,64	-	-	-
9. Bangka Belitung	12,75	2,30	18,00	-	-	-
10. Kepulauan Riau	4,61	0,78	17,18	-	-	-
11. DKI Jakarta	11,21	2,57	27,69	1,06	0,86	52,76
12. Jawa Barat	18,66	3,84	20,35	2,20	0,60	25,25
13. Jawa Tengah	18,89	1,84	9,74	6,90	1,80	26,66
14. DI Yogyakarta	17,57	5,72	32,56	-	-	-
15. Jawa Timur	5,50	6,60	119,01	0,70	1,20	155,88
16. Banten	17,94	1,75	7,33	-	-	-
17. Bali	9,35	15,58	61,92	2,53	0,53	20,95
18. Nusa Tenggara Barat	20,64	11,65	46,81	4,90	3,50	70,54
19. Nusa Tenggara Timur	15,58	4,19	26,89	-	-	-
20. Kalimantan Barat	19,29	5,14	26,52	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	4,80	3,50	74,01	1,10	1,70	156,48
22. Kalimantan Selatan	15,09	2,04	13,50	4,84	1,25	25,77
23. Kalimantan Timur	11,90	2,81	23,61	0,70	0,19	27,14
24. Sulawesi Utara	8,55	2,69	31,39	9,10	2,48	26,33
25. Sulawesi Tengah	7,40	11,60	155,74	1,20	0,50	38,62
26. Sulawesi Selatan	19,67	2,39	20,98	-	-	-
27. Sulawesi Tenggara	38,00	5,97	15,71	4,03	0,76	18,86
28. Gorontalo	13,97	3,42	29,76	-	-	-
29. Sulawesi Barat	17,40	17,60	100,88	4,60	4,90	106,09
30. Maluku	16,15	7,60	31,29	0,88	0,93	103,33
31. Maluku Utara	15,58	3,88	46,45	0,00	1,62	20,30
32. Papua Barat	21,00	12,10	57,95	8,10	6,70	83,48
33. Papua	13,67	5,28	38,54	3,89	0,63	16,00
Indonesia	17,77	0,59	3,32	4,85	0,42	8,66

Tabel A.9. Lanjutan

Provinsi	Pembelian			Kelahiran		
	Est	SE	RSE (%)	Est	SE	RSE (%)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. NAD	24,70	10,64	43,01	47,85	7,63	15,95
2. Sumatera Utara	1,60	0,90	57,99	70,71	12,88	18,22
3. Sumatera Barat	12,70	8,70	69,05	41,06	6,40	15,59
4. Riau	4,40	5,20	116,90	64,46	9,37	14,54
5. Jambi	3,72	0,82	22,04	66,18	4,69	7,22
6. Sumatera Selatan	12,80	6,50	50,49	85,80	25,10	29,31
7. Bengkulu	9,00	5,65	62,47	47,10	16,07	34,10
8. Lampung	3,00	0,86	28,90	80,37	9,43	10,19
9. Bangka Belitung	4,50	7,09	155,99	49,73	9,07	18,23
10. Kepulauan Riau	17,26	0,20	1,12	34,81	3,29	9,31
11. DKI Jakarta	11,21	3,29	38,26	69,97	20,06	28,67
12. Jawa Barat	24,70	16,90	68,68	96,20	21,30	22,10
13. Jawa Tengah	14,00	2,40	17,42	74,28	6,08	8,19
14. DI Yogyakarta	20,70	11,58	56,01	90,40	12,75	14,10
15. Jawa Timur	24,70	4,80	19,29	23,20	33,40	144,08
16. Banten	3,00	1,08	35,64	78,90	12,48	15,80
17. Bali	13,50	5,70	41,85	92,30	51,90	56,30
18. Nusa Tenggara Barat	6,80	3,40	49,84	106,40	28,67	26,93
19. Nusa Tenggara Timur	24,90	39,00	156,35	41,29	10,28	24,90
20. Kalimantan Barat	3,50	4,26	121,01	87,10	31,40	36,05
21. Kalimantan Tengah	20,94	8,53	40,72	15,00	7,90	52,59
22. Kalimantan Selatan	95,52	15,29	15,98	95,50	29,20	30,52
23. Kalimantan Timur	10,95	7,36	67,21	46,14	9,07	19,66
24. Sulawesi Utara	15,90	6,43	21,88	47,76	14,80	42,32
25. Sulawesi Tengah	13,60	7,08	51,53	17,40	23,80	137,04
26. Sulawesi Selatan	4,20	1,63	39,02	71,47	9,26	12,96
27. Sulawesi Tenggara	4,00	1,99	49,29	93,30	7,99	8,56
28. Gorontalo	13,60	7,08	51,53	45,20	11,99	26,37
29. Sulawesi Barat	46,90	22,10	47,13	21,10	74,40	352,39
30. Maluku	37,15	14,59	38,26	53,76	18,63	34,65
31. Maluku Utara	58,05	4,16	25,68	37,23	17,30	23,96
32. Papua Barat	89,53	34,50	42,00	91,45	28,33	33,76
33. Papua	44,63	7,22	16,14	82,23	9,51	11,55
Indonesia	22,70	6,50	28,51	96,80	9,50	9,77

Tabel A.9. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain		
	Est	SE	RSE (%)
(1)	(20)	(21)	(22)
1. NAD	1,10	0,80	70,31
2. Sumatera Utara	4,00	2,80	71,02
3. Sumatera Barat	3,40	3,70	110,52
4. Riau	0,78	0,24	30,77
5. Jambi	0,40	0,60	137,76
6. Sumatera Selatan	0,64	0,12	18,75
7. Bengkulu	-	-	-
8. Lampung	-	-	-
9. Bangka Belitung	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-
12. Jawa Barat	0,80	0,30	34,12
13. Jawa Tengah	1,40	0,60	40,34
14. DI Yogyakarta	-	-	-
15. Jawa Timur	0,60	1,30	212,70
16. Banten	3,10	1,10	3,53
17. Bali	0,92	0,30	32,61
18. Nusa Tenggara Barat	1,70	0,90	53,93
19. Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20. Kalimantan Barat	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	0,41	0,18	43,90
22. Kalimantan Selatan	4,82	0,61	12,66
23. Kalimantan Timur	1,65	0,45	27,27
24. Sulawesi Utara	1,44	1,10	73,83
25. Sulawesi Tengah	0,80	0,40	45,95
26. Sulawesi Selatan	-	-	-
27. Sulawesi Tenggara	0,94	0,24	25,53
28. Gorontalo	-	-	-
29. Sulawesi Barat	3,38	0,78	23,08
30. Maluku	0,94	0,37	39,36
31. Maluku Utara	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-
33. Papua	0,44	0,12	27,27
Indonesia	1,24	0,14	11,38

Tabel B.1. Selang Kepercayaan (95%) dari Estimasi Parameter Kambing Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan		Pemotongan	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. NAD	5,30	19,60	0,50	3,30
2. Sumatera Utara	14,00	24,70	0,74	1,22
3. Sumatera Barat	20,47	30,31	0,30	1,70
4. Riau	8,30	16,80	1,30	7,70
5. Jambi	7,60	22,20	1,40	5,50
6. Sumatera Selatan	9,60	18,60	2,90	9,10
7. Bengkulu	6,90	12,30	0,60	3,70
8. Lampung	17,90	26,00	0,20	18,70
9. Bangka Belitung	28,60	28,60	4,08	4,08
10. Kepulauan Riau	8,60	20,70	0,20	1,60
11. DKI Jakarta	23,61	47,13	3,89	3,89
12. Jawa Barat	30,27	31,95	0,80	0,92
13. Jawa Tengah	31,85	32,67	1,20	2,40
14. DI Yogyakarta	19,90	30,20	0,60	1,60
15. Jawa Timur	17,69	37,77	1,13	1,71
16. Banten	13,10	21,00	0,60	4,20
17. Bali	23,30	43,40	0,00	13,17
18. Nusa Tenggara Barat	17,60	42,30	2,30	6,10
19. Nusa Tenggara Timur	5,50	14,30	1,90	7,50
20. Kalimantan Barat	8,40	16,20	0,00	12,30
21. Kalimantan Tengah	7,20	103,60	0,00	9,37
22. Kalimantan Selatan	20,15	34,27	1,80	6,30
23. Kalimantan Timur	5,70	25,40	0,00	9,04
24. Sulawesi Utara	20,28	47,52	0,00	5,89
25. Sulawesi Tengah	5,70	23,60	0,00	3,90
26. Sulawesi Selatan	24,35	29,37	1,10	3,50
27. Sulawesi Tenggara	12,60	28,80	1,40	5,20
28. Gorontalo	14,57	25,89	0,10	3,20
29. Sulawesi Barat	14,80	98,70	0,00	6,20
30. Maluku	16,84	27,30	1,81	4,63
31. Maluku Utara	16,20	23,38	0,00	11,89
32. Papua Barat	0,00	88,50	0,00	9,80
33. Papua	13,61	29,37	0,31	4,23
Indonesia	22,20	30,60	2,10	5,70

Tabel B.1. Lanjutan

Provinsi	Kematian		Pengurangan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	2,00	11,30	0,20	3,10
2. Sumatera Utara	4,50	14,30	0,00	6,00
3. Sumatera Barat	6,50	18,80	0,00	6,70
4. Riau	7,00	17,10	0,30	3,50
5. Jambi	5,19	10,83	0,00	6,60
6. Sumatera Selatan	4,10	11,00	0,60	6,50
7. Bengkulu	3,30	16,10	0,10	6,60
8. Lampung	1,40	16,70	0,00	1,70
9. Bangka Belitung	3,59	11,91	-	-
10. Kepulauan Riau	2,48	7,88	0,00	0,70
11. DKI Jakarta	0,12	5,96	0,00	0,44
12. Jawa Barat	4,94	5,34	0,54	2,26
13. Jawa Tengah	4,34	4,50	0,60	2,50
14. DI Yogyakarta	2,10	8,00	0,00	2,60
15. Jawa Timur	2,78	5,80	0,30	1,10
16. Banten	2,70	7,40	1,50	4,90
17. Bali	0,53	6,99	0,81	3,17
18. Nusa Tenggara Barat	7,59	8,93	0,30	1,90
19. Nusa Tenggara Timur	17,26	19,76	4,45	5,19
20. Kalimantan Barat	3,20	16,80	0,11	1,09
21. Kalimantan Tengah	0,00	20,00	-	-
22. Kalimantan Selatan	4,80	16,50	1,93	3,07
23. Kalimantan Timur	3,10	4,94	0,53	1,07
24. Sulawesi Utara	4,66	14,94	1,38	4,20
25. Sulawesi Tengah	5,00	10,80	0,00	7,40
26. Sulawesi Selatan	5,00	11,00	0,00	4,80
27. Sulawesi Tenggara	4,35	10,39	0,20	2,40
28. Gorontalo	2,09	9,07	0,00	1,60
29. Sulawesi Barat	1,25	9,37	1,80	10,90
30. Maluku	6,44	14,08	0,29	2,99
31. Maluku Utara	4,36	8,04	0,00	12,06
32. Papua Barat	3,46	9,38	0,00	7,60
33. Papua	0,00	5,82	0,00	2,30
Indonesia	6,00	10,40	1,30	3,60

Tabel B.1. Lanjutan

Provinsi	Pembelian		Kelahiran	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	0,00	6,20	15,30	30,00
2. Sumatera Utara	3,00	17,10	29,30	46,80
3. Sumatera Barat	0,90	5,60	30,30	53,80
4. Riau	0,20	7,80	24,50	45,00
5. Jambi	0,90	6,30	25,30	41,50
6. Sumatera Selatan	2,50	9,00	22,60	41,00
7. Bengkulu	0,70	4,20	17,40	33,20
8. Lampung	2,30	7,30	32,20	67,30
9. Bangka Belitung	14,30	14,30	30,73	62,75
10. Kepulauan Riau	0,00	11,10	19,80	57,00
11. DKI Jakarta	0,39	14,43	22,08	55,08
12. Jawa Barat	5,23	10,41	40,56	50,48
13. Jawa Tengah	8,40	15,50	40,30	50,20
14. DI Yogyakarta	3,20	8,40	28,90	49,50
15. Jawa Timur	5,80	9,40	37,50	51,40
16. Banten	0,60	4,00	26,70	49,60
17. Bali	0,00	10,80	40,84	63,06
18. Nusa Tenggara Barat	3,20	9,80	46,50	77,20
19. Nusa Tenggara Timur	4,01	4,63	37,24	41,74
20. Kalimantan Barat	2,90	16,30	9,60	50,90
21. Kalimantan Tengah	0,00	155,30	12,20	24,00
22. Kalimantan Selatan	4,67	21,87	31,92	44,46
23. Kalimantan Timur	1,82	2,96	27,20	40,68
24. Sulawesi Utara	0,57	2,17	32,11	76,05
25. Sulawesi Tengah	0,20	9,30	15,30	53,80
26. Sulawesi Selatan	1,00	7,90	33,80	56,50
27. Sulawesi Tenggara	0,00	2,70	31,80	71,40
28. Gorontalo	0,73	4,49	3,10	46,50
29. Sulawesi Barat	0,00	13,60	39,70	108,90
30. Maluku	-	-	32,70	66,30
31. Maluku Utara	0,16	1,64	36,02	49,16
32. Papua Barat	0,00	84,70	0,00	81,10
33. Papua	0,00	6,70	18,72	50,78
Indonesia	6,50	8,80	38,80	57,70

Tabel B.1. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(14)	(15)
1. NAD	0,00	1,80
2. Sumatera Utara	0,60	8,50
3. Sumatera Barat	2,70	13,40
4. Riau	0,50	5,30
5. Jambi	0,00	1,70
6. Sumatera Selatan	0,20	3,40
7. Bengkulu	0,00	3,90
8. Lampung	0,00	9,90
9. Bangka Belitung	-	-
10. Kepulauan Riau	0,00	2,70
11. DKI Jakarta	0,00	0,82
12. Jawa Barat	2,10	5,70
13. Jawa Tengah	2,00	4,50
14. DI Yogyakarta	0,00	16,60
15. Jawa Timur	2,00	4,00
16. Banten	0,40	8,20
17. Bali	0,00	8,40
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	3,90
19. Nusa Tenggara Timur	0,10	5,30
20. Kalimantan Barat	-	-
21. Kalimantan Tengah	0,00	6,40
22. Kalimantan Selatan	0,00	3,70
23. Kalimantan Timur	0,00	0,51
24. Sulawesi Utara	-	-
25. Sulawesi Tengah	0,00	5,10
26. Sulawesi Selatan	0,04	0,54
27. Sulawesi Tenggara	0,70	8,30
28. Gorontalo	0,20	2,70
29. Sulawesi Barat	0,00	1,60
30. Maluku	-	-
31. Maluku Utara	0,00	0,80
32. Papua Barat	0,00	0,30
33. Papua	0,00	8,20
Indonesia	0,85	1,21

Tabel B.2. Selang Kepercayaan (95%) dari Estimasi Parameter Domba Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan		Pemotongan	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. NAD	0,00	32,00	-	-
2. Sumatera Utara	29,10	49,15	0,50	2,70
3. Sumatera Barat	25,22	39,65	-	-
4. Riau	44,40	44,40	0,00	2,83
5. Jambi	3,20	17,20	1,50	17,60
6. Sumatera Selatan	24,67	36,43	-	-
7. Bengkulu	5,00	19,00	0,00	15,10
8. Lampung	32,72	39,23	0,00	2,60
9. Bangka Belitung	54,65	57,49	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	24,64	49,73	-	-
12. Jawa Barat	34,06	37,49	2,20	2,36
13. Jawa Tengah	32,74	38,36	1,72	5,02
14. DI Yogyakarta	15,40	66,60	0,00	7,30
15. Jawa Timur	23,70	36,10	1,44	1,76
16. Banten	18,08	21,00	0,71	1,19
17. Bali	8,30	8,30	13,30	13,30
18. Nusa Tenggara Barat	22,15	34,44	0,00	23,80
19. Nusa Tenggara Timur	18,10	21,04	-	-
20. Kalimantan Barat	48,92	161,82	-	-
21. Kalimantan Tengah	18,03	18,03	6,63	6,63
22. Kalimantan Selatan	34,71	130,02	-	-
23. Kalimantan Timur	26,03	26,03	-	-
24. Sulawesi Utara	-	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	72,73	78,12	3,66	4,14
26. Sulawesi Selatan	6,90	18,97	-	-
27. Sulawesi Tenggara	22,22	22,22	-	-
28. Gorontalo	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-
30. Maluku	24,73	30,47	-	-
31. Maluku Utara	-	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-
33. Papua	-	-	-	-
Indonesia	28,69	33,39	2,10	4,50

Tabel B.2. Lanjutan

Provinsi	Kematian		Pengurangan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	0,00	4,70	0,00	4,80
2. Sumatera Utara	6,14	8,35	-	-
3. Sumatera Barat	0,86	2,39	-	-
4. Riau	0,41	6,59	0,00	2,10
5. Jambi	2,70	22,00	-	-
6. Sumatera Selatan	0,00	6,42	0,07	5,91
7. Bengkulu	-	-	-	-
8. Lampung	0,00	4,20	0,34	2,46
9. Bangka Belitung	11,34	12,56	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-
12. Jawa Barat	2,96	3,00	2,31	2,43
13. Jawa Tengah	2,94	3,43	1,82	2,32
14. DI Yogyakarta	3,66	6,50	0,00	2,40
15. Jawa Timur	1,80	4,20	0,54	0,70
16. Banten	2,43	2,92	0,00	4,10
17. Bali	0,93	6,38	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	0,93	6,38	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	1,71	3,51	0,29	2,87
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	3,40	3,40	-	-
22. Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23. Kalimantan Timur	-	-	-	-
24. Sulawesi Utara	-	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	3,29	3,53	-	-
26. Sulawesi Selatan	1,38	1,38	-	-
27. Sulawesi Tenggara	5,56	5,56	-	-
28. Gorontalo	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-
30. Maluku	2,42	3,65	-	-
31. Maluku Utara	-	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-
33. Papua	-	-	-	-
Indonesia	1,53	2,07	0,60	2,90

Tabel B.2. Lanjutan

Provinsi	Pembelian		Kelahiran	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	-	-	0,00	56,50
2. Sumatera Utara	0,00	41,80	0,00	75,30
3. Sumatera Barat	-	-	11,20	62,00
4. Riau	-	-	80,60	80,60
5. Jambi	0,00	12,60	8,60	48,90
6. Sumatera Selatan	15,77	27,70	16,30	28,60
7. Bengkulu	-	-	0,00	59,50
8. Lampung	9,05	17,25	10,28	37,24
9. Bangka Belitung	44,55	44,92	29,95	29,95
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	0,74	99,48
12. Jawa Barat	34,15	42,70	24,60	36,50
13. Jawa Tengah	42,45	46,78	21,23	27,15
14. DI Yogyakarta	42,52	58,02	20,30	45,86
15. Jawa Timur	27,34	37,87	15,15	32,51
16. Banten	2,04	3,26	13,97	23,49
17. Bali	0,50	0,50	74,00	74,00
18. Nusa Tenggara Barat	18,58	34,02	0,00	56,00
19. Nusa Tenggara Timur	-	-	37,50	37,50
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	21,43	21,43
22. Kalimantan Selatan	26,14	94,43	20,50	20,50
23. Kalimantan Timur	19,09	19,09	17,36	17,36
24. Sulawesi Utara	-	-	-	-
25. Sulawesi Tengah	31,03	33,19	23,30	25,96
26. Sulawesi Selatan	-	-	18,62	18,62
27. Sulawesi Tenggara	-	-	22,22	22,22
28. Gorontalo	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	25,00	25,00
31. Maluku Utara	-	-	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-
33. Papua	-	-	22,73	22,73
Indonesia	26,02	35,94	21,73	27,81

Tabel B.2. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(14)	(15)
1. NAD	0,00	9,10
2. Sumatera Utara	-	-
3. Sumatera Barat	-	-
4. Riau	-	-
5. Jambi	-	-
6. Sumatera Selatan	-	-
7. Bengkulu	-	-
8. Lampung	0,00	3,30
9. Bangka Belitung	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-
11. DKI Jakarta	-	-
12. Jawa Barat	1,01	1,48
13. Jawa Tengah	1,68	2,09
14. DI Yogyakarta	1,10	2,77
15. Jawa Timur	1,07	1,80
16. Banten	1,62	1,99
17. Bali	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	0,81	2,28
19. Nusa Tenggara Timur	-	-
20. Kalimantan Barat	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-
22. Kalimantan Selatan	-	-
23. Kalimantan Timur	-	-
24. Sulawesi Utara	-	-
25. Sulawesi Tengah	-	-
26. Sulawesi Selatan	-	-
27. Sulawesi Tenggara	-	-
28. Gorontalo	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-
30. Maluku	-	-
31. Maluku Utara	-	-
32. Papua Barat	-	-
33. Papua	-	-
Indonesia	0,82	1,36

Tabel B.3. Selang Kepercayaan (95%) dari Estimasi Parameter Babi Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan		Pemotongan	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. NAD	33,33	33,33	11,11	11,11
2. Sumatera Utara	61,70	123,70	0,80	14,20
3. Sumatera Barat	0,00	25,75	10,26	24,80
4. Riau	11,00	32,50	8,10	26,20
5. Jambi	77,70	78,36	2,33	2,57
6. Sumatera Selatan	0,00	67,10	0,00	98,80
7. Bengkulu	177,67	254,69	56,87	73,37
8. Lampung	33,80	252,70	11,70	51,00
9. Bangka Belitung	46,00	131,70	0,00	13,20
10. Kepulauan Riau	26,38	164,28	0,70	10,38
11. DKI Jakarta	-	-	-	-
12. Jawa Barat	30,00	30,00	16,00	16,00
13. Jawa Tengah	81,10	320,80	0,00	1,00
14. DI Yogyakarta	135,74	137,98	12,80	19,50
15. Jawa Timur	83,94	129,88	2,78	13,52
16. Banten	86,40	94,48	3,91	13,79
17. Bali	119,80	181,70	4,30	9,00
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	58,30	0,00	11,60
19. Nusa Tenggara Timur	9,40	18,00	5,10	9,40
20. Kalimantan Barat	5,50	13,80	8,20	15,00
21. Kalimantan Tengah	15,30	24,90	11,80	21,10
22. Kalimantan Selatan	26,20	78,70	13,60	60,00
23. Kalimantan Timur	8,00	34,20	1,50	20,60
24. Sulawesi Utara	55,20	79,94	33,09	36,61
25. Sulawesi Tengah	7,00	120,50	18,17	20,17
26. Sulawesi Selatan	46,83	89,25	14,18	19,08
27. Sulawesi Tenggara	26,30	78,30	0,00	27,90
28. Gorontalo	51,33	90,29	33,00	33,00
29. Sulawesi Barat	16,70	37,10	8,30	17,00
30. Maluku	2,80	22,80	2,30	6,80
31. Maluku Utara	20,38	31,20	12,10	22,01
32. Papua Barat	13,00	50,50	11,20	24,80
33. Papua	26,30	61,50	0,50	38,40
Indonesia	54,01	63,77	8,60	11,70

Tabel B.3. Lanjutan

Provinsi	Kematian		Pengurangan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	11,11	11,11	-	-
2. Sumatera Utara	7,40	21,10	1,90	19,60
3. Sumatera Barat	0,00	29,52	-	-
4. Riau	1,84	6,42	0,00	3,30
5. Jambi	26,40	26,56	-	-
6. Sumatera Selatan	4,63	40,49	0,00	1,70
7. Bengkulu	13,49	49,39	-	-
8. Lampung	1,20	48,40	0,00	2,20
9. Bangka Belitung	3,70	22,30	0,00	4,10
10. Kepulauan Riau	5,50	10,30	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-
12. Jawa Barat	28,57	28,57	-	-
13. Jawa Tengah	0,83	17,77	-	-
14. DI Yogyakarta	28,29	39,15	-	-
15. Jawa Timur	0,00	28,30	1,12	3,44
16. Banten	0,80	6,50	-	-
17. Bali	13,60	38,60	1,20	6,10
18. Nusa Tenggara Barat	3,38	8,16	0,00	3,10
19. Nusa Tenggara Timur	13,90	27,30	2,60	7,50
20. Kalimantan Barat	0,60	16,70	0,00	3,50
21. Kalimantan Tengah	4,70	11,00	0,50	6,40
22. Kalimantan Selatan	0,70	59,00	0,00	18,90
23. Kalimantan Timur	1,20	10,50	0,00	13,20
24. Sulawesi Utara	5,92	20,38	0,04	1,50
25. Sulawesi Tengah	3,30	48,30	2,03	3,09
26. Sulawesi Selatan	13,20	18,14	8,38	12,46
27. Sulawesi Tenggara	0,00	39,00	0,50	3,20
28. Gorontalo	0,00	136,55	-	-
29. Sulawesi Barat	17,00	29,16	0,10	4,80
30. Maluku	1,10	10,30	0,00	39,40
31. Maluku Utara	7,27	13,59	7,41	15,17
32. Papua Barat	16,81	41,71	0,00	45,70
33. Papua	17,65	25,34	7,31	10,92
Indonesia	13,50	20,40	3,10	5,50

Tabel B.3. Lanjutan

Provinsi	Pembelian		Kelahiran	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	22,22	22,22	100,00	100,00
2. Sumatera Utara	14,70	33,40	64,80	148,50
3. Sumatera Barat	-	-	17,21	93,81
4. Riau	1,25	4,55	10,10	57,00
5. Jambi	11,11	11,31	123,46	124,20
6. Sumatera Selatan	0,00	40,13	73,00	151,70
7. Bengkulu	105,25	152,77	131,78	236,40
8. Lampung	4,38	56,68	38,40	330,80
9. Bangka Belitung	0,00	76,30	45,20	200,10
10. Kepulauan Riau	0,00	22,20	44,37	246,95
11. DKI Jakarta	-	-	-	-
12. Jawa Barat	-	-	150,00	150,00
13. Jawa Tengah	12,10	61,72	75,60	250,60
14. DI Yogyakarta	12,10	61,72	141,13	242,43
15. Jawa Timur	44,13	45,69	74,59	124,45
16. Banten	71,21	71,21	52,98	119,82
17. Bali	54,80	85,50	95,20	222,40
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	20,40	0,00	90,20
19. Nusa Tenggara Timur	3,70	9,30	68,69	99,35
20. Kalimantan Barat	0,10	5,90	15,20	55,40
21. Kalimantan Tengah	0,00	23,90	13,60	52,20
22. Kalimantan Selatan	-	-	50,90	199,00
23. Kalimantan Timur	0,00	19,70	14,30	63,90
24. Sulawesi Utara	25,20	89,44	56,61	93,49
25. Sulawesi Tengah	6,90	40,10	0,00	248,20
26. Sulawesi Selatan	33,31	69,41	55,00	74,80
27. Sulawesi Tenggara	23,40	68,30	9,60	131,10
28. Gorontalo	3,38	7,74	0,00	491,58
29. Sulawesi Barat	13,50	35,80	24,80	67,60
30. Maluku	0,00	0,90	3,50	90,90
31. Maluku Utara	0,40	2,30	77,16	140,03
32. Papua Barat	6,00	42,50	64,81	128,35
33. Papua	7,45	11,88	78,43	113,12
Indonesia	14,70	22,80	85,91	104,33

Tabel B.3. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(14)	(15)
1. NAD	-	-
2. Sumatera Utara	1,60	17,20
3. Sumatera Barat	-	-
4. Riau	-	-
5. Jambi	-	-
6. Sumatera Selatan	0,00	5,30
7. Bengkulu	-	-
8. Lampung	0,00	3,30
9. Bangka Belitung	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-
11. DKI Jakarta	-	-
12. Jawa Barat	-	-
13. Jawa Tengah	-	-
14. DI Yogyakarta	-	-
15. Jawa Timur	0,00	5,00
16. Banten	0,40	0,40
17. Bali	2,90	8,60
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	5,10
19. Nusa Tenggara Timur	1,40	3,80
20. Kalimantan Barat	0,10	2,30
21. Kalimantan Tengah	1,30	5,70
22. Kalimantan Selatan	-	-
23. Kalimantan Timur	0,00	2,90
24. Sulawesi Utara	0,00	2,25
25. Sulawesi Tengah	0,77	3,21
26. Sulawesi Selatan	0,00	7,60
27. Sulawesi Tenggara	0,20	7,10
28. Gorontalo	-	-
29. Sulawesi Barat	0,00	10,60
30. Maluku	-	-
31. Maluku Utara	0,00	4,90
32. Papua Barat	0,00	0,06
33. Papua	0,30	1,90
Indonesia	2,60	4,40

Tabel B.4. Selang Kepercayaan (95%) dari Estimasi Parameter Kuda Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan		Pemotongan	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. NAD	0,00	2,98	-	-
2. Sumatera Utara	7,67	20,95	-	-
3. Sumatera Barat	0,00	31,40	-	-
4. Riau	-	-	-	-
5. Jambi	1,02	32,06	-	-
6. Sumatera Selatan	15,49	15,49	6,78	6,78
7. Bengkulu	50,00	50,00	-	-
8. Lampung	18,93	23,01	0,66	0,66
9. Bangka Belitung	-	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-
12. Jawa Barat	4,72	22,12	0,53	2,81
13. Jawa Tengah	0,00	26,40	0,46	5,72
14. DI Yogyakarta	31,80	31,80	-	-
15. Jawa Timur	0,00	7,70	-	-
16. Banten	8,00	56,38	-	-
17. Bali	21,32	21,32	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	3,03	6,83	0,00	5,30
19. Nusa Tenggara Timur	18,69	25,75	0,00	4,60
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	21,63	35,63	3,57	3,57
23. Kalimantan Timur	-	-	-	-
24. Sulawesi Utara	2,68	21,26	0,00	11,15
25. Sulawesi Tengah	4,24	28,98	0,00	7,82
26. Sulawesi Selatan	2,30	7,90	0,00	3,00
27. Sulawesi Tenggara	0,00	29,27	0,00	6,14
28. Gorontalo	0,00	8,60	-	-
29. Sulawesi Barat	3,13	8,19	-	-
30. Maluku	0,00	13,10	-	-
31. Maluku Utara	12,50	12,50	12,50	12,50
32. Papua Barat	-	-	-	-
33. Papua	0,64	0,64	-	-
Indonesia	3,70	7,60	0,60	4,20

Tabel B.4. Lanjutan

Provinsi	Kematian		Pengurangan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	-	-	-	-
2. Sumatera Utara	4,14	4,14	-	-
3. Sumatera Barat	-	-	-	-
4. Riau	-	-	-	-
5. Jambi	0,00	9,59	-	-
6. Sumatera Selatan	5,81	5,81	-	-
7. Bengkulu	-	-	-	-
8. Lampung	0,39	0,39	0,04	23,84
9. Bangka Belitung	-	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-
12. Jawa Barat	2,14	11,16	-	-
13. Jawa Tengah	-	-	0,00	4,92
14. DI Yogyakarta	-	-	-	-
15. Jawa Timur	7,15	9,65	1,39	2,73
16. Banten	-	-	-	-
17. Bali	-	-	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	1,41	2,15	0,00	0,92
19. Nusa Tenggara Timur	1,37	3,21	1,84	2,98
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	2,23	2,23	0,89	0,89
23. Kalimantan Timur	-	-	-	-
24. Sulawesi Utara	0,00	2,94	-	-
25. Sulawesi Tengah	0,00	5,77	-	-
26. Sulawesi Selatan	0,00	1,60	-	-
27. Sulawesi Tenggara	0,00	6,14	-	-
28. Gorontalo	-	-	-	-
29. Sulawesi Barat	0,00	4,27	-	-
30. Maluku	0,17	2,25	-	-
31. Maluku Utara	12,50	12,50	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-
33. Papua	-	-	-	-
Indonesia	1,10	3,70	-	5,20

Tabel B.4. Lanjutan

Provinsi	Pembelian		Kelahiran	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	-	-	11,33	12,19
2. Sumatera Utara	0,00	16,44	6,70	22,82
3. Sumatera Barat	-	-	4,44	28,54
4. Riau	-	-	-	-
5. Jambi	-	-	10,61	29,23
6. Sumatera Selatan	0,00	59,81	7,49	24,43
7. Bengkulu	50,00	50,00	-	-
8. Lampung	13,96	41,20	7,84	13,96
9. Bangka Belitung	-	-	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	-	-
12. Jawa Barat	3,90	18,02	0,49	30,63
13. Jawa Tengah	0,00	12,30	17,08	28,26
14. DI Yogyakarta	17,81	17,81	16,28	16,28
15. Jawa Timur	0,00	8,60	1,77	16,51
16. Banten	-	-	1,39	19,73
17. Bali	53,81	53,81	8,88	8,88
18. Nusa Tenggara Barat	0,50	8,30	14,21	23,15
19. Nusa Tenggara Timur	4,68	11,46	17,75	26,53
20. Kalimantan Barat	-	-	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22. Kalimantan Selatan	12,93	12,93	10,03	24,03
23. Kalimantan Timur	-	-	-	-
24. Sulawesi Utara	0,00	15,04	8,87	25,03
25. Sulawesi Tengah	3,95	31,35	7,78	22,40
26. Sulawesi Selatan	0,10	3,60	5,40	16,80
27. Sulawesi Tenggara	-	-	0,00	29,10
28. Gorontalo	0,64	9,46	1,26	18,58
29. Sulawesi Barat	0,00	20,40	0,00	21,40
30. Maluku	0,34	3,36	0,00	27,90
31. Maluku Utara	-	-	50,00	50,00
32. Papua Barat	-	-	-	-
33. Papua	0,96	0,96	0,00	24,15
Indonesia	1,10	4,10	10,40	22,60

Tabel B.4. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(14)	(15)
1. NAD	-	-
2. Sumatera Utara	-	-
3. Sumatera Barat	-	-
4. Riau	-	-
5. Jambi	-	-
6. Sumatera Selatan	-	-
7. Bengkulu	-	-
8. Lampung	-	-
9. Bangka Belitung	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-
11. DKI Jakarta	-	-
12. Jawa Barat	0,44	4,48
13. Jawa Tengah	0,00	1,87
14. DI Yogyakarta	-	-
15. Jawa Timur	1,28	1,86
16. Banten	0,00	26,68
17. Bali	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	0,21	0,49
19. Nusa Tenggara Timur	0,00	7,80
20. Kalimantan Barat	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-
22. Kalimantan Selatan	0,45	0,45
23. Kalimantan Timur	-	-
24. Sulawesi Utara	0,00	2,94
25. Sulawesi Tengah	-	-
26. Sulawesi Selatan	0,00	6,60
27. Sulawesi Tenggara	-	-
28. Gorontalo	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-
30. Maluku	0,00	1,34
31. Maluku Utara	-	-
32. Papua Barat	-	-
33. Papua	-	-
Indonesia	0,89	2,27

Tabel B.5. Selang Kepercayaan (95%) dari Estimasi Parameter Ayam Buras Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan		Pemotongan	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. NAD	65,79	102,01	9,30	19,20
2. Sumatera Utara	16,60	46,70	11,20	19,60
3. Sumatera Barat	27,60	46,20	9,50	20,20
4. Riau	6,30	15,50	14,10	30,70
5. Jambi	8,40	27,00	20,40	31,90
6. Sumatera Selatan	26,19	30,95	23,32	25,84
7. Bengkulu	11,60	28,70	7,70	18,90
8. Lampung	15,90	38,40	21,96	24,13
9. Bangka Belitung	30,51	56,77	17,70	41,60
10. Kepulauan Riau	20,30	34,60	12,00	33,40
11. DKI Jakarta	17,03	49,84	13,50	31,56
12. Jawa Barat	22,20	51,50	19,00	25,80
13. Jawa Tengah	64,35	113,79	22,70	28,30
14. DI Yogyakarta	126,05	170,89	9,60	18,70
15. Jawa Timur	21,30	34,90	11,60	23,00
16. Banten	22,20	51,50	36,57	41,25
17. Bali	67,07	188,31	45,55	51,06
18. Nusa Tenggara Barat	75,68	121,30	20,70	42,10
19. Nusa Tenggara Timur	11,00	23,70	15,90	28,70
20. Kalimantan Barat	22,12	25,11	24,68	27,28
21. Kalimantan Tengah	34,15	41,37	20,76	24,47
22. Kalimantan Selatan	30,40	78,80	15,50	31,70
23. Kalimantan Timur	72,41	94,97	9,00	19,00
24. Sulawesi Utara	7,00	74,60	8,20	69,50
25. Sulawesi Tengah	12,90	23,50	28,49	34,49
26. Sulawesi Selatan	63,12	128,58	17,40	28,30
27. Sulawesi Tenggara	41,84	78,14	18,30	25,90
28. Gorontalo	35,75	46,93	35,53	43,98
29. Sulawesi Barat	27,30	117,54	27,96	35,07
30. Maluku	33,13	60,57	8,70	35,60
31. Maluku Utara	10,60	37,10	6,20	17,80
32. Papua Barat	11,60	32,90	11,40	23,30
33. Papua	5,60	17,40	4,20	16,50
Indonesia	98,02	111,00	12,60	27,40

Tabel B.5. Lanjutan

Provinsi	Kematian		Pengurangan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	19,98	25,92	0,60	2,50
2. Sumatera Utara	27,70	48,50	2,50	8,20
3. Sumatera Barat	28,10	60,70	1,30	5,20
4. Riau	24,90	45,50	0,00	8,90
5. Jambi	36,35	59,38	1,70	8,80
6. Sumatera Selatan	20,30	39,60	7,58	16,68
7. Bengkulu	16,12	62,31	0,00	5,70
8. Lampung	18,48	64,88	6,74	8,57
9. Bangka Belitung	14,31	101,88	6,19	11,05
10. Kepulauan Riau	24,90	45,50	0,40	9,40
11. DKI Jakarta	13,69	26,89	2,00	8,72
12. Jawa Barat	25,70	43,90	3,20	8,90
13. Jawa Tengah	23,24	74,19	5,20	9,90
14. DI Yogyakarta	17,49	68,57	1,20	7,20
15. Jawa Timur	19,30	37,90	1,60	3,80
16. Banten	37,72	63,54	8,00	27,00
17. Bali	1,79	79,78	9,87	11,18
18. Nusa Tenggara Barat	16,33	72,11	4,10	12,00
19. Nusa Tenggara Timur	37,72	63,54	4,00	17,90
20. Kalimantan Barat	17,71	36,45	2,80	11,80
21. Kalimantan Tengah	18,46	24,01	0,00	1,60
22. Kalimantan Selatan	28,00	55,40	3,45	3,90
23. Kalimantan Timur	20,62	44,27	0,30	3,50
24. Sulawesi Utara	7,03	42,99	0,00	20,50
25. Sulawesi Tengah	14,51	68,70	2,50	7,90
26. Sulawesi Selatan	15,50	61,47	4,70	8,60
27. Sulawesi Tenggara	16,12	107,82	2,60	5,50
28. Gorontalo	14,51	68,70	2,10	10,30
29. Sulawesi Barat	8,74	96,42	4,60	16,00
30. Maluku	15,70	33,00	2,50	10,20
31. Maluku Utara	6,10	30,30	2,20	11,70
32. Papua Barat	9,95	110,46	8,30	20,80
33. Papua	2,65	56,94	2,92	4,20
Indonesia	22,77	26,41	3,30	6,70

Tabel B.5. Lanjutan

Provinsi	Pembelian		Kelahiran	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	1,20	3,60	107,91	128,25
2. Sumatera Utara	2,10	8,40	64,00	121,00
3. Sumatera Barat	0,00	31,00	70,30	113,00
4. Riau	0,90	3,80	58,90	97,80
5. Jambi	0,80	2,60	74,80	147,60
6. Sumatera Selatan	10,11	13,49	89,21	99,86
7. Bengkulu	0,00	6,10	35,70	108,60
8. Lampung	3,31	5,23	46,10	149,20
9. Bangka Belitung	5,05	8,55	75,86	125,18
10. Kepulauan Riau	1,10	6,60	56,90	153,90
11. DKI Jakarta	0,67	2,06	0,00	168,09
12. Jawa Barat	3,60	6,60	71,60	127,20
13. Jawa Tengah	5,70	8,30	135,20	170,60
14. DI Yogyakarta	3,20	23,20	142,20	244,60
15. Jawa Timur	3,30	9,50	57,20	109,00
16. Banten	1,60	5,10	100,30	201,40
17. Bali	17,53	24,58	164,90	184,10
18. Nusa Tenggara Barat	3,70	12,40	120,10	217,40
19. Nusa Tenggara Timur	1,40	3,30	61,80	137,20
20. Kalimantan Barat	0,70	4,70	72,70	133,10
21. Kalimantan Tengah	2,91	11,41	71,27	85,73
22. Kalimantan Selatan	2,80	12,00	117,45	127,79
23. Kalimantan Timur	1,19	2,95	123,84	155,67
24. Sulawesi Utara	0,00	5,30	53,36	188,02
25. Sulawesi Tengah	0,70	4,90	44,00	131,70
26. Sulawesi Selatan	1,10	13,20	90,60	207,96
27. Sulawesi Tenggara	1,40	3,30	88,60	157,80
28. Gorontalo	0,00	2,80	48,90	230,50
29. Sulawesi Barat	0,40	6,20	136,76	176,05
30. Maluku	2,74	4,25	90,25	130,75
31. Maluku Utara	3,26	4,39	39,00	89,10
32. Papua Barat	3,00	9,10	17,90	142,10
33. Papua	0,34	6,18	0,00	82,10
Indonesia	17,51	26,49	143,13	161,67

Tabel B.5. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(14)	(15)
1. NAD	0,00	2,60
2. Sumatera Utara	0,70	2,80
3. Sumatera Barat	0,40	2,20
4. Riau	0,20	2,00
5. Jambi	0,20	1,70
6. Sumatera Selatan	1,51	1,70
7. Bengkulu	0,00	1,40
8. Lampung	0,85	1,15
9. Bangka Belitung	0,00	9,10
10. Kepulauan Riau	0,00	0,50
11. DKI Jakarta	0,00	0,39
12. Jawa Barat	1,40	2,60
13. Jawa Tengah	0,70	1,80
14. DI Yogyakarta	0,80	3,40
15. Jawa Timur	2,74	2,85
16. Banten	0,60	5,00
17. Bali	1,50	5,90
18. Nusa Tenggara Barat	0,79	2,87
19. Nusa Tenggara Timur	0,30	4,40
20. Kalimantan Barat	0,30	1,80
21. Kalimantan Tengah	0,00	0,70
22. Kalimantan Selatan	0,40	1,40
23. Kalimantan Timur	0,00	0,60
24. Sulawesi Utara	0,00	7,80
25. Sulawesi Tengah	0,30	1,60
26. Sulawesi Selatan	2,25	2,53
27. Sulawesi Tenggara	0,30	1,30
28. Gorontalo	0,00	1,10
29. Sulawesi Barat	0,00	2,20
30. Maluku	0,00	1,80
31. Maluku Utara	0,10	1,40
32. Papua Barat	0,00	4,60
33. Papua	0,41	0,66
Indonesia	0,60	0,92

Tabel B.6. Selang Kepercayaan (95%) dari Estimasi Parameter Ayam Ras Petelur Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan		Pemotongan	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. NAD	10,59	12,87	11,46	12,16
2. Sumatera Utara	0,00	15,76	0,00	7,55
3. Sumatera Barat	13,28	26,14	0,00	1,39
4. Riau	0,92	0,92	-	-
5. Jambi	-	-	-	-
6. Sumatera Selatan	5,01	32,37	-	-
7. Bengkulu	13,71	46,87	7,20	7,24
8. Lampung	9,41	9,41	0,00	4,90
9. Bangka Belitung	48,57	48,73	-	-
10. Kepulauan Riau	2,94	4,62	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	1,31	9,11
12. Jawa Barat	0,00	29,05	0,00	22,04
13. Jawa Tengah	16,06	50,52	0,01	0,51
14. DI Yogyakarta	17,06	37,24	-	-
15. Jawa Timur	15,44	24,42	0,17	0,29
16. Banten	0,25	31,49	-	-
17. Bali	15,35	27,59	0,00	1,82
18. Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	15,29	25,01	-	-
20. Kalimantan Barat	3,94	3,94	-	-
21. Kalimantan Tengah	2,59	2,59	-	-
22. Kalimantan Selatan	2,33	24,67	-	-
23. Kalimantan Timur	21,42	21,42	2,74	2,74
24. Sulawesi Utara	9,60	23,32	-	-
25. Sulawesi Tengah	1,61	32,85	-	-
26. Sulawesi Selatan	3,84	86,64	0,00	16,32
27. Sulawesi Tenggara	0,00	34,18	0,00	11,47
28. Gorontalo	8,18	20,80	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-
31. Maluku Utara	-	-	9,65	9,65
32. Papua Barat	-	-	-	-
33. Papua	22,60	25,50	-	-
Indonesia	18,25	28,79	2,05	4,75

Tabel B.6. Lanjutan

Provinsi	Kematian		Pengurangan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	3,56	4,62	0,00	0,32
2. Sumatera Utara	1,75	2,41	0,00	1,01
3. Sumatera Barat	1,58	5,46	0,00	0,04
4. Riau	0,17	0,17	-	-
5. Jambi	0,00	1,09	-	-
6. Sumatera Selatan	0,41	5,07	0,00	0,49
7. Bengkulu	3,29	4,43	-	-
8. Lampung	0,50	5,08	0,00	5,88
9. Bangka Belitung	3,05	3,05	-	-
10. Kepulauan Riau	1,67	2,41	-	-
11. DKI Jakarta	-	-	1,25	6,65
12. Jawa Barat	0,98	2,74	0,00	2,99
13. Jawa Tengah	2,69	4,65	0,01	0,87
14. DI Yogyakarta	-	-	0,00	0,07
15. Jawa Timur	2,11	3,57	0,10	0,18
16. Banten	0,00	13,10	2,66	2,66
17. Bali	1,85	4,35	0,00	0,19
18. Nusa Tenggara Barat	1,24	3,28	0,00	1,64
19. Nusa Tenggara Timur	0,00	29,04	0,00	5,00
20. Kalimantan Barat	3,51	3,51	-	-
21. Kalimantan Tengah	2,87	2,87	-	-
22. Kalimantan Selatan	0,40	3,14	0,00	0,58
23. Kalimantan Timur	1,09	1,09	-	-
24. Sulawesi Utara	0,00	7,10	-	-
25. Sulawesi Tengah	0,24	6,66	0,00	0,50
26. Sulawesi Selatan	0,00	3,69	0,00	0,35
27. Sulawesi Tenggara	2,37	3,11	-	-
28. Gorontalo	1,01	3,47	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-
31. Maluku Utara	5,58	5,58	7,61	7,61
32. Papua Barat	0,00	0,19	-	-
33. Papua	1,04	3,28	-	-
Indonesia	2,46	3,44	0,00	0,69

Tabel B.6. Lanjutan

Provinsi	Pembelian		Kelahiran	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	34,21	43,69	-	-
2. Sumatera Utara	13,91	23,43	-	-
3. Sumatera Barat	21,93	47,09	-	-
4. Riau	-	-	-	-
5. Jambi	0,00	7,39	-	-
6. Sumatera Selatan	0,00	52,71	-	-
7. Bengkulu	49,81	60,15	-	-
8. Lampung	3,77	27,05	-	-
9. Bangka Belitung	55,07	55,23	-	-
10. Kepulauan Riau	7,51	11,19	-	-
11. DKI Jakarta	0,00	10,85	-	-
12. Jawa Barat	5,58	57,64	-	-
13. Jawa Tengah	7,21	62,87	-	-
14. DI Yogyakarta	27,17	55,87	-	-
15. Jawa Timur	17,91	38,29	-	-
16. Banten	0,00	22,65	-	-
17. Bali	8,58	44,30	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	52,43	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	18,06	30,44	-	-
20. Kalimantan Barat	16,33	16,33	-	-
21. Kalimantan Tengah	7,40	7,40	-	-
22. Kalimantan Selatan	8,14	43,02	-	-
23. Kalimantan Timur	0,00	156,58	-	-
24. Sulawesi Utara	0,00	73,68	-	-
25. Sulawesi Tengah	19,36	26,88	-	-
26. Sulawesi Selatan	8,70	89,18	-	-
27. Sulawesi Tenggara	2,29	92,81	-	-
28. Gorontalo	0,00	134,48	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-	-	-
30. Maluku	-	-	-	-
31. Maluku Utara	11,66	11,66	-	-
32. Papua Barat	0,00	12,33	-	-
33. Papua	37,19	47,19	-	-
Indonesia	23,88	37,02	-	-

Tabel B.6. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(14)	(15)
1. NAD	0,00	0,42
2. Sumatera Utara	0,00	1,71
3. Sumatera Barat	-	-
4. Riau	-	-
5. Jambi	-	-
6. Sumatera Selatan	0,00	5,62
7. Bengkulu	-	-
8. Lampung	-	-
9. Bangka Belitung	5,56	5,56
10. Kepulauan Riau	-	-
11. DKI Jakarta	-	-
12. Jawa Barat	0,00	0,56
13. Jawa Tengah	0,00	0,26
14. DI Yogyakarta	-	-
15. Jawa Timur	0,70	1,84
16. Banten	-	-
17. Bali	0,00	0,03
18. Nusa Tenggara Barat	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	-	-
20. Kalimantan Barat	-	-
21. Kalimantan Tengah	-	-
22. Kalimantan Selatan	0,00	0,17
23. Kalimantan Timur	-	-
24. Sulawesi Utara	0,00	0,17
25. Sulawesi Tengah	0,00	4,71
26. Sulawesi Selatan	0,00	0,03
27. Sulawesi Tenggara	-	-
28. Gorontalo	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-
30. Maluku	-	-
31. Maluku Utara	0,70	0,70
32. Papua Barat	0,00	1,10
33. Papua	-	-
Indonesia	0,01	0,09

Tabel B.7. Selang Kepercayaan (95%) dari Estimasi Parameter Ayam Ras Pedaging Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan		Kematian	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. NAD	65,45	88,77	3,30	8,44
2. Sumatera Utara	89,89	97,65	2,32	4,82
3. Sumatera Barat	0,00	223,80	0,00	11,40
4. Riau	72,20	97,48	2,24	6,04
5. Jambi	93,49	99,09	0,00	3,80
6. Sumatera Selatan	98,66	98,66	0,00	111,61
7. Bengkulu	94,11	95,67	1,11	7,31
8. Lampung	84,39	92,43	1,90	1,90
9. Bangka Belitung	82,09	94,71	2,22	6,54
10. Kepulauan Riau	77,24	104,24	0,70	0,70
11. DKI Jakarta	75,45	75,45	9,82	9,82
12. Jawa Barat	94,68	95,26	2,91	4,83
13. Jawa Tengah	87,50	95,14	4,44	5,70
14. DI Yogyakarta	93,21	96,77	3,10	3,10
15. Jawa Timur	94,31	96,93	1,50	5,90
16. Banten	93,61	95,41	2,22	6,76
17. Bali	90,90	94,38	2,90	9,30
18. Nusa Tenggara Barat	78,15	83,41	1,29	3,17
19. Nusa Tenggara Timur	59,47	96,63	3,61	6,75
20. Kalimantan Barat	84,49	90,29	3,03	4,55
21. Kalimantan Tengah	91,01	94,89	4,30	5,60
22. Kalimantan Selatan	64,37	99,33	3,57	6,35
23. Kalimantan Timur	94,40	95,54	3,30	4,86
24. Sulawesi Utara	89,41	93,45	0,00	4,00
25. Sulawesi Tengah	82,10	82,10	2,25	12,55
26. Sulawesi Selatan	96,09	99,15	1,89	5,27
27. Sulawesi Tenggara	78,13	91,61	1,35	3,47
28. Gorontalo	92,92	95,98	3,67	6,61
29. Sulawesi Barat	57,20	112,04	0,00	21,24
30. Maluku	-	-	-	-
31. Maluku Utara	83,77	94,99	8,02	8,46
32. Papua Barat	92,66	98,00	0,74	7,06
33. Papua	96,39	98,51	2,37	2,61
Indonesia	85,39	93,39	4,07	4,81

Tabel B.7. Lanjutan

Provinsi	Pengurangan Lain		Penambahan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	0,21	0,87	-	-
2. Sumatera Utara	0,10	0,10	-	-
3. Sumatera Barat	0,08	0,32	-	-
4. Riau	0,17	1,89	-	-
5. Jambi	0,07	0,81	-	-
6. Sumatera Selatan	0,00	0,06	0,00	0,39
7. Bengkulu	0,00	0,48	0,00	0,27
8. Lampung	0,10	0,50	-	-
9. Bangka Belitung	0,00	0,69	-	-
10. Kepulauan Riau	0,00	0,03	-	-
11. DKI Jakarta	0,73	0,73	-	-
12. Jawa Barat	0,24	0,32	0,30	1,30
13. Jawa Tengah	0,10	0,40	0,02	0,14
14. DI Yogyakarta	0,20	0,20	-	-
15. Jawa Timur	0,00	1,50	0,00	0,42
16. Banten	0,25	0,83	-	-
17. Bali	0,01	0,21	-	-
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	0,21	-	-
19. Nusa Tenggara Timur	0,02	0,50	-	-
20. Kalimantan Barat	0,05	0,79	-	-
21. Kalimantan Tengah	0,08	0,62	0,00	0,09
22. Kalimantan Selatan	0,23	0,85	-	-
23. Kalimantan Timur	0,15	0,77	-	-
24. Sulawesi Utara	0,02	0,02	-	-
25. Sulawesi Tengah	0,00	6,91	-	-
26. Sulawesi Selatan	0,00	0,10	0,00	0,74
27. Sulawesi Tenggara	0,00	0,31	-	-
28. Gorontalo	0,07	0,27	-	-
29. Sulawesi Barat	0,00	2,40	-	-
30. Maluku	-	-	-	-
31. Maluku Utara	0,00	0,83	-	-
32. Papua Barat	-	-	-	-
33. Papua	0,00	0,78	0,00	0,73
Indonesia	0,27	0,55	0,00	0,20

Tabel B.8. Selang Kepercayaan (95%) dari Estimasi Parameter Itik Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan		Pemotongan	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	8,10	21,70	6,31	7,21
2. Sumatera Utara	16,16	25,48	0,00	7,80
3. Sumatera Barat	0,40	35,00	0,00	1,80
4. Riau	0,30	27,70	2,90	34,40
5. Jambi	0,80	11,60	5,80	14,70
6. Sumatera Selatan	8,80	27,60	2,40	7,20
7. Bengkulu	12,00	32,40	6,00	16,60
8. Lampung	17,88	36,06	0,40	10,80
9. Bangka Belitung	0,00	33,90	0,00	7,50
10. Kepulauan Riau	4,90	54,00	0,00	8,90
11. DKI Jakarta	1,94	17,46	0,00	34,03
12. Jawa Barat	6,60	81,80	1,10	4,80
13. Jawa Tengah	18,10	71,00	1,50	4,30
14. DI Yogyakarta	0,00	87,07	0,00	21,25
15. Jawa Timur	20,80	78,80	3,63	7,31
16. Banten	18,80	31,20	2,90	9,20
17. Bali	12,45	166,31	0,00	8,80
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	36,40	0,00	17,10
19. Nusa Tenggara Timur	15,89	47,17	1,67	7,51
20. Kalimantan Barat	4,80	36,00	4,54	10,46
21. Kalimantan Tengah	23,50	50,11	3,92	9,48
22. Kalimantan Selatan	34,71	56,77	6,24	7,66
23. Kalimantan Timur	21,09	55,71	5,80	11,92
24. Sulawesi Utara	44,88	64,32	0,00	11,34
25. Sulawesi Tengah	8,36	19,50	0,00	22,70
26. Sulawesi Selatan	3,00	89,60	2,10	19,60
27. Sulawesi Tenggara	20,58	39,28	5,71	8,37
28. Gorontalo	0,00	87,90	0,00	14,90
29. Sulawesi Barat	4,91	10,47	2,00	17,40
30. Maluku	11,63	27,03	7,00	7,80
31. Maluku Utara	6,30	15,20	3,33	7,49
32. Papua Barat	0,00	20,00	0,00	22,80
33. Papua	8,83	28,55	0,00	7,40
Indonesia	38,31	59,09	3,80	11,70

Tabel B.8. Lanjutan

Provinsi	Kematian		Pengurangan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	6,01	7,93	0,00	4,10
2. Sumatera Utara	2,53	6,69	0,00	2,40
3. Sumatera Barat	4,30	24,10	0,00	12,30
4. Riau	15,10	36,20	1,40	10,80
5. Jambi	6,90	46,90	0,05	2,33
6. Sumatera Selatan	7,00	18,70	1,10	4,10
7. Bengkulu	1,20	4,38	0,00	9,10
8. Lampung	3,60	24,60	0,00	6,30
9. Bangka Belitung	2,00	31,30	0,00	7,80
10. Kepulauan Riau	0,00	39,10	-	-
11. DKI Jakarta	0,36	8,44	0,45	8,21
12. Jawa Barat	3,60	12,70	0,50	2,90
13. Jawa Tengah	4,00	9,40	0,80	3,10
14. DI Yogyakarta	0,00	63,70	0,00	2,60
15. Jawa Timur	2,50	9,60	0,00	2,00
16. Banten	10,43	15,53	0,30	7,40
17. Bali	0,00	3,08	0,00	2,22
18. Nusa Tenggara Barat	10,14	19,50	0,00	4,60
19. Nusa Tenggara Timur	0,00	8,12	-	-
20. Kalimantan Barat	1,22	4,08	0,00	10,60
21. Kalimantan Tengah	0,00	8,48	-	-
22. Kalimantan Selatan	1,63	5,47	0,30	2,90
23. Kalimantan Timur	1,12	3,32	-	-
24. Sulawesi Utara	2,52	14,20	0,00	0,17
25. Sulawesi Tengah	0,34	10,84	0,00	9,30
26. Sulawesi Selatan	1,28	13,08	0,40	14,20
27. Sulawesi Tenggara	0,93	4,11	0,00	1,80
28. Gorontalo	0,00	10,17	-	-
29. Sulawesi Barat	8,27	18,61	2,55	6,35
30. Maluku	1,17	6,27	0,10	0,92
31. Maluku Utara	0,00	5,20	0,00	2,20
32. Papua Barat	11,48	18,78	3,05	6,07
33. Papua	1,67	5,63	-	-
Indonesia	4,55	6,63	2,10	3,90

Tabel B.8. Lanjutan

Provinsi	Pembelian		Penetasan	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	0,00	32,10	2,80	36,50
2. Sumatera Utara	0,00	84,00	0,00	29,20
3. Sumatera Barat	0,00	50,50	25,97	32,17
4. Riau	2,00	14,60	43,40	100,90
5. Jambi	0,00	9,20	11,60	73,00
6. Sumatera Selatan	0,00	54,30	27,70	34,84
7. Bengkulu	0,00	13,40	0,00	85,00
8. Lampung	0,70	40,50	17,13	42,77
9. Bangka Belitung	7,00	26,10	0,00	78,20
10. Kepulauan Riau	1,10	65,20	12,14	34,52
11. DKI Jakarta	0,00	153,19	1,68	6,78
12. Jawa Barat	13,80	95,20	6,20	45,60
13. Jawa Tengah	19,10	58,40	17,00	43,80
14. DI Yogyakarta	0,00	117,14	0,00	96,10
15. Jawa Timur	25,30	105,60	1,00	20,00
16. Banten	14,00	62,70	3,90	31,80
17. Bali	0,00	223,39	14,11	21,75
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	159,00	5,08	52,24
19. Nusa Tenggara Timur	6,21	39,97	17,49	33,33
20. Kalimantan Barat	0,00	49,60	19,90	82,60
21. Kalimantan Tengah	12,25	102,55	0,00	22,20
22. Kalimantan Selatan	25,34	67,92	2,60	45,00
23. Kalimantan Timur	10,12	33,80	24,32	54,38
24. Sulawesi Utara	2,16	5,06	64,41	87,23
25. Sulawesi Tengah	8,52	21,42	9,80	63,60
26. Sulawesi Selatan	0,00	113,10	9,80	63,60
27. Sulawesi Tenggara	0,00	58,60	20,30	28,92
28. Gorontalo	2,57	31,65	1,24	18,92
29. Sulawesi Barat	0,00	53,50	0,00	95,50
30. Maluku	12,27	38,85	0,00	31,25
31. Maluku Utara	0,00	0,50	34,12	42,00
32. Papua Barat	0,00	38,90	31,33	48,61
33. Papua	4,28	14,56	17,31	46,35
Indonesia	35,20	76,30	24,30	37,70

Tabel B.8. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(14)	(15)
1. NAD	0,00	1,30
2. Sumatera Utara	0,48	0,64
3. Sumatera Barat	0,00	1,90
4. Riau	1,00	5,00
5. Jambi	0,00	6,30
6. Sumatera Selatan	0,10	1,10
7. Bengkulu	0,10	1,30
8. Lampung	0,40	8,40
9. Bangka Belitung	0,00	11,50
10. Kepulauan Riau	-	-
11. DKI Jakarta	0,00	0,31
12. Jawa Barat	0,00	0,90
13. Jawa Tengah	0,00	7,70
14. DI Yogyakarta	0,00	4,10
15. Jawa Timur	0,00	9,40
16. Banten	0,00	6,80
17. Bali	0,00	2,60
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	3,30
19. Nusa Tenggara Timur	-	-
20. Kalimantan Barat	0,00	3,40
21. Kalimantan Tengah	-	-
22. Kalimantan Selatan	0,00	1,40
23. Kalimantan Timur	0,00	0,21
24. Sulawesi Utara	0,00	0,35
25. Sulawesi Tengah	0,54	2,26
26. Sulawesi Selatan	0,00	0,82
27. Sulawesi Tenggara	1,73	4,13
28. Gorontalo	-	-
29. Sulawesi Barat	-	-
30. Maluku	-	-
31. Maluku Utara	0,00	1,00
32. Papua Barat	-	-
33. Papua	0,00	0,10
Indonesia	1,20	4,00

Tabel B.9. Selang Kepercayaan (95%) dari Estimasi Parameter Itik Manila Menurut Provinsi

Provinsi	Penjualan		Pemotongan	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. NAD	16,24	59,08	4,81	9,71
2. Sumatera Utara	28,10	50,60	0,00	7,20
3. Sumatera Barat	0,00	33,20	0,00	10,20
4. Riau	28,10	50,60	3,51	9,59
5. Jambi	7,30	13,30	7,89	13,97
6. Sumatera Selatan	8,50	51,30	6,45	13,39
7. Bengkulu	7,30	10,30	0,00	17,87
8. Lampung	77,60	29,39	7,78	13,26
9. Bangka Belitung	0,00	28,61	3,90	13,13
10. Kepulauan Riau	32,27	38,73	0,88	1,90
11. DKI Jakarta	24,92	71,14	0,04	8,42
12. Jawa Barat	29,30	130,40	5,85	10,79
13. Jawa Tengah	33,30	57,20	7,97	10,83
14. DI Yogyakarta	21,18	72,17	10,39	16,83
15. Jawa Timur	0,00	48,10	5,15	10,63
16. Banten	14,70	38,65	7,07	17,38
17. Bali	34,90	83,30	0,00	37,10
18. Nusa Tenggara Barat	46,28	73,14	6,31	20,97
19. Nusa Tenggara Timur	0,00	55,55	5,45	14,31
20. Kalimantan Barat	37,61	73,99	4,77	15,27
21. Kalimantan Tengah	4,90	18,70	2,40	11,10
22. Kalimantan Selatan	100,71	154,33	4,20	33,40
23. Kalimantan Timur	0,00	79,00	5,96	10,20
24. Sulawesi Utara	16,21	52,39	0,00	33,11
25. Sulawesi Tengah	7,41	16,03	0,00	15,80
26. Sulawesi Selatan	6,49	63,04	5,49	9,81
27. Sulawesi Tenggara	7,19	14,29	13,98	26,08
28. Gorontalo	22,48	47,38	2,43	10,55
29. Sulawesi Barat	0,00	63,70	0,00	16,70
30. Maluku	10,24	109,06	2,84	11,50
31. Maluku Utara	35,19	88,69	4,81	11,59
32. Papua Barat	0,00	44,10	3,55	14,61
33. Papua	56,54	87,50	15,87	28,77
Indonesia	74,29	83,59	6,57	7,79

Tabel B.9. Lanjutan

Provinsi	Kematian		Pengurangan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. NAD	5,95	9,25	0,00	7,30
2. Sumatera Utara	3,97	14,51	0,00	0,91
3. Sumatera Barat	10,90	28,80	0,00	1,10
4. Riau	11,19	20,41	0,00	4,60
5. Jambi	10,25	15,07	1,93	3,53
6. Sumatera Selatan	12,54	32,42	0,95	12,35
7. Bengkulu	2,76	19,78	-	-
8. Lampung	12,73	22,97	-	-
9. Bangka Belitung	8,24	17,26	-	-
10. Kepulauan Riau	3,08	6,14	-	-
11. DKI Jakarta	6,17	16,25	0,00	2,75
12. Jawa Barat	11,13	26,19	1,10	3,40
13. Jawa Tengah	15,28	22,50	3,30	10,50
14. DI Yogyakarta	6,36	28,78	-	-
15. Jawa Timur	0,00	18,40	0,00	3,00
16. Banten	14,51	21,37	-	-
17. Bali	0,00	39,89	1,49	3,57
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	43,47	0,00	11,70
19. Nusa Tenggara Timur	7,37	23,79	-	-
20. Kalimantan Barat	9,22	29,36	-	-
21. Kalimantan Tengah	0,00	11,80	0,00	4,30
22. Kalimantan Selatan	11,09	19,09	2,39	7,29
23. Kalimantan Timur	6,39	17,41	0,33	1,07
24. Sulawesi Utara	3,28	13,82	4,24	13,96
25. Sulawesi Tengah	0,00	30,20	0,30	2,10
26. Sulawesi Selatan	14,99	24,35	-	-
27. Sulawesi Tenggara	26,31	49,72	2,54	5,52
28. Gorontalo	7,27	20,67	-	-
29. Sulawesi Barat	0,00	51,80	0,00	14,20
30. Maluku	1,25	31,05	0,00	2,70
31. Maluku Utara	7,98	23,18	0,00	3,18
32. Papua Barat	0,00	44,80	0,00	21,30
33. Papua	3,32	24,02	2,66	5,12
Indonesia	16,61	18,93	4,03	5,67

Tabel B.9. Lanjutan

Provinsi	Pembelian		Penetasan	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. NAD	3,85	45,55	32,90	62,80
2. Sumatera Utara	0,00	3,30	45,47	95,95
3. Sumatera Barat	0,00	29,80	28,52	53,60
4. Riau	0,00	14,50	46,09	82,83
5. Jambi	2,11	5,33	56,99	75,37
6. Sumatera Selatan	0,10	25,40	36,50	135,10
7. Bengkulu	0,00	20,11	15,63	78,63
8. Lampung	1,29	4,66	61,89	98,85
9. Bangka Belitung	0,00	18,45	31,96	67,51
10. Kepulauan Riau	16,87	17,65	28,36	41,26
11. DKI Jakarta	4,76	17,66	30,65	109,29
12. Jawa Barat	0,00	57,80	54,50	137,90
13. Jawa Tengah	9,20	18,80	62,36	86,20
14. DI Yogyakarta	0,00	43,37	65,45	115,41
15. Jawa Timur	15,40	34,00	0,00	88,70
16. Banten	0,92	5,16	54,50	103,40
17. Bali	2,40	24,60	0,00	194,10
18. Nusa Tenggara Barat	0,20	13,40	50,21	162,59
19. Nusa Tenggara Timur	0,00	101,30	21,14	61,44
20. Kalimantan Barat	0,00	11,86	25,56	148,67
21. Kalimantan Tengah	4,22	37,66	0,00	30,50
22. Kalimantan Selatan	65,55	125,49	38,40	152,70
23. Kalimantan Timur	0,00	25,38	28,36	63,92
24. Sulawesi Utara	3,30	28,50	18,75	76,77
25. Sulawesi Tengah	7,41	16,03	0,00	64,00
26. Sulawesi Selatan	0,98	7,37	53,32	89,62
27. Sulawesi Tenggara	0,14	7,92	77,69	109,00
28. Gorontalo	0,00	27,48	21,70	68,70
29. Sulawesi Barat	3,60	90,30	0,00	167,00
30. Maluku	8,55	65,75	17,25	90,27
31. Maluku Utara	49,90	66,20	3,32	71,14
32. Papua Barat	21,91	157,15	35,92	146,98
33. Papua	30,48	58,78	63,59	100,87
Indonesia	10,00	35,40	78,30	115,40

Tabel B.9. Lanjutan

Provinsi	Penambahan Lain	
	Est - 1,96 SE	Est + 1,96 SE
(1)	(14)	(15)
1. NAD	0,00	2,60
2. Sumatera Utara	0,00	9,50
3. Sumatera Barat	0,00	10,70
4. Riau	0,31	1,25
5. Jambi	0,00	1,60
6. Sumatera Selatan	0,40	0,88
7. Bengkulu	-	-
8. Lampung	-	-
9. Bangka Belitung	-	-
10. Kepulauan Riau	-	-
11. DKI Jakarta	-	-
12. Jawa Barat	0,30	1,30
13. Jawa Tengah	0,30	2,50
14. DI Yogyakarta	-	-
15. Jawa Timur	0,00	3,20
16. Banten	0,90	5,20
17. Bali	0,33	1,51
18. Nusa Tenggara Barat	0,00	3,60
19. Nusa Tenggara Timur	-	-
20. Kalimantan Barat	-	-
21. Kalimantan Tengah	0,06	0,76
22. Kalimantan Selatan	3,62	6,02
23. Kalimantan Timur	0,77	2,53
24. Sulawesi Utara	0,00	3,60
25. Sulawesi Tengah	0,10	1,60
26. Sulawesi Selatan	-	-
27. Sulawesi Tenggara	0,47	1,41
28. Gorontalo	-	-
29. Sulawesi Barat	1,85	4,91
30. Maluku	0,21	1,67
31. Maluku Utara	-	-
32. Papua Barat	-	-
33. Papua	0,20	0,68
Indonesia	0,97	1,51

AKHIR DARI TABEL-TABEL

- STANDARD ERROR (SE)
- RELATIVE STANDARD ERROR (RSE)
- ESTIMASI PARAMETER (EST)

Serta Selang Kepercayaan 95% dari Estimasi Rasio/Proporsi Parameter terhadap Stok Awal menurut Provinsi dan Jenis Ternak

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISBN 978-979-064-565-3



9 789790 645653